



laporan

KINERJA

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

"Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD tahun 2019-2024. Banyak dinamika yang muncul selama proses pemerintahan, baik hal yang mendukung keberhasilan pencapaian maupun sebaliknya. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tetap konsisten memberikan Upaya dan Solusi optimal dalam menghadapi tantangan yang ada."

2024



Kata Pengantar

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Lombok Barat tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang petunjuk teknis, pelaporan dan tata cara reviunya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif LAKIP Kabupaten Lombok Barat merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Isi dari LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat serta penjelasan tentang Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja.

LAKIP Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat tahun 2019-2024. Hal ini merupakan wujud dari keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya Good Governance dan Clean Government. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan SAKIP.

Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 ini,

khususnya seluruh Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat serta Tim Perumus yang telah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan selama penyusunan LAKIP ini.

LAKIP ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, namun demikian telah dilakukan upaya untuk memperbaiki, menyempurnakan dan mengembangkan semaksimal mungkin melalui koordinasi antar Perangkat Daerah terkait dan diskusi bersama terhadap permasalahan yang memerlukan asistensi nara sumber. Semoga LAKIP Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja instansi pemerintah tahun 2024 dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan program kegiatan pada tahun berikutnya.

Gerung, 11 Maret 2025
BUPATI LOMBOK BARAT
H. LALU AHMAD ZAINI



Ringkasan Eksekutif

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) pada pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Reformasi Birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang di implementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

Penyelenggaraan *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selanjutnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024, untuk mewujudkan visi lima tahun kedepan telah ditetapkan 5 misi, 5 tujuan, 12 sasaran strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2024 dan salah satu media pertanggungjawaban Bupati selaku Kepala Daerah. LAKIP tidak sekedar hanya alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam

rangka peningkatan kinerja kedepan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sebanyak 20 indikator kinerja yang mendukung 12 sasaran strategis. Terdapat 13 indikator yang telah mencapai target, dan 7 indikator yang tidak tercapai. Adapun target yang tidak tercapai adalah:

1. Penanaman Modal Asing (PMA)	: 10.05 %
2. Nilai AKIP Daerah	: 78.11%
3. Kabupaten Layak Anak (KLA)	: 82.20%
4. Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	: 95.69%
5. Harapan Lama Sekolah (HLS)	: 96.48%
6. Nilai PDRB Perkapita	: 97.04%
7. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	: 99.14%

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah melaksanakan seluruh program sasaran yang tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahun (RPJMD) dan dokumen rencana tahunan. Realisasi anggaran tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 1,942,769,587,863** atau **95.58%** dari target **Rp. 2.032.690.410.344**. Terhitung, sisa anggaran pada tahun tersebut adalah **Rp. 89,920,822,481**. Dari keseluruhan sisa anggaran terdapat efisiensi sebesar **Rp. 83,601,412,458** atau **4,30%** dari 9 sasaran strategis (13 indikator kinerja utama) daerah yang telah tercapai lebih dari 100%

Di samping itu, beberapa prinsip dalam akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan atau pemberi amanah. Sehingga, beberapa upaya dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja pada tahun - tahun berikutnya perlu dilakukan beberapa perbaikan yaitu perumusan indikator kinerja daerah maupun indikator kinerja utama pada masing-masing perangkat daerah agar lebih spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki jangka waktu dalam pencapaiannya (*SMART*), termasuk juga di dalamnya terkait penentuan besaran target kinerja agar adanya hasil analisis yang lebih mendalam sehingga pengukuran kinerja pada akhir tahun anggaran dapat memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan pada tahun berikutnya.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. LATARR BELAKANG.....	1
1.2. GAMBARAN UMUM.....	2
1.2.1. Data Geografis Wilayah.....	2
1.2.2. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	3
1.2.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lombok Barat.....	5
1.2.4. Indeks Pembangunan Manusia.....	7
1.2.5. Inflasi.....	9
1.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	10
1.4. ISU STRATEGIS	16
1.5. TINDAK LANJUT PEMDA ATAS REKOMENDASI LHE KEMENTERIAN PAN-RB	17
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	20
2.1. RPJMD PEMERINDAH KABUPATEN LOMBOK BARAT	20
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA	25
2.3. PERJANJIAN KINERJA.....	28
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1. PENGUKURAN KINERJA.....	31
3.1.1. Capaian Kinerja Tahun 2024	32
3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	34
3.1.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional.....	37
3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	38
3.2.1. Faktor Keberhasilan dan Faktor Kegagalan Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024.....	38

3.3.	AKUNTABILITAS KEUANGAN	17
3.4.	ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN	
	TAHUN 2024.....	120
BAB 4	INOVASI DAERAH.....	123
4.1.	INOVASI DAERAH	123
BAB 5	PENUTUP	130
5.1.	KESIMPULAN.....	130
5.2.	SARAN PERBAIKAN	132

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan.....	2
Tabel 1.2	Jumlah Desa/Kelurahan Dan Dusun Menurut Kecamatan Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024.....	4
Tabel 1.3	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024.....	5
Tabel 1.4	Angka Partisipasi Menurut Jenjang Pendidikan Di Kab. Lombok Barat	8
Tabel 1.5	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Melek Huruf Di Kabupaten Lombok Barat.....	9
Tabel 1.6	Laju Inflasi Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020-2024	10
Tabel 1.7	Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Lombok Barat tahun 2019-2024.....	16
Tabel 2.1	Keterkaitan Tujuan, Sasaran Dan Strategi Kabupaten Lombok Barat.....	22
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024.....	26
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024	28
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2024.....	32
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dan Tahun 2024	34
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Standar Nasional.....	37
Tabel 3.4	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024.....	39
Tabel 3.5	Rekap IKM Perangkat Daerah/ UPT/Unit Kerja Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024.....	40
Tabel 3.6	Ketersediaan Angkutan Umum Pada Jaringan Trayek Di Wilayah Kabupaten Lombok Barat.....	51
Tabel 3.7	Ketersediaan Jalur Trayek Menuju Obyek Wisata Tahun 2024	54
Tabel 3.8	Ketersediaan Jaringan Trayek Menuju Pasar Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024.....	61
Tabel 3.9	Data Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten	64
Tabel 3.10	Rasio Rumah Tahun 2019-2024	65
Tabel 3.11	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2024.....	66
Tabel 3.12	Data Cakupan Layanan Air Minum.....	68
Tabel 3.13	Data Cakupan Layanan Sanitasi.....	69
Tabel 3.14	Capaian PAD Dirinci Menurut Perangkat Daerah Tahun 2024.....	70
Tabel 3.15	Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Lombok Barat Melalui Program Nasional Dan Program Pemerintah Provinsi Ntb Tahun 2024.....	85
Tabel 3.16	Pemetaan Program Untuk Pemberdayaan Di Daerah Tahun 2024	86
Tabel 3.17	Pemetaan Program Usaha Ekonomi Kreatif Di Daerah Tahun 2024.....	87
Tabel 3.18	Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 – 2024	94
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Indikator Sasaran Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2024.....	104
Tabel 3.20	Rincian Hasil Penilaian Evaluasi Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024	106
Tabel 3.21	Perbandingan Nilai KLA Tahun 2023 Dan Tahun 2024 Berdasarkan Indikator Penilaiannya	107
Tabel 3.22	Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	117
Tabel 3.23	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024.....	120
Tabel 5.1	Capaian Kinerja Tahun 2024	130

Daftar *Gambar*

Gambar 1.1 Profile ASN Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024	5
Gambar 2.1 RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024	21

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Persentase Luas Daerah Menurut Kecamatan	3
Grafik 1.2	Jumlah PNS Dan PPPK.....	6
Grafik 1.3	Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Jabatan.....	6
Grafik 1.4	Perkembangan IPM Kabupaten Lombok Barat.....	7
Grafik 1.5	IPM, TPT Dan Kemiskinan Kabupaten Lombok Barat	8
Grafik 1.6	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Dalam Sebulan di Kabupaten Lombok Barat, Tahun 2022-2024.....	9
Grafik 1.7	Rata-Rata Lama Sekolah.....	11
Grafik 1.8	Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Tahun 2020-2024.....	12
Grafik 1.9	Prevalensi Stunting Tahun 2020-2024	12
Grafik 1.10	Usia Harapan Hidup Tahun 2020-2024	13
Grafik 3.1	IKM Perangkat Daerah Tertinggi.....	41
Grafik 3.2	IKM Perangkat Daerah Terendah.....	43
Grafik 3.3	Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan.....	84
Grafik 3.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2019-2024	91
Grafik 3.5	Trend Jumlah Balita Stunting di Kab. Lombok Barat Tahun 2020-2024	96
Grafik 3.6	Trend Jumlah Kematian Bayi di Kab. Lombok Barat Tahun 2020-2024.....	98
Grafik 3.7	Trend Jumlah Kematian Ibu di Kab. Lombok Barat Tahun 2020-2024.....	100



PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bab 1 berisi:

1. Latar Belakang
2. Gambaran Umum Lombok Barat
3. Permasalahan dan Isu Strategis
4. Tindak Lanjut LHE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan rangkaian sistematis berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pelaporan dan penilaian kinerja pemerintah daerah menganut prinsip-prinsip good governance diantaranya transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas dan kepemimpinan yang efektif.

Sejumlah regulasi yang mengatur penyusunan LAKIP antara lain Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Daerah diharuskan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Lombok Barat merupakan instrument pertanggungjawaban yang akurat dan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja pemerintah daerah. LAKIP merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat yang dinamis. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat merumuskan capaian, tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 diharapkan mampu memberikan informasi hasil capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2024 serta mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menyelenggarakan tugas pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance untuk melaksanakan tugas dan fungsinya menjalankan regulasi dan kebijakan dalam upaya praktek terbaik dan benar yang transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. GAMBARAN UMUM

1.2.1. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang secara geografis terletak antara $8,25^{\circ}$ – $8,55^{\circ}$ Lintang Selatan dan $115,46^{\circ}$ – $116,20^{\circ}$ Bujur Timur, secara geografisnya memiliki batas wilayah sebagai berikut Sebelah Selatan : $8^{\circ}55'19''\text{LS}$ – $116^{\circ}0'5''\text{BT}$, Sebelah Barat: $8^{\circ}45'11,15''\text{LS}$ – $115^{\circ}49'12,04''\text{BT}$, Sebelah Timur Selatan: $8^{\circ}52'22,29''\text{LS}$ - $116^{\circ}6'33,7''\text{BT}$, Sebelah Timur Barat: $^{\circ}24'33,82''\text{LS}$ - $116^{\circ}20'15,62''\text{BT}$. Kabupaten Lombok Barat merupakan kabupaten dengan letak geografis yang menguntungkan.

Dalam segi pembangunan wilayah, pemandangan alam yang indah, tanah yang subur, maupun sumber air yang melimpah ada di Kabupaten Lombok Barat. Selain itu, Kabupaten Lombok Barat dapat disebut sebagai pintu gerbang bagi Pulau Lombok karena pelabuhan penyeberangan berada di kabupaten ini.

TABEL 1.1
LUAS WILAYAH MENURUT KECAMATAN

<i>No</i>	<i>Kecamatan</i>	<i>Luas Wilayah (km²/sq.km)</i>	<i>Persentase (%)</i>
1	Sekotong	344,25	37,30
2	Lembar	77,20	8,36
3	Gerung	60,31	6,53
4	Labuapi	23,88	2,59
5	Kediri	21,14	2,29
6	Kuripan	25,03	2,71
7	Narmada	128,78	13,95
8	Lingsar	115,47	12,51
9	GunungSari	84,17	9,12
10	Batu Layar	42,68	4,62
Jumlah		922,91	100

Luas wilayah Kabupaten Lombok Barat adalah sebesar 1053,92 km². Sebesar 50,22% dari luas Kabupaten Lombok Barat merupakan Wilayah Kecamatan Sekotong, yaitu dengan luas 529,38 km² sedangkan Kecamatan Kuripan merupakan kecamatan yang paling kecil wilayahnya dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat dimana luasnya hanya mencapai 21,56 km². Walau Kecamatan Sekotong merupakan wilayah terluas di Kabupaten Lombok Barat, ia memiliki perkembangan yang lebih lambat dibanding dengan kecamatan lain. Berdasarkan kondisi topografinya.

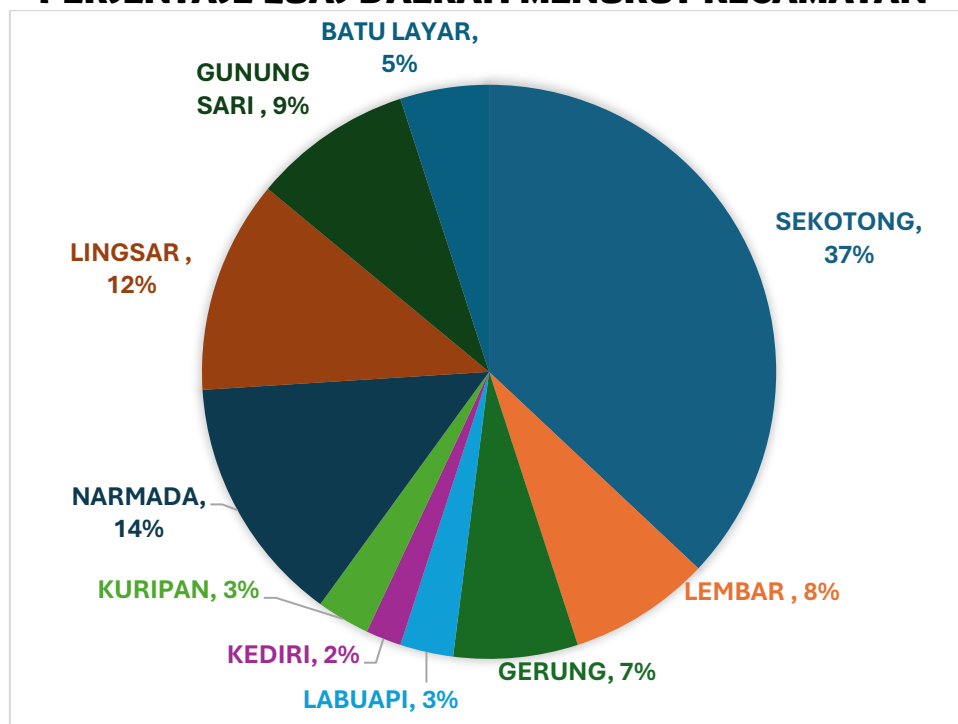
Wilayah Kabupaten Lombok Barat dikategorikan sebagai berikut :

- Ketinggian 0 - 100 meter di atas permukaan laut, memiliki luas sebesar 34.800 Ha atau 40,80% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- Ketinggian 100-500 meter, memiliki luas wilayah sebesar 40.966 Ha atau 48% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- Ketinggian 500-1000 meter memiliki luas wilayah 8.650 Ha atau 10,1% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat, dan
- Ketinggian 1000 meter keatas seluas 885 Ha atau 1,0% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Sedangkan tingkat kemiringan lahan di Kabupaten Lombok Barat sangat bervariasi dan di klasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelas kemiringan sebagai berikut:

- Tingkat kemiringan 0-2 % merupakan tingkat kemiringan yang paling luas mencapai sekitar 31.841 Ha atau 37,3 % dari luas Kabupaten Lombok Barat;
- Tingkat kemiringan 2-15 % mencapai seluas 10.657 Ha atau 12,5 % dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- Tingkat kemiringan 15-40 % seluas 25.920 Ha atau 30,3 % dari luas Kabupaten Lombok Barat dan
- Tingkat kemiringan lahan 40 % keatas seluas 16.883 Ha atau 19,8 % dari luas Kabupaten Lombok Barat dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat.

GRAFIK 1.1
PERSENTASE LUAS DAERAH MENURUT KECAMATAN



1.2.2. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Secara administratif, Kabupaten Lombok Barat sampai dengan tahun 2024 terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu: Kecamatan Sekotong, Kecamatan Lembar, Kecamatan Gerung, Kecamatan Labuapi, Kecamatan Kediri, Kecamatan Kuripan,

Kecamatan Narmada, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gerung merupakan ibu kota kabupaten sekaligus sebagai pusat pemerintahan. Kecamatan Narmada memiliki jumlah desa dan dusun terbanyak yaitu 21 desa, dengan 133 dusun. Kecamatan Kuripan sebagai kecamatan dengan jumlah desa dan dusun paling sedikit yaitu 6 desa, 40 dusun. Tabel berikut menyajikan secara rinci jumlah desa/kelurahan serta luas wilayah pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Lombok Barat sampai tahun 2024.

TABEL 1.2
JUMLAH DESA/KELURAHAN DAN DUSUN MENURUT
KECAMATAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2024

<i>No</i>	<i>Kecamatan</i>	<i>Desa/ Kelurahan</i>	<i>Dusun</i>	<i>Luas Wilayah (Km²)</i>	<i>Persentase (%)</i>
1	Sekotong	9	106	344,25	50,22
2	Lembar	10	87	77,20	5,94
3	Gerung	14	71	60,31	5,91
4	Labuapi	12	73	23,88	2,68
5	Kediri	10	74	21,14	2,05
6	Kuripan	6	40	25,03	2,04
7	Narmada	21	133	128,78	10,21
8	Lingsar	15	94	115,47	9,16
9	Gunungsari	16	103	84,17	8,51
10	Batulayar	9	63	42,68	3,23
Jumlah		119/3	844	922,91	100

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat 2024

Sebagai subjek sekaligus objek dari pembangunan, penduduk merupakan aset potensial bagi pembangunan. Penduduk yang besar dapat dimanfaatkan untuk proses pembangunan, memungkinkan penggalan sumberdaya alam yang dimiliki, memacu pemerintah untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana social ekonomi, serta merupakan pasar potensial bagi berbagai produk. Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Lombok Barat sebesar 753.641 ribu jiwa. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, angka jumlah penduduk meningkat yaitu 765.049 ribu jiwa.

Berdasarkan hasil sensus penduduk sepanjang 2020-2024, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Lombok Barat sebesar 1,50 persen per tahun. Laju pertumbuhan penduduk terjadi karena di pengaruhi faktor kematian, kelahiran dan migrasi. Jika dilihat dari sisi kelompok umur, jumlah penduduk seperti halnya piramida, dimana pada umur muda jumlah penduduk lebih besar daripada jumlah penduduk usia tua. Penduduk usia produktif memang mendominasi di Lombok Barat, dan hanya sebagian kecil saja yang merupakan penduduk usia lanjut. Besarnya penduduk usia 0 hingga 19 tahun dapat disikapi oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan terutama dalam hal pendidikan. Karena penduduk usia tersebut berada pada usia sekolah, apabila mereka tidak memperoleh pendidikan yang layak maka kualitas SDM Lombok Barat akan rendah.

Kepadatan Penduduk Kabupaten Lombok Barat mencapai 826,47 jiwa/km² di tahun 2024. Kecamatan Labuapi merupakan kecamatan terpadat di Lombok

Barat dengan luas wilayah hanya sebesar 23,88 km² kepadatan penduduk di Kecamatan Labuapi mencapai 3341,67 jiwa/ km². Beberapa kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Mataram menjadi kawasan pemukiman penyangga, yaitu Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Narmada, Kecamatan Lingsar, dan Kecamatan Batulayar. Sebagai kecamatan penyangga, kepadatan penduduk di lima kecamatan tersebut juga memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Status sebagai kecamatan penyangga secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian daerah tersebut.

TABEL 1.3
KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN TAHUN 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²
1	Sekotong	344,25	70.584	205,04
2	Lembar	77,20	59.084	765,34
3	Gerung	60,31	95.224	1578,91
4	Labuapi	23,88	79.799	3341,67
5	Kediri	21,14	67.815	3207,90
6	Kuripan	25,03	44.947	1795,73
7	Narmada	128,78	110.680	859,45
8	Lingsar	115,47	80.080	693,51
9	Gunungsari	84,17	98.598	1171,41
10	Batulayar	42,68	55.946	1310,82
Jumlah		922,91	762.757	826,47

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat 2024

1.2.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lombok Barat

GAMBAR 1.1
PROFILE ASN KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2024



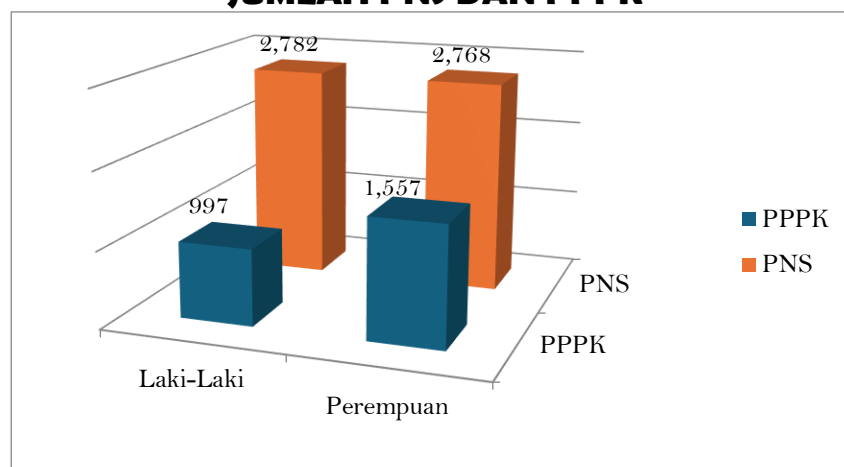
Sumber Data: Sub Bidang Data dan Informasi Aparatur BKDPSDM Lobar

Jumlah ASN Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Barat adalah 8.014 orang yang terdiri atas 5.550 PNS dan 2.554 PPPK. Berdasarkan data Gambar 1.1 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

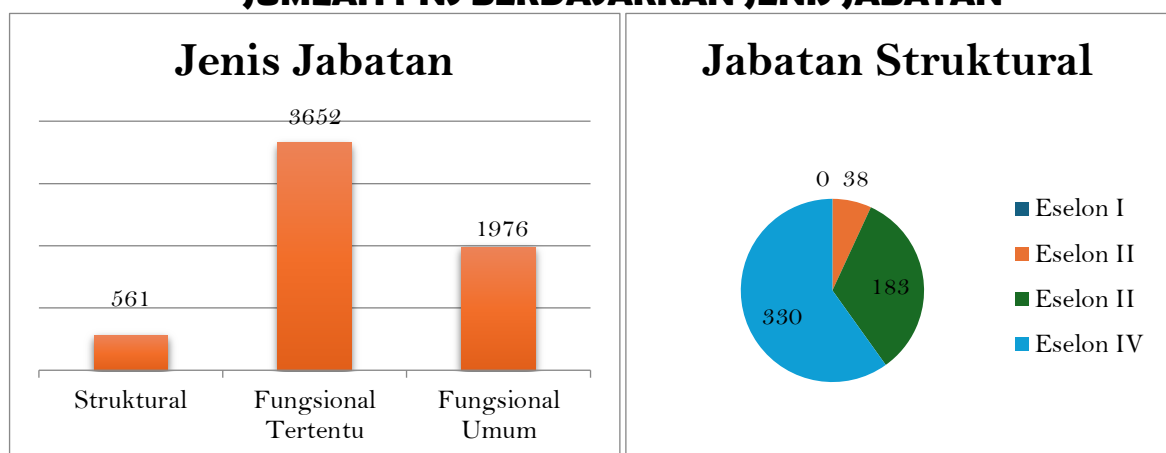
Jumlah PNS di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2024 sebanyak 5.549 pegawai terdiri dari 2.782 PNS berjenis kelamin laki-laki dan 2.768 PNS berjenis kelamin perempuan. Sejumlah PNS tersebut tersebar ke dalam beberapa jenis jabatan, yaitu Jabatan Struktural sejumlah 532 pegawai, Jabatan Fungsional Tertentu sejumlah 3.645 pegawai dan Jabatan Fungsional Umum sejumlah 1.373. Profile PNS di Kabupaten Lombok Barat disajikan dalam beberapa diagram berikut :

GRAFIK 1.2
JUMLAH PNS DAN PPPK



Sumber Data : Sub Bidang Data dan Informasi Aparatur BKDPSDM Lobar

GRAFIK 1.3
JUMLAH PNS BERDASARKAN JENIS JABATAN



Sumber Data : Sub Bidang Data dan Informasi Aparatur BKDPSDM Lobar

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Pada tahun 2024 Pegawai PPPK Kabupaten Lombok Barat berjumlah 2.554 pegawai. Angka tersebut ditempatkan dalam 3 kategori dimana didominasi oleh kategori guru, tenaga teknis dan tenaga kesehatan sejumlah.

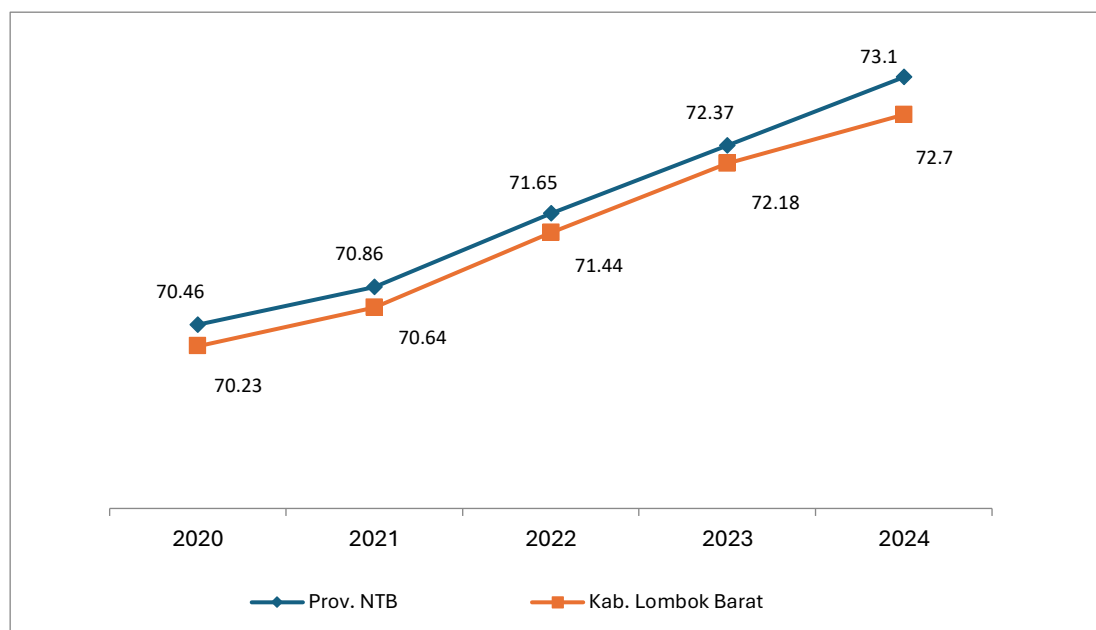
1.2.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan 3 dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian tertentu karena mewakili beberapa faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Kualitas sumber daya manusia penduduk Lombok Barat dapat dinilai menggunakan indikator salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI). IPM menggambarkan empat komponen yaitu :

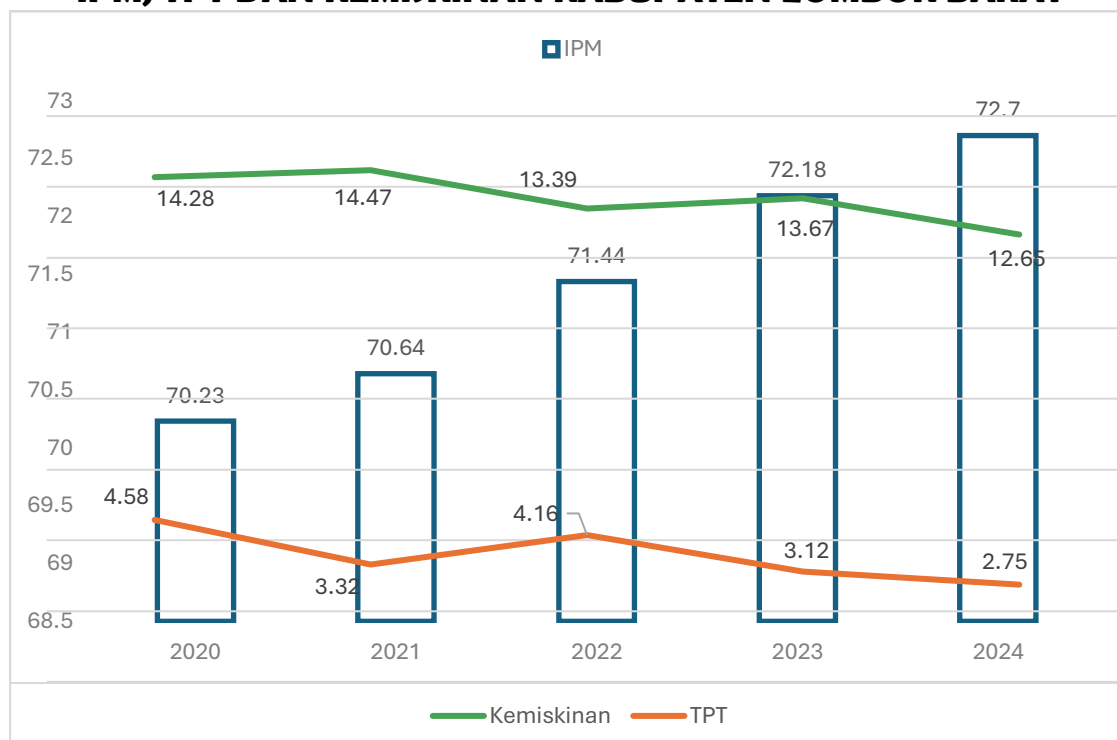
1. Angka Harapan Hidup, mewakili bidang kesehatan
2. Angka Rata-Rata Lama sekolah
3. Harapan Lama Sekolah, digunakan untuk mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan.
4. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan dimana bertujuan untuk mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak sebagai ukuran kualitas hidup.

GRAFIK 1.4
PERKEMBANGAN IPM KABUPATEN LOMBOK BARAT



Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat

GRAFIK 1.5
IPM, TPT DAN KEMISKINAN KABUPATEN LOMBOK BARAT



Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat

Perkembangan IPM Kabupaten Lombok Barat dari tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan positif. Laju pertumbuhan IPM Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2023 sampai 2024 menunjukkan peningkatan sebesar 0,72 sehingga berada pada angka 72,7 dan menempati peringkat ke-5 se Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini menunjukkan beberapa komponen perkembangan IPM di Kabupaten Lombok Barat yaitu :

1. Angka Harapan Hidup dimana bayi baru lahir diharapkan dapat hidup hingga usia 72,64 Tahun.
2. Rata-rata Lama Sekolah dimana penduduk usia 25 tahun keatas rata-rata menempuh pendidikan selama 6,88 tahun atau setara kelas 1 SMP.
3. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di kabupaten Lombok Barat tahun 2021 sampai 2023 disajikan dalam tabel berikut:

TABEL. 1.4
ANGKA PARTISIPASI MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DI
KABUPATEN LOMBOK BARAT

<i>Jenjang Pendidikan</i>	<i>Angka Partisipasi Murni (APM)</i>				<i>Angka partisipasi Kasar (APK)</i>			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
<i>SD/MI/Sederajat</i>	99,51	99,91	99,69	98,37	105,35	105,44	106,88	102,84
<i>SMP/MTs/Sederajat</i>	85,39	87,22	87,09	86,99	100,53	92,25	96,47	93,97
<i>SMA/SMK/MA/Sederajat</i>	63,83	63,59	71,78	63,52	94,90	93,21	92,07	90,39

Sumber data : BPS, (Survei Sosial Ekonomi (Susenas))/BPS kab. Lombok Barat

Harapan Lama Sekolah dimana anak usia 7 tahun diharapkan mampu menempuh pendidikan selama 13,99 tahun atau setara dengan perguruan tinggi semester empat. Persentase penduduk berumur 15 Tahun keatas yang melek huruf menurut kelompok umur di Kabupaten Lombok Barat.

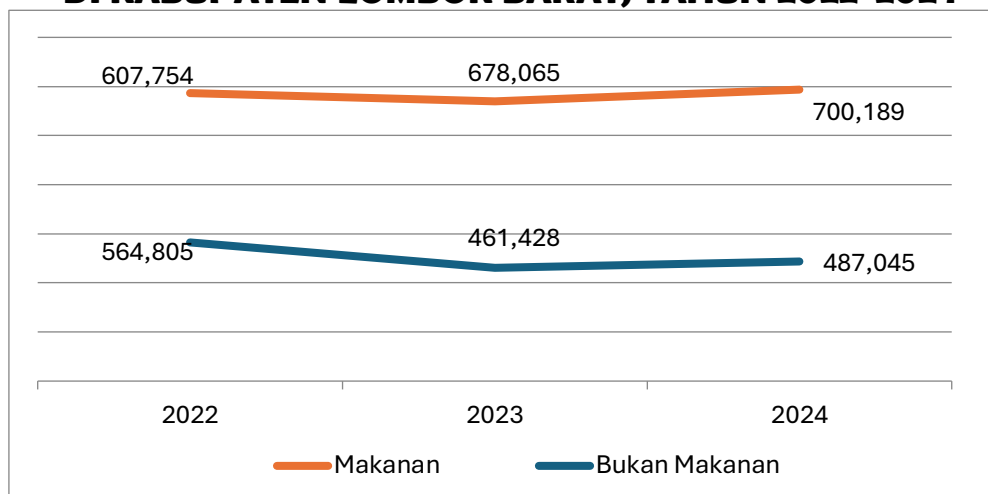
TABEL 1.5
PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KEATAS YANG MELEK HURUF DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

<i>Kelompok umur</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
<i>15-24</i>	99,40	100
<i>15-59</i>	91,78	92,86
<i>15+</i>	85,26	84,65
<i>60+</i>	41,66	30,96

Sumber data : BPS, (Survei Sosial Ekonomi (Susenas))/BPS kab. Lombok Barat

Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan, dimana rata-rata setiap penduduk mengeluarkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebesar 14,24 juta rupiah selama setahun. Grafik rata rata pengeluaran per Kapita Sebulan di Kabupaten Lombok Barat tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

GRAFIK 1.6
RATA-RATA PENGELUARAN PERKAPITA DALAM SEBULAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT, TAHUN 2022-2024



Sumber data : BPS, (Survei Sosial Ekonomi (Susenas))/BPS kab. Lombok Barat

1.2.5. Inflasi

Laju inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro daerah yang menggambarkan tingkat harga rata - rata barang/jasa kebutuhan masyarakat. Inflasi yang tinggi menunjukkan harga rata- rata barang/jasa kebutuhan yang tinggi. yang berdampak terhadap penurunan kemampuan daya beli masyarakat begitu pula sebaliknya. Perkembangan inflasi Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 1.6
LAJU INFLASI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020-2024

<i>Uraian</i>		<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
<i>Kab. Lombok Barat</i>	%	0.58	3.15	6.20	3,01	1,92
<i>Provinsi NTB</i>	%	0.60	3.16	6,23	3,02	1,28
<i>Nasional</i>	%	1.68	3.13	5.47	2.61	1.57

Inflasi Kabupaten Lombok Barat pada periode tahun 2020-2024 menunjukkan laju fluktuatif. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 6,20% sedangkan inflasi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,58%. Fokus pengendalian inflasi pada tahun 2024 adalah melakukan Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga, untuk merealisasikan hal tersebut kepala daerah dan jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Barat mensinergikan kebijakan stabilitas harga dengan kebijakan pemulihan ekonomi di daerah serta menghasilkan kebijakan pengendalian inflasi daerah.

Sinergi kebijakan pengendalian inflasi daerah mampu membuat pluktuasi harga di Kabupaten Lombok Barat terkendali, upaya pengendalian harga dilakukan agar daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga geliat produksi di tingkat UMKM tetap ada. Salah satunya dengan pemanfaatan IT dalam bentuk transformasi digital untuk pemasaran produk UMKM. Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia, berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga. Tujuannya agar harga tetap terkendali. Harga yang wajar dan stabil diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan. Selanjutnya untuk menjaga stabilitas harga volatile food dilakukan melalui upaya memperkuat empat pilar strategi yang mencakup :

- a. Keterjangkauan Harga,
- b. Pemantauan Harga Pangan Strategis
- c. Pasar Murah Kebutuhan Pokok.
- d. Himbauan Kepala Daerah dalam rangka Pengendalian Inflasi
- e. Bantuan Permodalan bagi pelaku UKM/IKM ketersediaan Pasokan,
- f. Pemantauan Dan Inspeksi Di Beberapa Gudang Distributor
- g. Kelancaran Distribusi
- h. Peningkatan kualitas Jalan Jalur distribusi
- i. Pengaturan dan prioritas kendaraan pengangkut bahan kebutuhan pokok pada saat-saat tertentu
- j. Kerjasama Distribusi pangan dengan Pemerintah Kabupaten Bangli

1.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

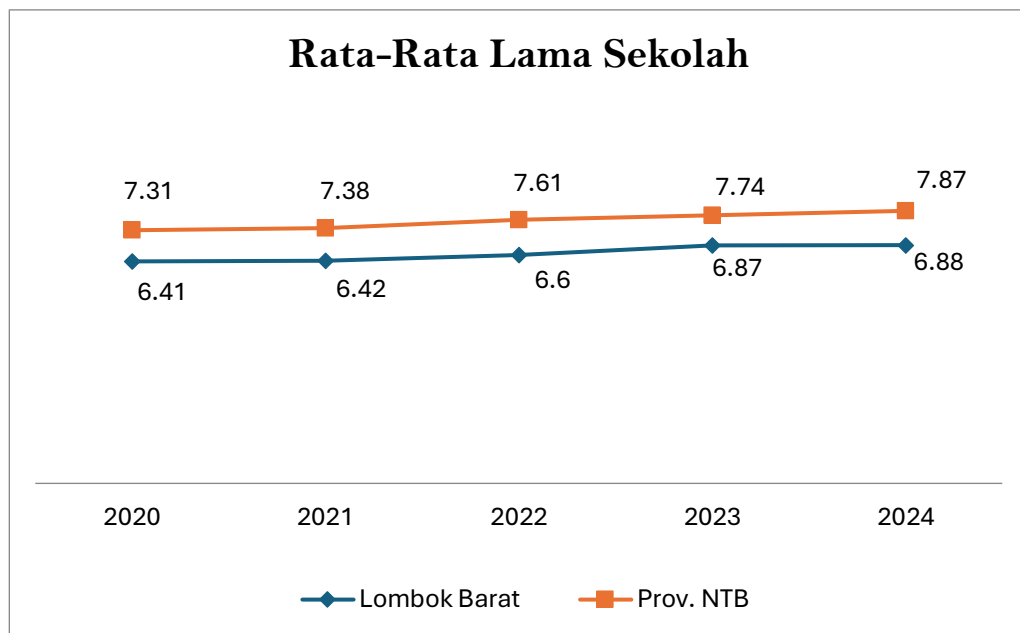
1.3.1. PERMASALAHAN

1.3.1.1. Urusan Pendidikan

Sektor pendidikan sebagai salah satu komponen pendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memegang peran sentral bersama-sama dengan sektor kesehatan dan ekonomi. Kondisi saat ini, masih relatif rendahnya rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2022 rata-rata lama sekolah berada pada angka 6,60 tahun, Tahun 2023 berada pada angka 6,87 tahun dan tahun 2024 berada pada angka 6,88 tahun atau setara dengan SMP Kelas VII. Capaian ini masih jauh

berada di bawah rata-rata Provinsi NTB yang pada tahun 2022 mencapai 7,61 tahun, dan tahun 2023 mencapai 7,81 tahun dan tahun 2024 mencapai 7,87 tahun. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Lombok Barat juga masih jauh dibawah rata-rata nasional yang pada tahun 2022 mencapai 8,69 tahun dan tahun 2023 mencapai 8,77 tahun. Angka tersebut menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk Lombok Barat masih berada pada jenjang pendidikan menengah setara SMP Kelas VII, tepatnya pada semester pertama kelas 1 SMP. Artinya program wajib belajar 9 tahun masih belum tuntas dilaksanakan di Lombok Barat.

GRAFIK 1.7
RATA-RATA LAMA SEKOLAH



Angka Putus Sekolah untuk jenjang SD/MI menurun pada tahun 2024 dari angka 0,023% menjadi 0,018%. Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2024 dibanding tahun 2023 dari 0,1% menjadi 0,138%.

Angka partisipasi murni tingkat SD/MI mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya dari 96,59% tahun 2023 meningkat menjadi 99,46% pada tahun 2024. Sama halnya dengan Angka Partisipasi Murni tingkat SMP/MTs meningkat dari 80,16% pada tahun 2023 menjadi 99,23% pada tahun 2024. Faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian target indikator kinerja tersebut diatas adalah kemudahan akses layanan pendidikan jenjang Sekolah Dasar, meningkatnya pemenuhan sarana prasarana pendidikan jenjang Sekolah Dasar serta peningkatan pengelolaan satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar dan Menengah.

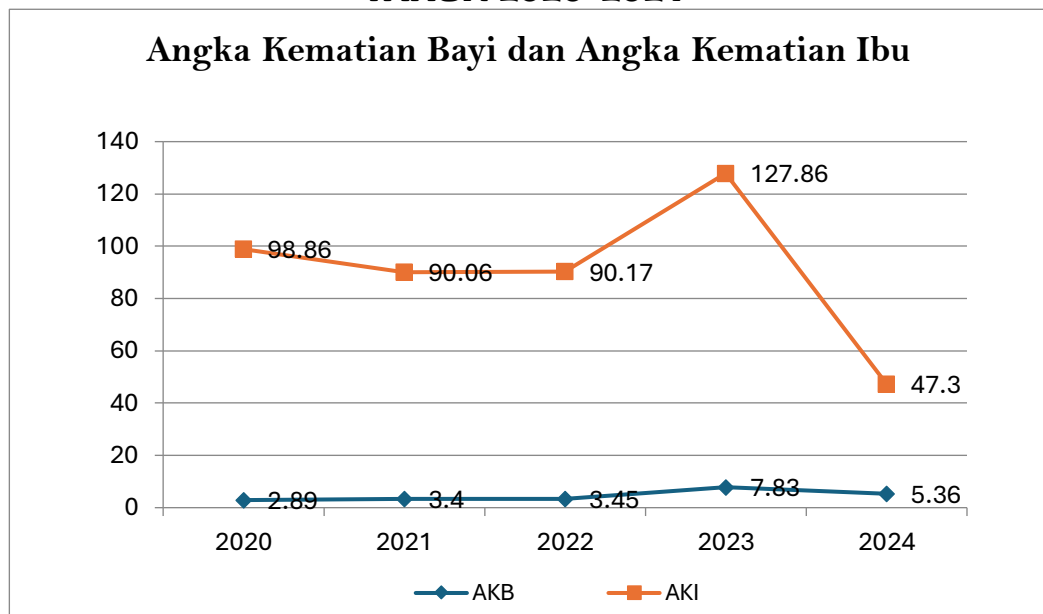
1.3.1.2. Urusan Kesehatan

Dibidang kesehatan ada beberapa indikator yang menjadi prioritas penanganan yang menjadi permasalahan serius seperti angka kematian bayi. Capaian AKB selama tahun 2020-2023 mengalami trend fluktuatif. Tahun tahun 2023 AKB berada pada angka 7,83 dan menurun pada Tahun 2024 pada angka 5,36.

Angka Kematian Ibu atau AKI mengalami penurunan yang sangat signifikan, dimana pada tahun 2023 AKI berada pada angka 127,86 dan menurun drastis pada tahun 2024 dengan angka 47,3. Selain itu, prevalensi stunting dari

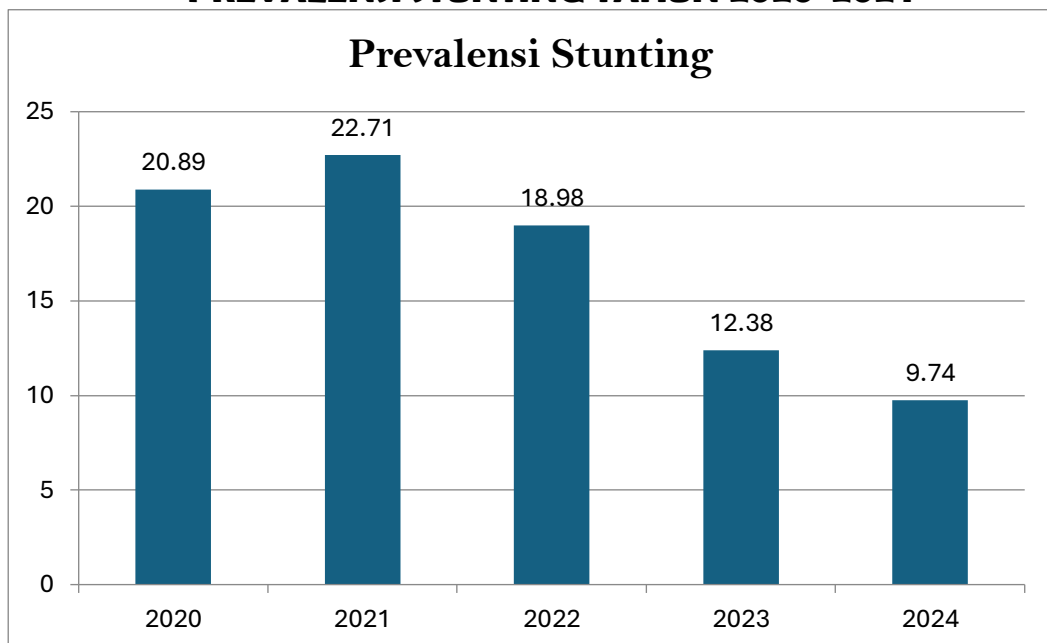
tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan penurunan, hal ini merupakan capaian yang baik bagi pemerintah Kab. Lombok Barat akan tetapi stunting tetap harus menjadi perhatian penting. Statistik Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Stunting disajikan dalam grafik berikut :

GRAFIK 1.8
ANGKA KEMATIAN BAYI DAN ANGKA KEMATIAN IBU
TAHUN 2020-2024



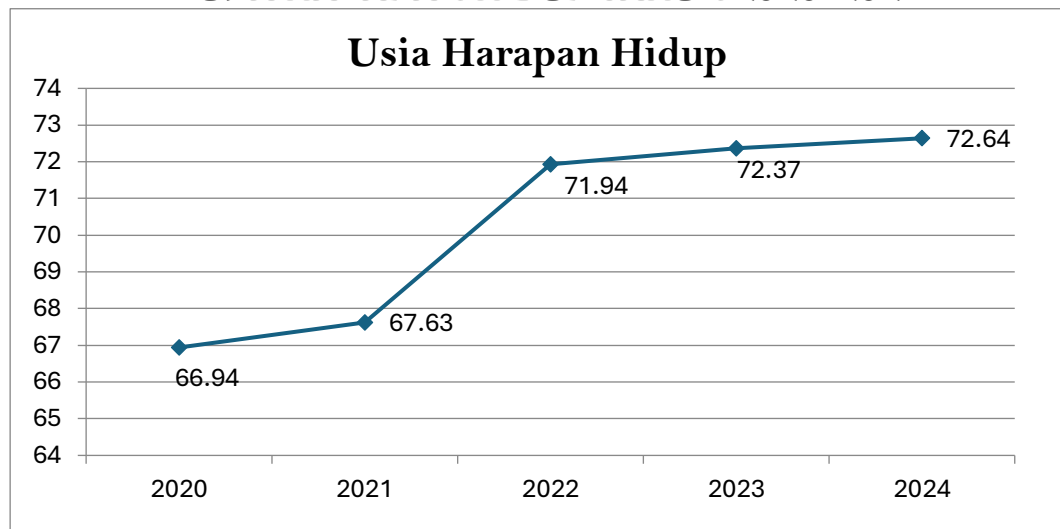
Sumber data : website Satu Data Lombok Barat

GRAFIK 1.9
PREVALENSI STUNTING TAHUN 2020-2024



Sumber data : website Satu Data Lombok Barat

GRAFIK 1.10
USIA HARAPAN HIDUP TAHUN 2020-2024



Sumber data : website Satu Data Lombok Barat

Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Lombok barat pada tahun 2024 mengalami peningkatan meskipun relatif kecil. Usia Harapan Hidup Kabupaten Lombok Barat berada pada urutan kelima dari 10 kabupaten termasuk dengan Provinsi NTB. Masih rendahnya usia harapan hidup masyarakat walaupun trend-nya cenderung meningkat yakni belum tercapainya imunisasi dasar lengkap serta masih tingginya kasus TBC di lingkungan masyarakat.

1.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kemantapan jalan dalam rangka meningkatkan konektifitas antar wilayah baru mencapai 76,03% sehingga belum optimal memperkuat antar simpul-simpul pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan multiplier effect cukup besar. Pembangunan infrastruktur harus didesain secara berkelanjutan baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air bersih dan sanitasi.

Jumlah penduduk yang terus meningkat dan perkembangan kawasan di kabupaten lombok barat cenderung terjadi secara alami. pada kawasan tertentu terjadi pertumbuhan lebih pesat dari konsep tata ruang yang telah ditetapkan sehingga mobiltas masyarakat, kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dan kebutuhan tempat tinggal yang terus meningkat yang berdampak pada kurang terkendalinya pemanfaatan ruang, tidak terpenuhinya akses aman air minum baik kualitas maupun kuantitas, penurunan kualitas lingkungan dan penurunan kualitas sistim drainase.

1.3.1.4. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Perlunya rencana terkait dengan pengurangan resiko bencana. Kondisi Kabupaten Lombok Barat memiliki kerawanan bencana alam geologi yang cukup tinggi, pemicu terjadinya bencana geologi diantaranya gempa bumi tsunami, letusan gunung api, banjir bandang, tanah longsor dan lainnya. Dari 10 kecamatan yang ada, 9 kecamatan dinyatakan rawan longsor dan rawan banjir di beberapa kecamatan serta Bencana Tsunami di Kecamatan Sekotong dan Lembar. Hal ini menyebabkan Kabupaten Lombok Barat perlu memiliki

Dokumen Strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat daerah. Masih rendahnya pelayanan penanganan bencana dikarenakan jangkauan yang luas, kurangnya ketersediaan pos pembantu, armada dan SDM serta regulasi penanganan bencana yang belum optimal.

1.3.1.5. Urusan Perumahan dan Permukiman

Rumah Layak Huni (RLH) belum mencapai 100%. Jumlah dan proporsi penduduk yang semakin lama semakin bertambah, berdampak pula pada semakin berkurangnya ketersediaan lahan dan ruang untuk perumahan dan permukiman yang berakibat pada meningkatnya harga tanah sehingga harga jual rumah menjadi relatif tinggi dan sulit dijangkau oleh sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah yang layak, sehat, aman dan nyaman beserta sarana pendukungnya. Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani. Permukiman kumuh terus meningkat, pada tahun 2014 Berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor :1197.A/51/ Bappeda/2014 luas wilayah kumuh 230,6 Ha meningkat pada tahun 2020 berdasarkan keputusan Bupati Nomor 649.A/42/04-Bappeda/2020 Luas wilayah kumuh 420,66 Ha. permukiman kumuh yang terus meningkat belum selaras dengan pembangunan yang telah dilakukan, hal ini salah satunya dapat disebabkan oleh penanganan permukiman kumuh yang kurang komprehensif dan kolaboratif. Penanganan rumah rusak terdampak bencana belum optimal. Penanganan rumah tidak layak huni tahun 2022 sebesar 24,61 % dan meningkat menjadi 48,35 % pada tahun 2023. Penangananan rumah tidak layak hini dibanding tahun 2023 mengalami penurunan yaitu pada angka 27,37% menurun 30,98% dari angka tahun 2024.

1.3.1.6. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Belum terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak – hak perempuan dan anak. Hal ini terkait juga ketersediaan dan akurasi terkait data perlindungan perempuan dan anak, serta capaian Lombok Barat sebagai Kabupaten Layak Anak yang masih memerlukan proses panjang untuk pencapaiannya. Tahun 2024 Skor Kabupaten Layak Anak Kabupaten Lombok Barat mencapai skor 748 untuk metode perhitungan yang baru. Angka Tersebut masih terpaut cukup jauh untuk menjadikan Lombok Barat menjadi Kabupaten layak Anak dengan skor 1000. Pembangunan manusia berbasis gender dan masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan juga menjadi masalah di Kabupaten Lombok Barat

1.3.1.7. Urusan Lingkungan Hidup

Nilai indeks kualitas lingkungan hidup dari tahun 2023 ke 2024 menurun dari 66,31% menjadi 65,42%. Menurunnya nilai IKLH dari tahun 2023 ke 2024 disebabkan karena menurunnya Indeks kualitas air dikarenakan Kurangnya Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sehingga meningkatnya pembuangan sampah dan limbah rumah tangga ke sungai.. Lingkungan Hidup masih menghadapi beberapa masalah yaitu :

- a. Masih luasnya lahan kritis yang belum tertangani ;
- b. Berkurangnya sumber mata air;
- c. Terjadinya konversi lahan hutan, illegal logging dan perambahan hutan;
- d. Masih terjadinya penambangan illegal
- e. Pengelolaan sampah di Lombok Barat baru mencapai 61,43%, sementara sisanya adalah tidak terkelola.
- f. Telah terjadi penurunan debit air beberapa mata air yang ada di Kabupaten Lombok Barat, yang mengindikasikan telah terjadinya penurunan kualitas lingkungan.
- g. Meningkatnya kebutuhan galian non logam (pasir, batu, tanah urug) akibat pesatnya pembangunan di Lombok Barat dan sekitarnya yang akan berpotensi kerusakan dan kelestarian alam.
- h. Penggunaan Merkuri untuk penambangan emas berpotensi pencemaran air

1.3.1.8. **Urusan Perhubungan**

- a. Pelayanan moda transportasi umum masih terbatas;
- b. Rendahnya minat investasi dalam bidang infrastruktur transportasi
- c. Belum tersedianya dokumen perencanaan transportasi laut (Rencana Jaringan Pelayaran antar pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan) dan DLKr/DLKp di sejumlah pelabuhan pengumpan lokal
- d. Rendahnya minat investasi dalam bidang angkutan
- e. Persentase wilayah terhubung dengan moda transportasi baru mencapai 66,67%
- f. Persentase jalur trayek aktif menuju pusat perekonomian (pasar) sebesar 100%. Kabupaten Lombok Barat memiliki 23 Pasar dengan capaian 100% tersebut, artinya dari 23 pasar yang ada di Lombok Barat, keseluruhan sudah dilewati oleh jaringan trayek pedesaan.
- g. Persentase jalur trayek menuju pusat pariwisata pada tahun 2024 mencapai 100%, artinya keseluruhan obyek wisata pada Kabupaten Lombok Barat yang berjumlah 84 lokasi obyek wisata telah dilalui oleh jaringan trayek pedesaan.

1.3.1.9. **Urusan Penanaman Modal**

- a. Rendahnya realisasi investasi PMA. Pada tahun 2024 realisasi investasi PMA sangat jauh dari target yang ditetapkan yaitu 17,00 juta USD atau hanya 21,65% dari target 169,26 juta USD. Nilai Investasi PMA tidak pernah mencapai target yang ditetapkan dikarenakan merupakan kewenangan Pusat sesuai Perka BKPM No. 5 Tahun 2021.
- b. Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 2024 mencapai Rp. 1.135.458.626.178 atau 144,66 dari target 784.928.179.106.
- c. Masih rendahnya iklim investasi

1.3.1.10. **Urusan Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar yang sedang dihadapi oleh Bangsa Indonesia termasuk Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Barat selama 5 (lima) tahun terakhir (periode 2019-2023) mengalami penurunan. Untuk data tahun terakhir yakni pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Barat sebesar 14,28% atau sejumlah 100,25 ribu jiwa. Tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan semakin berkurang. Indeks keparahan kemiskinan dapat ditekan sebanyak 1,57 poin, sehingga pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin berada pada persentase 13,63% atau setara dengan 102,71 ribu jiwa. Angka kemiskinan menurun pada Tahun 2024 yaitu dari 102,71 ribu jiwa menjadi 96,57 ribu jiwa

TABEL 1.7
JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019-2024

<i>Tahun</i>	<i>Jumlah Penduduk (Ribu)</i>	<i>Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)</i>	<i>Penduduk Miskin (%)</i>
2019	695,0	103,77	15,20
2020	721,5	105,04	15,17
2021	731,8	100,25	14,28
2022	744,3	99,00	13,39
2023	753,6	102,71	13,63
2024	762,757	96,57	12,65

Penurunan Gini Ratio atau tingkat ketimpangan pendapatan yang terendah di Provinsi NTB merupakan prestasi tersendiri bagi Kabupaten Lombok Barat dimana rata-rata angka kemiskinan disemua kabupaten meningkat namun tingkat pendapatan antara penduduk kaya dan miskin dapat ditekan sehingga tidak terjadi kesenjangan pendapatan yang terlalu tinggi.

1.3.1.11. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Masih rendahnya jumlah desa mandiri Rendahnya persentase APBDes yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga masih terbatas Urusan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk
- Kesadaran penduduk untuk mengikuti program KB masih rendah
- Distribusi penduduk tidak merata

1.4. ISU STRATEGIS

- Aspek Kesejahteraan Rakyat Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok Barat, sejumlah isu yang ditetapkan masuk aspek kesejahteraan rakyat sebagai berikut :
 - Nilai PDRB Per kapita belum optimal
 - Angka kemiskinan masih di atas rata-rata nasional
 - IPM
 - Angka Rata – Rata Lama Sekolah
 - Angka Usia Harapan Hidup
 - Persentase Balita Gizi Buruk
 - Tingkat Pengangguran Terbuka
 - Indeks Kepuasan Masyarakat
 - Persentase PAD terhadap Pendapatan masih rendah
 - Opini BPK
 - Skor PPH
 - Kontribusi setiap sektor pembentuk PDRB belum optimal
 - Pertumbuhan Industri kecil masih rendah
- Aspek Pelayanan Umum Dalam rangka berupaya memperbaiki pelayanan umum sebagai tugas utama penyelenggaraan pemerintahan, dapat diuraikan beberapa isu dibawah ini
 - Angka partisipasi murni masih dibawah 100%
 - Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah menurun akibat terjadinya bencana
 - Masih adanya kasus kematian bayi

- d. Masih adanya kasus kematian ibu
- e. Masih terdapatnya prevalensi kurang gizi
- f. Tingginya kasus stunting
- g. Belum tercapainya Imunisasi Dasar Lengkap
- h. Masih tingginya kasus TBC
- i. Persentase jalan mantap masih terbatas
- j. Akses terhadap sanitasi layak belum mencapai 100%
- k. Akses terhadap air minum layak belum mencapai 100%
- l. Masih terbatasnya ruang terbuka hijau
- m. Rumah layak huni belum mencapai 100%
- n. Indeks Risiko Bencana masih rendah
- o. Cakupan mitigasi penanggulangan dan pemulihan
- p. sarana dan prasarana terdampak bencana belum optimal
- q. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten masih rendah
- r. Penegakkan perda belum optimal
- s. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial belum optimal
- t. Tingkat partisipasi angkatan kerja masih rendah
- u. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih rendah
- v. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi
- w. Luas lahan bersertifikat masih rendah
- x. Kualitas air sungai masih rendah
- y. Mata air mulai berkurang
- z. Pengelolaan sampah belum optimal
- aa. Kepemilikan dokumen kependudukan belum optimal
- bb. Jumlah LPM aktif rendah
- cc. Total Fertility Rate tinggi
- dd. Pelayanan moda transportasi belum lancar

Secara umum, isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Lombok Barat ke depan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Isu Tata Kelola Pemerintahan. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan baik dan bersih, serta masih rendahnya kualitas pelayanan publik.
- b. Isu Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur belum merata.
- c. Isu Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat. Masih rendahnya peranan perekonomian sektor unggulan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Isu Pembangunan Manusia. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia
- e. Isu Kualitas Lingkungan Hidup dan Daerah Rawan Bencana. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup dan masih tingginya resiko bencana daerah.

1.5. TINDAK LANJUT PEMDA ATAS REKOMENDASI LHE KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

- a. Dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2025 - 2029, Bappeda bersama seluruh Perangkat Daerah telah mulai melakukan pemetaan masalah dan perumusan pohon kinerja. Dalam upaya memastikan perumusan kinerja dari level Bupati sampai dengan Perangkat Daerah berorientasi hasil, memiliki indikator kinerja yang berkualitas dan memenuhi prinsip SMART kami telah melakukan orientasi Penyusunan RPJMD Lombok Barat 2025-2029 dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Barat dan penyesuaian dengan RPJMN. Orientasi dilaksanakan selama 5 (lima) hari

dengan melibatkan unsur Bappeda, BPKAD, Bapenda, Inspektorat dan Sekretariat Daerah sebagai Tim penyusun. Kegiatan ini menghasilkan rancangan awal pohon kinerja tingkat daerah. Kegiatan dilanjutkan dengan asistensi secara berkala terhadap seluruh Perangkat Daerah dalam membahas pohon kinerja hingga level program. Asistensi dilakukan selama 5 (hari) dengan menghadirkan OPD dengan tim lengkap secara terjadwal di Bappeda. dan Tim asistensi terdiri dari Tim inti yang telah mengikuti orientasi sebelumnya untuk mendapat penajaman dan hasil diskusi yang lebih optimal. Hasil dari kegiatan ini menghasilkan pohon kinerja daerah sampai level kepala OPD. Kegiatan akan dilanjutkan dengan pembahasan pokok OPD sampai level teknis/pelaksana pada jadwal berikutnya. (Perencanaan Kinerja)

- b. Dengan disusunnya RPJMD periode baru (2025-2029), mekanisme penyusunan pohon kinerja dibarengi dengan pengumpulan data-data dasar indikator kinerja terpilih. Dengan mekanisme pembahasan bersama Tim dan OPD ditetapkan target yang relevan dengan indikator dan sesuai kondisi existing. Pembahasan dan penajaman terhadap pokok, indikator, data dasar dan penentuan target terus dilakukan sesuai tahapan penyusunan RPJMD-Renstra, dan akan berproses terus hingga waktunya penetapan dokumen tersebut. (Perencanaan Kinerja)
- c. Mekanisme pembahasan dan penyusunan pokok yang saat ini sedang berlangsung sudah memperhatikan isu strategis, hubungan sebab akibat, critical success factor yang berpotensi mendukung kinerjanya, dan kaidah-kaidah yang tertuang dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi nomor 89 tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja. Hasil penyusunan pohon kinerja tersebut ini tentunya akan menjadi ranwal RPJMD dan Renstra PD 2025 - 2029 dan akan terus dilakukan pembahasan, penajaman dan perbaikan sampai dengan penetapan dokumen tersebut. (Perencanaan Kinerja)
- d. Mekanisme pembahasan dan penyusunan pokok yang sedang kami lakukan sudah termasuk mengidentifikasi *crosscutting* kinerja yang mendukung kinerja dan penyelesaian isu strategis di Kabupaten Lombok Barat. Sehingga dapat tergambar Bagaimana hubungan kinerja antar lintas PD maupun dengan stakeholder sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. (Perencanaan Kinerja)
- e. Pada Tahun 2024, Bagian Organisasi telah menjadwalkan pendampingan ke masing-masing perangkat daerah untuk pengisian SAKIP Lombok Barat per triwulan dan telah dijalankan bersama Tim selama 10 hari kerja. Selanjutnya, tim akan memverifikasi upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target, termasuk dengan faktor keberhasilan dan faktor kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan. (Pengukuran Kinerja)
- f. Dalam evaluasi renja dan RKPD yang dilakukan pada setiap triwulan hal ini terus dilakukan. Kami terus berupaya memperbaiki kualitas monitoring dan evaluasi. (Pengukuran Kinerja)
- g. Bappeda berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam bagi pakai data capaian indikator kinerja daerah (IKU dan IKK). Dengan harapan data kinerja dapat menjadi dasar dalam melakukan review RHK individu. Dalam Evaluasi Renja hal ini juga menjadi perhatian. Bappeda melakukan verifikasi laporan evaluasi renja termasuk mengklarifikasi capaian kinerja sampai dengan level sub kegiatan/pelaksana dan melihat korelasi/dukungannya terhadap capaian kinerja perangkat daerahnya. (Pengukuran Kinerja)

- h. Hasil evaluasi kinerja dijadikan dasar dalam perencanaan. Dituangkan dalam BAB 2 dokumen perencanaan dan diharapkan dimanfaatkan optimal oleh seluruh perangkat daerah dalam penentuan langkah perbaikan selanjutnya. Dalam laporan evaluasi renja, bappeda juga membeirkan saran masukan untuk perbaikan perencanaan berikutnya. PEmberian REward dan Punishment belum diatur. (Pengukuran Kinerja)
- i. Bagian Organisasi telah memverifikasi laporan kinerja masing-masing perangkat daerah sesuai dengan sistematika dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Asistensi yang dilakukan secara intens menghasilkan laporan kinerja yang sistematis dan sesuai kaidah penulisan. Selain itu, dalam asistensi tersebut lebih menekankan pada upaya yang telah dilakukan perangkat daerah sebagai Tindaklanjut temuan tahun sebelumnya, dan faktor keberhasilan/kegagalan dalam mencapai target yang telah ditentukan. (Pelaporan)
- j. Hasil evaluasi renja, hasil evaluasi RKPD dan laporan penyelenggaraan pemeirntah daerah maupun perangkat daerah menjadi dasar dalam menetapkan strategi perencanaan kinerja. Kami memanfaatkan capaian kinerja tersebut sebagai dasar perencanaan, sekaligus akan diutangkan dalam BAB 2 dokumen perencanaan baik di daerah maupun perangkat daerah. (Pelaporan)
- k. Akan meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan memberikan temuan dan rekomendasi yang bersifat spesifik dan tidak hanya pada menemukan dokumen saja, namun juga pada aspek kualitas dan pemanfaatan setiap komponen SAKIP, sehingga setiap perangkat daerah mampu melaksanakan rekomendasi yang disampaikan dengan baik dan mampu memberikan perbaikan yang signifikan. (Evaluasi internal)
- l. Akan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan evaluasi SAKIP, dengan mengusulkan beberapa orang APIP untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan evaluasi SAKIP yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada bulan Mei 2025 di Jakarta. (Evaluasi internal)



PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Bab 2 berisi:

1. RPJMD Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
2. Indikator Kinerja Utama
3. Perjanjian Kinerja

Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan yang bersifat strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program Bupati, RPJMD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka

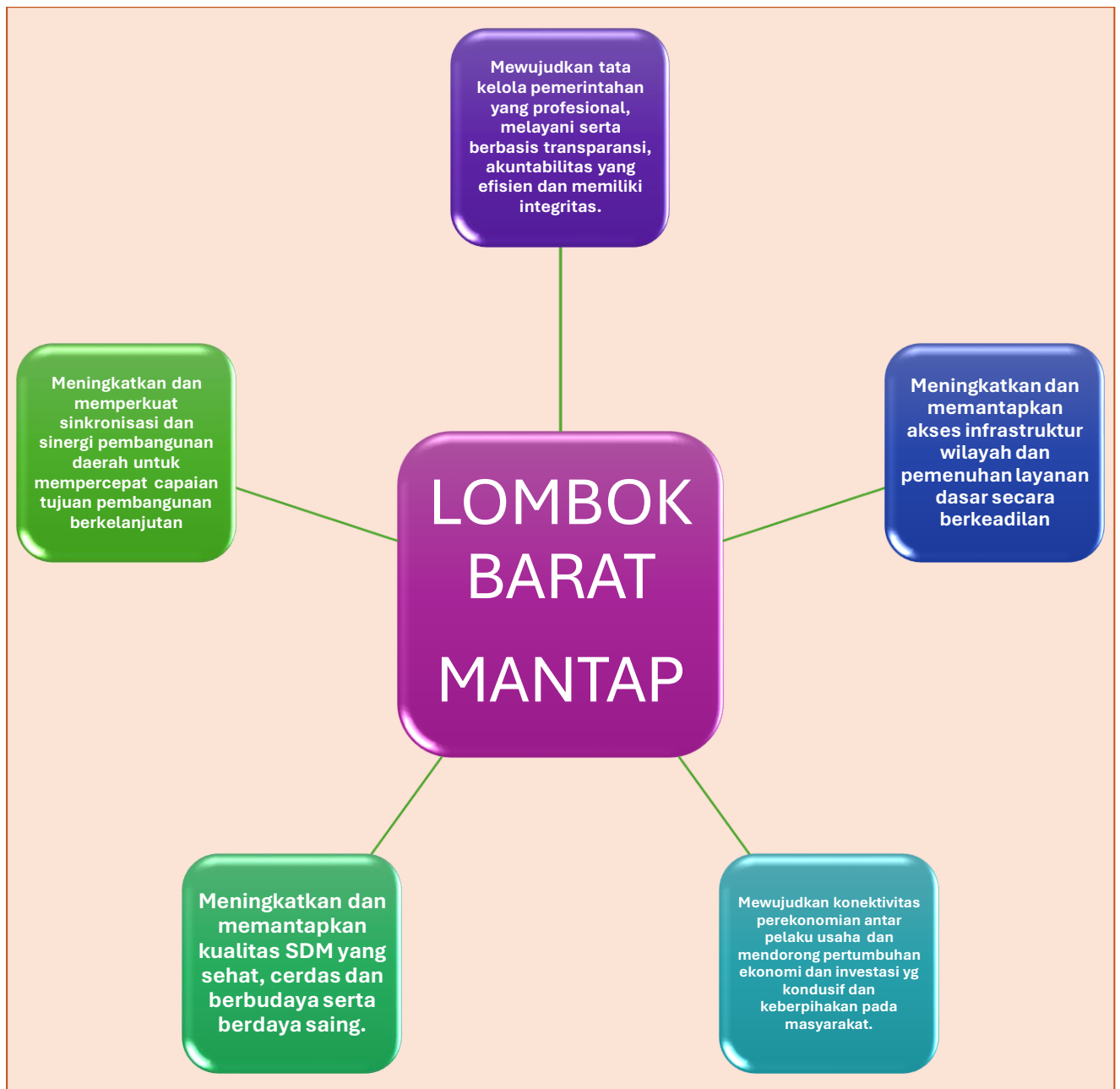
Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan baik RPJP maupun RPJM Nasional. Untuk periode Tahun 2019-2024, RPJMD Kabupaten Lombok Barat disahkan melalui Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024, dan sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah, RPJMD menjadi pijakan bagi perencanaan strategis Organisasi Perangkat daerah di Kabupaten Lombok Barat hingga ke level perencanaan tahunan.

Pada Tahun 2021, RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2020-2024 mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan yang sangat dinamis disertai wabah Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perlu dilakukannya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi, permasalahan dan isu strategis, strategi dan arah kebijakan, prioritas pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengharuskan dilakukannya penyesuaian terhadap RPJMD Kabupaten Lombok Barat. Sehingga beberapa target dari Indikator Kinerja Utama Daerah mengalami perubahan akan tetapi tidak merubah visi dan misi daerah.

Pembangunan Daerah Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024, dengan Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 adalah TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA, DAN BERPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU.

Dalam rangka pencapaian visi diatas dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut.

GAMBAR 2.1
RPJMD KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019-2024



TABEL 2.1.
KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI
KABUPATEN LOMBOK BARAT

<i>VISI</i>					
<i>TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BERPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU</i>					
<i>MISI I</i>					
<i>MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, MELAYANI SERTA BERBASIS TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS YANG EFISIEN DAN MEMILIKI INTEGRITAS</i>					
<i>TUJUAN</i>	<i>SASARAN STRATEGIS</i>	<i>STRATEGI</i>	<i>ARAH KEBIJAKAN</i>		
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	1.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.1.1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi	1.1.1.1	Meningkatkan kualitas pelayanan serta sarana dan prasarana publik	
			1.1.1.2	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat melalui Sosialisasi dan edukasi	
			1.1.1.3	Meningkatkan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik	
			1.1.1.4	Meningkatkan akurasi dan penyediaan data sektoral	
			1.1.1.5	Meningkatkan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	
			1.1.1.6	Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan literasi masyarakat	
			1.1.1.7	Meningkatkan pengelolaan arsip secara baku	
			1.1.1.8	Peningkatan Kerjasama Kemitraan Melalui Aliansi Strategis Multi Pihak	
			1.1.1.9	Peningkatan Kapasitas Lembaga Legislatif dan Intensitas Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD	
			1.1.1.10	Meningkatkan kapasitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan	
			1.1.1.11	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan administrasi terpadu	
			1.1.1.12	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara	
			1.1.1.13	Meningkatkan fungsi partai politik dalam pendidikan politik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik	
			1.1.1.14	Meningkatkan peran dan koordinasi seluruh stakeholder (Toga, Toma, Aparat Penegak Hukum) dalam penyelesaian konflik	
	1.2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.1.2.1	Meningkatkan Pengelolaan dan Pelaporan keuangan serta Aset Daerah	
			1.1.2.2	Menerapkan penggunaan Sistem Informasi terintegrasi	

1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1.1.3.1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
		1.1.3.2	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Daerah serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
		1.1.3.3	Meningkatkan pengembangan inovasi daerah
		1.1.3.4	Peningkatan Pengawasan internal untuk mendukung tata kelola dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
		1.1.3.5	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

MISI II
MENINGKATKAN DAN MEMANTAPKAN AKSES INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR SECARA BERKEADILAN

<i>TUJUAN</i>	<i>SASARAN STRATEGIS</i>	<i>STRATEGI</i>	<i>ARAH KEBIJAKAN</i>
2 Meningkatkan Konektivitas antar wilayah dan akses infrastruktur dasar	2.1 Meningkatkan kualitas infrastruktur dalam pengembangan wilayah	2.2.1. Meningkatkan Konektivitas antar wilayah dan akses infrastruktur dasar melalui penyediaan sarana dan prasarana jalan, moda transportasi, rumah layakhuni, air minum layak dan sanitasi layak	2.1.1.1 Meningkatkan jalan mantap
			2.1.1.2 Meningkatkan penataan bangunan dan lingkungan
			2.1.1.3 Peningkatan Kapasitas Tenaga Terampil Konstruksi
			2.1.1.4 Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
			2.1.1.5 Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni
	2.2 Meningkatkan akses infrastruktur dasar		2.2.1.1 Meningkatkan ketersediaan rumah layak hun
			2.2.1.2 Meningkatkan akses rumah tangga dengan sanitasi layak
			2.2.1.3 Meningkatkan akses rumah tangga dengan air minum layak

MISI III
MEWUJUDKAN KONEKTIVITAS PEREKONOMIAN ANTARA PELAKU USAHA DAN MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INVESTASI YANG KONDUSIF DAN KEBERPIHAKAN PADA MASYARAKAT

<i>TUJUAN</i>	<i>SASARAN STRATEGIS</i>	<i>STRATEGI</i>	<i>ARAH KEBIJAKAN</i>
3 Terwujudnya Pemulihan Ekonomi Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomiyang Berkualitas dan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	3.1 Meningkatkan daya saing sektor ekonomi unggulan	3.1.1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui kemitraan usaha dan iklim investasi yang kondusif	3.1.1.1 Mengoptimalkan potensi sumber PAD akibat covid-19
			3.1.1.2 Meningkatkan Jaringan Irigasi Permukaan
			3.1.1.3 Meningkatkan kemitraan antar pelaku usaha, pemberdayaan masyarakat dan menciptakan Wirausaha baru, serta menyediakan sarana prasarana perekonomian kreatif (covid-19)

						3.1.1.4	Meningkatkan produksi perikanan melalui diversifikasi usaha perikanan kelautan (covid-19)		
						3.1.1.5	Meningkatkan produksi pertanian, peternakan, perikanan dan kunjungan wisatawan (covid-19)		
						3.1.1.6	Keberpihakan terhadap pengembangan dan penggunaan produk local (covid-19)		
						3.1.1.7	Mendorong pengembangan industri olahan, industri kreatif dan industri permesinan (covid-19)		
						3.1.1.8	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Destinasi Wisata, promosi dan pemasaran pariwisata serta mendorong pertumbuhan desa wisata (covid-19)		
						3.1.1.9	Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan penyederhanaan proses perijinan serta penggunaan IT dalam pelaksanaan proses perijinan (covid-19)		
						3.2	Meningkatnya kemandirian ekonomi masyarakat	3.2.1.1	Meningkatkan sinergitas program penanggulangan kemiskinan (covid-19)
						3.2.1.2	Meningkatkan keberagaman pola konsumsi masyarakat serta meningkatkan kewaspadaan pangan (covid-19)		
						3.2.1.3	Meningkatkan jangkauan pelayanan dengan peningkatan sarana prasarana pendukung		
						3.2.1.4	Meningkatkan kapasitas dan pemanfaatan potensi desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat		
						3.2.1.5	Meningkatkan pelatihan produktivitas dan pengembangan penempatan tenaga kerja (covid-19)		
						3.2.1.6	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya transmigrasi swakarsa (covid-19)		
4	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	4.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4.1.1.	Meningkatkan Usia Harapan Hidup	4.1.1.1.	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar, sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan serta Meningkatkan pemenuhan serta kapasitas sumber daya manusia Kesehatan (covid-19)		
						4.1.1.2.	Meningkatkan promosi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang hidup bersih dan sehat (covid-19)		
		4.2	Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan	4.2.1	Meningkatkan Rata - Rata Lama Sekolah	4.2.1.1.	Meningkatkan kualitas pendidikan Meningkatkan akses pendidikan yang berkeadilan dan terjangkau		

4.3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	4.3.1.	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender	4.2.1.2.	Meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan
				4.2.1.3.	Menjaga kelestarian Cagar Budaya
				4.3.1.1.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap perempuan rentan termarginalkan
				4.3.1.2.	Meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak
				4.3.1.3.	Meningkatkan pengendalian kelahiran penduduk

MISI IV
MENINGKATKAN DAN MEMPERKUAT SINKRONISASI DAN SINERGI PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK
MEMPERCEPAT CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah	5.1.1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam melalui pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah serta pengendalian pemanfaatan tata ruang	5.1.1. Meningkatkan Pengendalian pemanfaatan ruang
			5.1.2. Meningkatkan pengelolaan sampah
			5.1.3. Meningkatkan perlindungan mata air, Menurunkan pencemaran air sungai
	5.2 Menurunnya Risiko Bencana	5.2.1. Meningkatkan Upaya Mitigasi Bencana	5.2.1.1. Peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan risiko bencana (covid19)

2.2. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat pada akhir periode masa jabatan. Mengacu pada visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran berikut Indikator Kinerja Utama yang hendak dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

2.2.1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024

TABEL 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK
BARAT TAHUN 2019-2024

<i>Tujuan/ Sasaran</i>	<i>Indikator</i>	<i>Penjelasan/ Rumus Perhitungan</i>	<i>Sumber data</i>	<i>Target tahun ke -</i>				
				<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Daerah	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Kementerian PAN dan RB	Nilai	BB (73,00)	BB (75,00)	A (81,00)	A (83,50)
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks hasil SKM terhadap pelayanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat melalui link ikm.lombokbaratkab.go.id	Indeks	86,26	87,52	88,77	90,03
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Opini BPK	BPK	Opini	WTP Opini	WTP Opini	WTP Opini	WTP Opini
4. Meningkatnya akses infrastruktur dasar	Persentase Rumah Layak Huni	Rumah Layak Huni/Jumlah seluruh rumah x 100%	Disperkim	Persen	97,80	97,92	98,09	98,15
	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Dan Sanitasi Layak	Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Layak/Jumlah penduduk x 100%	Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan	Persen	84,50	86,12	85,74	86,36
5. Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam pengembangan wilayah	Persentase Wilayah Terhubung dengan Pusat Perekonomian	(Pasar Dapat Dilalui Roda 4*Objek Wisata Dapat Dilalui Roda 4*Jalan Mantap*Pasar Memiliki Trayek*Objek Wisata Memiliki Trayek)^0,20	PUTR, Perindag, Dishub	Persen	82,20	86,00	90,00	94,00
6. Meningkatnya daya saing sektor ekonomi unggulan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Nilai Realisasi PAD/total Pendapatan Daerah x 100%	Bapenda dan BPKAD	Persen	14,85	15,16	15,45	15,73
	Nilai PDRB Perkapita (ADHK) Nilai PDRB Perkapita (ADHK)	PDRB Perkapita (ADHK)	BPS	Juta Rupiah	14,51	15,20	15,36	15,56
	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Nilai Realisasi PMA tahun yg dihitung	DPMPTSP	Juta US \$	127,46	139,91	153,88	169,27
	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam	Nilai Realisasi PMDN (Fasilitas) tahun yg Rp. Dihitung	DPMPTSP	Rp. Milyar	589,73	648,70	713,57	784,93

<i>Tujuan/ Sasaran</i>	<i>Indikator</i>	<i>Penjelasan/ Rumus Perhitungan</i>	<i>Sumber data</i>	<i>Target tahun ke -</i>				
				<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
	Negeri (PMDN)							
7. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat	Angka Kemiskinan	Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan/ jumlah penduduk x 100%	BPS	Persen	13,86	13,46	13,07	12,69
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Jumlah Pengangguran (orang)/Jumlah angkatan kerja (orang) x 100%	BPS	Persen	3,28	3,14	3,00	2,86
8. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Dihitung Berdasarkan Angka Kematian menurut umur (Age Specific Death Rate/ASDR) berdasarkan registrasi kematian	BPS	Tahun	67,20	67,56	67,68	67,92
9. Meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ dimana: RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas	BPS	Tahun	6,50	6,75	7,00	7,19
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ dimana: HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia ($a, a+1, \dots, n$) FK = Faktor koreksi pesantren	BPS	Tahun	13,75	14,00	14,25	14,50
10. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kabupaten Layak anak (KLA)	Penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	650,00	705,00	810,00	910,00
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPM Perempuan/IPM laki-laki x 100%		Indeks	90,00	90,30	91,00	91,50
11. Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Parameter Penghitungan adalah NO ₂ dan SO ₂	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks	87,91	88,01	88,12	88,22

<i>Tujuan/ Sasaran</i>	<i>Indikator</i>	<i>Penjelasan/ Rumus Perhitungan</i>	<i>Sumber data</i>	<i>Target tahun ke -</i>				
				<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Parameter Penghitungan adalah : pH; BOD; COD; TSS; DO; NO ₃ -N; Total Phosphat; Fecal Coliform	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks	42,30	42,40	42,50	42,60
	Indeks Kualitas Lahan	Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks	46,08	46,15	46,25	46,50
12. Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Penilaian BNPB	BPBD	Indeks	0,65	0,66	0,67	0,68

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapaikinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.

Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*). Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024, adalah sebagai berikut.

TABEL 2.3
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2024

<i>Sasaran Daerah</i>	<i>Indikator</i>	<i>Satuan</i>	<i>Target Tahun 2024 (Perubahan)</i>	
			<i>Indikator</i>	<i>Anggaran (Rp)</i>
1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90,03	196,053,886,329
2 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Opini BPK	Opini	WTP Opini	1,094,509,353,667
3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	3 Nilai AKIP Daerah	Nilai	A (83,50)	5,548,970,357
4 Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam pengembangan wilayah	4 Persentase Wilayah Terhubung dengan Pusat Perekonomian	Persen	94,00	29,544,927,065

<i>Sasaran Daerah</i>			<i>Indikator</i>	<i>Satuan</i>	<i>Target Tahun 2024 (Perubahan)</i>	
					<i>Indikator</i>	<i>Anggaran (Rp)</i>
5	Meningkatnya akses infrastruktur dasar	5	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	98,15	16,051,621,088
		6	Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum layak	Persen	86,36	28,039,647,740
6	Meningkatnya daya saing sektor ekonomi unggulan	7	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	15,73	264,782,209,394
		8	Nilai PDRB Perkapita (ADHK)	Juta Rupiah	15,56	8,353,542,400
		9	Nilai Realisasi Investasi			731,861,920
			Penanaman Modal Asing (PMA)	Juta US \$	169,27	
			Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN Fasilitas)	Rp. Milyar	784,93	
7	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	10	Angka Kemiskinan	Persen	12,69	26,461,227,569
		11	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,86	21,571,501,437
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	12	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	67,92	141,800,016,551
9	Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan	13	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,19	169,008,085,960
		14	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,50	2,406,370,445
10	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor	910,00	149,999,800
		16	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,50	10,201,898,714
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	17	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,22	12,036,028,566
		18	Indeks Kualitas Air Sungai	Indeks	42,60	
		19	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	46,50	

<i>Sasaran Daerah</i>		<i>Indikator</i>		<i>Satuan</i>		<i>Target Tahun 2024 (Perubahan)</i>	
						<i>Indikator</i>	<i>Anggaran (Rp)</i>
12	Menurunnya Risiko Bencana	20	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,68		5,439,261,342
TOTAL							2,032,690,410,344



AKUNTABILITAS KINERJA

Bab 3 berisi:

1. Pengukuran Kinerja
2. Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Lombok Barat melaksanakan kewajiban menyampaikan akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan tingkat pencapaian pada program/ kegiatan. Untuk mengetahui gambaran tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan dengan pengukuran kinerja.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Pengukuran kinerja Pemda maupun Perangkat Daerah dilakukan per triwulan selama satu tahun anggaran. Bentuk monitoring yang dilakukan oleh Pemkab adalah melalui aplikasi SAKIP Lombok Barat. Secara sistematis, pimpinan akan dapat memonitoring capaian atas kinerja secara berkala, memudahkan dalam mengambil Keputusan atas kondisi/permasalahan yang dihadapi jika capaian tidak sesuai target.

3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Berikut adalah pencapaian indikator kinerja sasaran Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024.

TABEL 3.1
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Misi/Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Ket.	
				Target	Realisasi	%		
Misi I: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, melayani serta berbasis transparansi, akuntabilitas yang efisien dan memiliki integritas								
Tujuan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	84.00	64,58*	76.88		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90.03	91.22	101.32	Tercapai
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100.00	Tercapai
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	3	Nilai AKIP Daerah	Nilai	A (83,50)	65,22 (B)	78.11	Tidak tercapai
Misi II : Meningkatkan dan memantapkan akses infrastruktur wilayah dan pemenuhan layanan dasar secara berkeadilan								
Tujuan	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah dan akses infrastruktur dasar	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur	Indeks	88.04	91.46	103.88		
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam pengembangan wilayah	4	Persentase Wilayah Terhubung dengan Pusat Perekonomian	%	94.00	94.07	100.07	Tercapai
5	Meningkatnya akses infrastruktur dasar	5	Persentase Rumah Layak Huni	%	98.15	98.80	100.66	Tercapai
		6	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	%	84.72	94.45	111.48	Tercapai
Misi III : Mewujudkan konektivitas perekonomian antar pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang kondusif dan keberpihakan pada masyarakat								

Misi/Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2024			Ket.
					Target	Realisasi	%	
Tujuan	Terwujudnya Pemulihan Ekonomi Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi		Persen	2 - 3	5.03	0.01	
6	Meningkatnya daya saing sektor ekonomi unggulan	7	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	15.73	19.03	120.97	Tercapai
		8	Nilai PDRB Perkapita	Juta Rupiah	15.56	15.10	97.04	Tidak tercapai
		9	Nilai Realisasi investasi				77.355	Tidak tercapai
			Penanaman Modal Asing (PMA)	Juta US \$	169.27	17.01	10.05	
			Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN Fasilitas)	Rp. Milyar	784.93	1135.46	144.66	
7	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	10	Angka Kemiskinan	%	12.69	12.65	100.32	Tercapai
		11	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2.86	2.75	103.85	Tercapai
Misi IV : Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya serta berdaya saing								
Tujuan	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Indeks	70.10	72.70	103.71	
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	12	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	67.92	72.64	106.95	Tercapai
9	Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan	13	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7.19	6.88	95.69	Tidak tercapai
		14	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14.50	13.99	96.48	Tidak tercapai
10	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor	910.00	748.00	82.20	Tidak tercapai
		16	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91.50	90.71	99.14	Tidak tercapai
Misi V : Meningkatkan dan memperkuat sinkronisasi dan sinergi pembangunan daerah untuk mempercepat capaian tujuan pembangunan								
Tujuan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Indeks	61.93	65.42	105.64	
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	17	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88.22	94.24	106.82	Tercapai

Misi/Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Ket.
				Target	Realisasi	%	
Tujuan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah	18 Indeks Kualitas Air Sungai	Indeks	42.60	43.42	101.92	Tercapai
		19 Indeks Kualitas Lahan	Indeks	46.50	49.88	107.27	Tercapai
		Indeks Risiko Bencana Daerah	Indeks	140.00	107.22	76.59	
12	Menurunnya Risiko Bencana	20 Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.68	0.78	114.71	Tercapai

Sumber: Bappeda Kabupaten Lombok Barat 2025



13 tercapai



7 tidak tercapai

RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019–2024 yakni sebanyak 20 indikator kinerja yang mendukung 12 sasaran strategis. Terdapat 13 indikator yang telah mencapai target, dan 7 indikator yang tidak tercapai. Adapun target yang tidak tercapai adalah:

1. Penanaman Modal Asing (PMA) 10.05 %
2. Nilai AKIP Daerah 78.11%
3. Kabupaten Layak Anak (KLA) 82.20%
4. Rata - Rata Lama Sekolah (RLS) 95.69%
5. Harapan Lama Sekolah (HLS) 96.48%
6. Nilai PDRB Perkapita 97.04%
7. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 99.14%

3.1.2 Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dan tahun 2024

Berikut adalah perbandingan pencapaian indikator sasaran Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 dan Tahun 2024.

TABEL 3.2
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		2023			2024			Ket.
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	IKM	88,77	89,12	100,39	90.03	91.22	101.32	Meningkat
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2	Opini BPK	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100.00	Meningkat

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	2023			2024			Ket.
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	3	Nilai AKIP Daerah	81,00 (A)	66,72 (B)	82,37	A (83,50)	65,22 (B)	78.11	Menurun
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam pengembangan wilayah	4	Persentase Wilayah Terhubung dengan Pusat Perekonomian	90,00	93,84	104,27	94.00	94.07	100.07	Menurun
5	Meningkatnya akses infrastruktur dasar	5	Persentase Rumah Layak Huni	98,09	98,56	100,48	98.15	98.80	100.66	Meningkat
		6	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	83,82	93,53	111,58	84.72	94.45	111.48	Menurun
6	Meningkatnya daya saing sektor ekonomi unggulan	7	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	15,45	19,14	123,88	15.73	19.03	120.97	Menurun
		8	Nilai PDRB Perkapita	15,36	14,87	96,81	15.56	15.10	97.04	Meningkat
		9	Nilai Realisasi Investasi			52,15			77.355	Meningkat
			Penanaman Modal Asing (PMA)	153,88	31,66	20,58	169.27	17.01	10.05	
			Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN Fasilitas)	713,57	597,49	83,73	784.93	1135.46	144.66	
7	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	10	Angka Kemiskinan	13,07	13,67	95,41	12.69	12.65	100.32	Meningkat
		11	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,00	3,12	96,00	2.86	2.75	103.85	Meningkat
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	12	Usia Harapan Hidup (UHH)	67,68	71,94	106,29	67.92	72.64	106.95	Meningkat
9	Meningkat-nya Kualitas dan Mutu Pendidikan	13	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	7,00	6,87	98,14	7.19	6.88	95.69	Menurun
		14	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,25	13,98	98,11	14.50	13.99	96.48	Menurun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023			2024			Ket.
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
10 Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15 Kabupaten Layak Anak (KLA)	810,00	711,00	87,78	910,00	748,00	82,20	Menurun
	16 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,00	90,41	99,35	91,50	90,71	99,14	Menurun
11 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	17 Indeks Kualitas Udara	88,12	91,69	104,05	88,22	94,24	106,82	Meningkat
	18 Indeks Kualitas Air Sungai	42,50	48,95	115,18	42,60	43,42	101,92	Menurun
	19 Indeks Kualitas Lahan	46,25	49,17	106,31	46,50	49,88	107,27	Meningkat
12 Menurunnya Risiko Bencana	20 Indeks Ketahanan Daerah	0,67	0,81	120,90	0,68	0,78	114,71	Menurun

Sumber: Bappeda Kabupaten Lombok Barat 2025



Berdasarkan tabel di atas, capaian 10 indikator kinerja mengalami peningkatan dan 10 indikator mengalami penurunan. Meskipun terdapat tren penurunan, 6 dari 10 indikator mengalami kenaikan realisasi kinerja dari tahun sebelumnya. Adapun indikator kinerja yang persentasenya menurun akan tetapi realisasi kinerjanya meningkat adalah:

1. Persentase Wilayah Terhubung dengan Pusat Perekonomian 93,84 ➔ 94,07
2. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak, 93,53 ➔ 94,45
3. Rata - Rata Lama Sekolah (RLS), 6,87 ➔ 6,88
4. Harapan Lama Sekolah (HLS), 13,98 ➔ 13,99
5. Kabupaten Layak Anak (KLA), 711,00 ➔ 748,00
6. Indeks Pembangunan Gender (IPG), 90,41 ➔ 90,71

3.1. Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan standar Nasional

TABEL 3.3
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023
DENGAN STANDAR NASIONAL

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Target Nasional	Capaian 2024 terhadap target Nasional (%)	Ket.	
		Target	Realisasi	%				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90.03	91.22	101.32	72	79.97	RPJMN RI
2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100.00	WTP		
3	Nilai AKIP Daerah	Nilai	83,50 (A)	65,22 (B)	78.11	70.75	92.18	SAKIP Pemprov
4	Persentase Wilayah Terhubung dengan Pusat Perekonomian	%	94.00	94.07	100.07	Belum Tersedia	-	
5	Persentase Rumah Layak Huni	%	98.15	98.80	100.66	91	108.6	Data LKJPP Tahun 2023
6	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	%	84.72	94.45	111.48	100	94.45	RPJMN 2020-2024
7	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	15.73	19.03	120.97	Belum Tersedia	-	
8	Nilai PDRB Perkapita	Juta Rupiah	15.56	15.10	97.04	78.62	19.20	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
9	Nilai Realisasi Investasi				77.355	Rp1.099,8 Triliun		Laporan Kinerja BKPM 2023
	Penanaman Modal Asing (PMA)	Juta US \$	169.27	17.01	10.05	Rp1.099,8 Triliun		Laporan Kinerja BKPM 2023
	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN Fasilitas)	Rp. Milyar	784.93	1135.46	144.66	51,9%		Laporan Kinerja BKPM 2023
10	Angka Kemiskinan	%	12.69	12.65	100.32	0	-	Kementrian Keuangan RI
11	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2.86	2.75	103.85	4.91	65.63	Badan Pusat Statistik
12	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	67.92	72.64	106.95	72.39	100.34	Data BPS

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Target Nasional	Capaian 2024 terhadap target Nasional (%)	Ket.
		Target	Realisasi	%			
13 Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7.19	6.88	95.69	15	45.86	Data BPS
14 Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14.50	13.99	96.48	13.21	105.90	Data Kemendikbud ristek
15 Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor	910.00	748.00	82.20	390	191.79	Data DPPKBPPPA Prov. NTB
16 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91.50	90.71	99.14	91.28	99.37	Kementrian PPPA
17 Indeks Kualitas Udara	Indeks	88.22	94.24	106.82	85.97	109.61	LAKIP DPRKPPLH TAHUN 2024
18 Indeks Kualitas Air Sungai	Indeks	42.60	43.42	101.92	69.75	62.25	RPJMN 2020-2024
19 Indeks Kualitas Lahan	Indeks	46.50	49.88	107.27	Belum Tersedia	-	
20 Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.68	0.78	114.71	Belum Tersedia	-	

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1 Faktor Keberhasilan Dan Faktor Kegagalan Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024

1. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

➤ INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT



Berdasarkan data responden pada ikm.lombokbaratkab.go.id jumlah responden yang melaksanakan survei pada periode Januari sampai dengan Desember tahun 2024 sebanyak 34.344 orang, dari hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat diperoleh hasil NRR Tertimbang 3,65 (sangat Baik) atau konversi nilai menjadi 91,22 atau memenuhi target Kabupaten Lombok Barat sebesar 90,03. Dengan demikian tingkat kualitas pelayanan Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan sebesar 2,1 poin dibandingkan indeks kepuasan masyarakat tahun 2023 sebesar 89,12.

Hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.4
HASIL SURVEI KEPUASAAN MASYARAKAT PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2024

<i>No</i>	<i>Unsur Layanan</i>	<i>Total Nilai Per Unsur</i>	<i>NRR Per Unsur</i>	<i>Kategori</i>	<i>NRR Tertimbang Per Unsur</i>
1	Persyaratan	128516	3,68	Sangat Baik	0,41
2	Prosedur	127197	3,64	Sangat Baik	0,40
3	Waktu pelayanan	125152	3,58	Sangat Baik	0,40
4	Biaya / Tarif*)	130657	3,74	Sangat Baik	0,42
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	126880	3,63	Sangat Baik	0,40
6	Kompetensi Pelaksana	126832	3,63	Sangat Baik	0,40
7	Perilaku Pelaksana	126155	3,61	Sangat Baik	0,40
8	Sarana dan prasarana	125776	3,60	Sangat Baik	0,40
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	130311	3,73	Sangat Baik	0,41

Sumber: Laporan SKM Lombok Barat 2024

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dihasilkan masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Kabupaten Lombok Barat periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2024 :

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan inter persepsi IKM adalah kriteria Sangat Baik dengan nilai 3,68.
2. Kemudahan prosedur pelayanan inter persepsi IKM adalah 3,64 masuk kriteria Sangat Baik.
3. Kecepatan waktu dalam pemberian pelayanan Inter persepsi IKM adalah 3,58 masuk kriteria Sangat Baik.
4. Biaya/tarif dalam pelayanan Inter persepsi IKM adalah 3,74 masuk kriteria Sangat Baik.
5. Kesesuaian produk layanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan Inter persepsi IKM adalah 3,63 masuk kriteria Sangat Baik.
6. Kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan Inter persepsi IKM adalah 3,63 masuk kriteria Sangat Baik.
7. Prilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dankeramahan Inter persepsi IKM adalah 3,61 masuk kriteria Sangat Baik.

8. Kualitas sarana dan prasarana Inter persepsi IKM adalah 3,60 masuk kriteria Sangat Baik.
9. Penanganan pengaduan pengguna layanan Inter persepsi IKM adalah 3,73 masuk kriteria Sangat Baik.

Selanjutnya Hasil Rekap IKM, dan nilai IKM per Jenis pelayanan pada 65 Perangkat Daerah/ UPT/ Unit Kerja yang terdapat pada aplikasi ikm.lombokbaratkab.go.id dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.5
REKAP IKM PERANGKAT DAERAH/ UPT/UNIT KERJA
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2024

<i>No</i>	<i>Nama Perangkat Daerah (PD)</i>	<i>Target IKM PD</i>	<i>Nilai IKM PD</i>	<i>Total Responden PD</i>
1	Sekretariat Daerah (52.01.4.01.1)	90,23	93,98	1458
2	Bappeda (52.01.5.05.1)	97,25	91,62	1301
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (52.01.1.01.1)	90,50	91,01	17
4	Dinas Kesehatan (52.01.1.02.1)	90,03	88,45	435
5	RSUD Patut Patuh Patju (52.01.1.02.1)	90,03	91,57	2175
6	DPUTR (52.01.1.03.1)	90,03	89,97	159
7	Disperkim (52.01.1.04.1)	90,1	92,93	291
8	Bakesbangpol (52.01.8.01.1)	95	89,27	355
9	Satuan Polisi Pamong Praja (52.01.1.05.1)	90,03	84,72	22
10	BPBD (52.01.1.05.2)	94	97,74	303
11	Dinas Pemadam Kebakaran (52.01.1.05.3)	90,05	91,91	349
12	Dinas Sosial (52.01.1.06.1)	90,5	94,71	146
13	Dinas Tenaga Kerja (52.01.2.07.1)	90,03	89,47	19
14	Dinas Ketahanan Pangan (52.01.2.09.1)	90,03	93,06	30
15	Dinas Lingkungan Hidup (52.01.2.11.1)	90,03	84,37	8
16	Disdukcapil (52.01.2.12.1)	90,03	96,08	2708
17	DPMD (52.01.2.09.1)	90,1	88,33	89
18	DP2KBP3A (52.01.2.08.1)	90,03	90,98	114
19	Dinas Perhubungan (52.01.2.15.1)	90,03	94,29	71
20	Diskominfo (52.01.2.16.1)	90,64	96,37	553
21	Diskop UKM (52.01.2.17.1)	90,03	89,36	100
22	DPMPSTP (52.01.2.18.1)	90,03	88,1	2421
23	Dinas Pemuda Dan Olah Raga (52.01.2.19.1)	90,03	89,81	27
24	Disarpus (52.01.2.23.1)	90,03	90,36	481
25	Dinas Kelautan Dan Perikanan (52.01.3.25)	90,03	90,09	44
26	Dinas Pariwisata (52.01.3.26)	95	87,9	42
27	Dinas Pertanian (52.01.3.27)	90,03	86,04	40
28	Disperindag (52.01.3.30)	90,03	82,76	666
29	Sekretariat DPRD (52.01.4.02.1)	90,03	82,89	139
30	Kecamatan Sekotong (52.01.7.01.01)	90,03	83,26	155
31	Kecamatan Lembar (52.01.7.01.02)	90,03	94,24	94
32	Kecamatan Gerung (52.01.7.01.03)	90,03	84,23	62
33	Kecamatan Labuapi (52.01.7.01.04)	90,03	91,49	63
34	Kecamatan Kediri (52.01.7.01.05)	90,03	90,41	426
35	Kecamatan Kuripan (52.01.7.01.06)	91,13	95,83	4
36	Kecamatan Narmada (52.01.7.01.07)	90,2	87,24	54
37	Kecamatan Lingsar (52.01.7.01.08)	90,03	90,11	68
38	Kecamatan Gunungsari (52.01.7.01.09)	90,03	90,53	103

<i>No</i>	<i>Nama Perangkat Daerah (PD)</i>	<i>Target IKM PD</i>	<i>Nilai IKM PD</i>	<i>Total Responden PD</i>
39	Kecamatan Batulayar (52.01.7.01.10)	90,05	90,41	281
40	Inspektorat Kabupaten (52.01.6.01.1)	90,03	89,84	79
41	Badan Pendapatan Daerah (52.01.5.02.1)	91,81	86,23	48
42	BPKAD (52.01.5.02.2)	90,03	90,23	114
43	BKDPSDM (52.01.5.03.1)	90,03	93,06	429
44	Puskesmas Banyumulek (52.01.1.02.1)	90,03	99,18	378
45	Puskesmas Dasan Tapan (52.01.1.02.1)	90,03	91,05	539
46	Puskesmas Eyat Mayang (52.01.1.02.1)	90,03	90,55	457
47	Puskesmas Gerung (52.01.1.02.1)	90,03	95,67	740
48	Puskesmas Gunungsari (52.01.1.02.1)	90,03	95,48	2032
49	Puskesmas Jembatan Kembar (52.01.1.02.1)	90,03	79,77	64
50	Puskesmas Kediri (52.01.1.02.1)	90,03	89,59	765
51	Puskesmas Kuripan (52.01.1.02.1)	90,03	98,83	486
52	Puskesmas Labuapi (52.01.1.02.1)	90,03	92,87	458
53	Puskesmas Lingsar (52.01.1.02.1)	90,03	93,39	375
54	Puskesmas Meninting (52.01.1.02.1)	90,03	94,27	760
55	Puskesmas Narmada (52.01.1.02.1)	90,03	90,66	691
56	Puskesmas Pelangan (52.01.1.02.1)	90,03	87,09	185
57	Puskesmas Penimbung (52.01.1.02.1)	90,03	83,78	2341
58	Puskesmas Perampuan (52.01.1.02.1)	90,03	90,24	873
59	Puskesmas Sedau (52.01.1.02.1)	90,03	93,32	674
60	Puskesmas Sekotong (52.01.1.02.1)	90,03	89,87	179
61	Puskesmas Sesela (52.01.1.02.1)	90,03	95,46	2330
62	Puskesmas Sigerongan (52.01.1.02.1)	90,03	87,29	789
63	Puskesmas Suranadi (52.01.1.02.1)	90,03	93	69
64	RSUD Awet Muda Narmada (52.01.1.02.1)	90,03	85,5	2161
65	UPT. Laboratorium Kesehatan Kabupaten Lombok Barat (52.01.1.02.1)	90,03	94,64	455

Sumber: Laporan SKM Lombok Barat 2024

Berdasarkan hasil pengukuran data, dapat diketahui bahwa 5 (lima) perangkat daerah yang tertinggi dan 5 (lima) perangkat daerah yang terendah pada Survey IKM Kabupaten Lombok Barat yaitu :

GRAFIK 3.1 IKM PERANGKAT DAERAH TERTINGGI



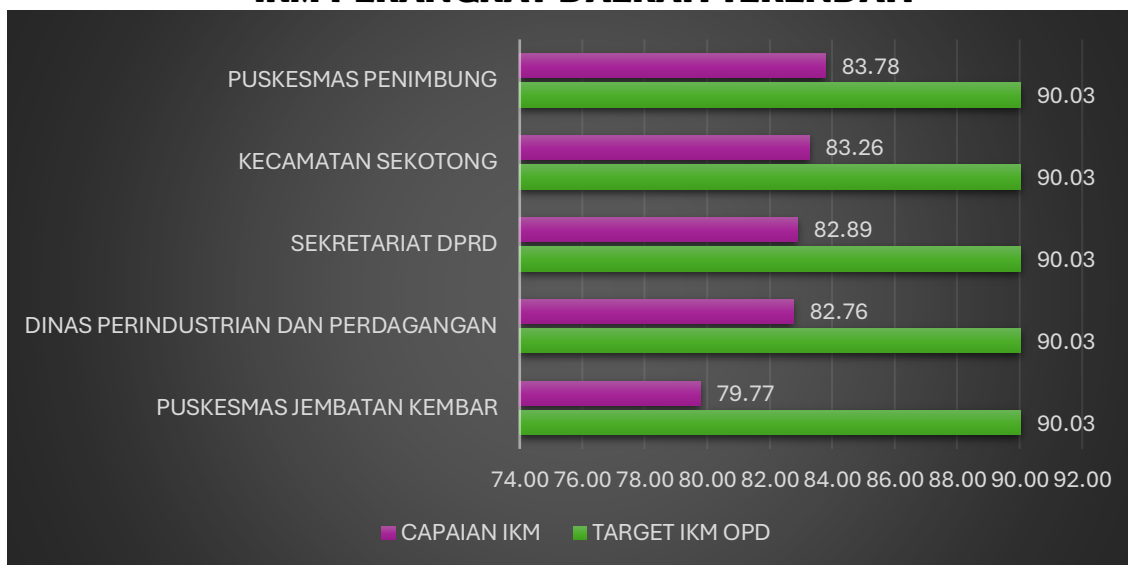
Sumber: Laporan SKM Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024

Dari grafik diatas Lima Perangkat daerah dengan nilai IKM tertinggi yaitu Puskesmas Banyumulek dengan nilai 99,18 , selanjutnya Puskesmas Kuripan dengan nilai 98,83, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 97,74, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik dengan nilai 96,37 dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai 96,08.

Adapun kondisi pada masing-masing perangkat daerah adalah sebagai berikut :

- a. Puskesmas Banyumulek dapat digambarkan sebagai berikut:
 - Insatalsi Ibu dan Bayi (IIDB) mendapat nilai IKM Pelayanan sebesar 99,28 yang menunjukkan pelayanan yang diberikan sudah sangat baik.
 - Pelayanan Rawat Inap meiliki nilai IKM Pelayanan 100 yang berarti pelayanan sangat baik.
 - Pelayanan Rawat Jalan masih mendapat nilai IKM Pelayanan sebesar 99,16 yang berarti pelayanan sudah sangat baik.
- b. Puskesmas Kuripan dapat digambarkan sebagai berikut:
 - Insatalsi Ibu dan Bayi (IIDB) mendapat nilai IKM Pelayanan sebesar 88,89 yang menunjukkan pelayanan yang diberikan sangat baik.
 - Pelayanan Rawat Inap memiliki nilai IKM Pelayanan 92,59 yang menunjukkan pelayanan yang diberikan sangat baik.
 - Pelayanan Rawat Jalan masih mendapat nilai IKM Pelayanan sebesar 99,08 yang menunjukkan pelayanan yang diberikan sangat baik.
- c. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik dapat digambarkan sebagai berikut:
 - Layanan asistensi aplikasi umum dan khusus pelayanan sebesar 96,33 yang menunjukkan pelayanan yang diberikan sangat baik.
 - Layanan data sektoral pelayanan sebesar 90,62 yang menunjukkan pelayanan yang diberikan sangat baik.
 - Layanan internet pelayanan sebesar 96,03 yang menunjukkan pelayanan yang diberikan sangat baik.
 - pelayanan informasi publik PPID pelayanan sebesar 89,31 yang menunjukkan pelayanan yang diberikan sudah baik.
 - Pengelolaan domain pelayanan sebesar 97,78 yang menunjukkan pelayanan yang diberikan sudah baik.
 - Rekomendasi ijin pendirian menara pelayanan sebesar 93,75 yang menunjukkan pelayanan yang diberikan sangat baik.

GRAFIK 3.2
IKM PERANGKAT DAERAH TERENDAH



Sumber: Laporan SKM Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024

Sedangkan lima Perangkat daerah dengan nilai IKM terendah yaitu Puskesmas Jembatan Kembar dengan nilai 79,77, selanjutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan nilai 82,76, Sekertariat DPRD dengan nilai 82,8, Kecamatan Sekotong dengan nilai 83,26 dan puskesmas penimbung dengan nilai 83,78.

Adapun Kondisi permasalahan dari 3 (tiga) unsur pelayanan terendah pada masing-masing perangkat daerah adalah sebagai berikut :

- a. Puskesmas Jembatan Kembar dapat digambarkan sebagai berikut:
 - Instalasi Ibu dan Bayi (IIDB) mendapat nilai IKM Pelayanan sebesar 81,94 yang menunjukkan pelayanan yang diberikan sudah cukup baik.
 - Pelayanan Rawat Inap memiliki nilai IKM Pelayanan 0 (nol) karena tidak ada responden yang mengisi survey.
 - Pelayanan Rawat Jalan masih mendapat nilai IKM Pelayanan sebesar 797 yang berarti belum ada pelayanan yang maksimal dalam rawat Jalan.
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat digambarkan sebagai berikut:
 - Layanan Tera mendapatkan nilai IKM layanan 82,74 yang berarti sudah cukup baik.
 - Rekomendasi Izin Usaha Industri dengan nilai 83,33 yang berarti sudah cukup baik.
 - Rekomendasi SIUP-MB bernilai 0 (nol) karena tidak ada responden.
 - Rekomendasi SIUP-TS bernilai 0 (nol) karena tidak ada responden.
 - Rekomendasi SIUP bernilai 0 (nol) karena tidak ada responden.
 - Rekomendasi daftar Gudang bernilai 97,22 yang berarti sudah sangat baik.
 - Rekomendasi tanda Daftar Industri bernilai 0 (nol) karena tidak ada responden
 - Rekomendasi tanda Daftar Perusahaan bernilai 0 (nol) karena tidak ada responden.

- c. Sekertariat DPRD dapat digambarkan sebagai berikut :
- Layanan pengaduan dan aspirasi masyarakat bernilai 82,89 yang berarti cukup baik.

Terkait dengan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan di masa depan yaitu:

- Peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama keramahan petugas pelayanan untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik.
- Peningkatan kemudahan bagi responden dalam mendapatkan informasi mengajukan keluhan dengan adanya operator pelayanan publik.
- Penggunaan aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik akan dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai yang diharapkan masyarakat Kabupaten Lombok Barat.
- Pelaksanaan rapat koordinasi secara rutin terkait progress pengisian data survei pada aplikasi dan membahas kendala atau permasalahan pelaksanaan kegiatan dan pelayanan.

2. MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

➤ OPINI BPK



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang terdiri Neraca dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, serta Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan.

Opini BPK tahun 2024 biasanya terbit bulan Mei 2025, oleh karena itu, data yang disajikan adalah tahun 2023. Sama dengan tahun sebelumnya, predikat WTP masih diperoleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Tercatat telah 10 tahun berturut-turut Pemda telah memperoleh predikat tersebut, Adapun yang menjadi faktor keberhasilannya, yaitu:

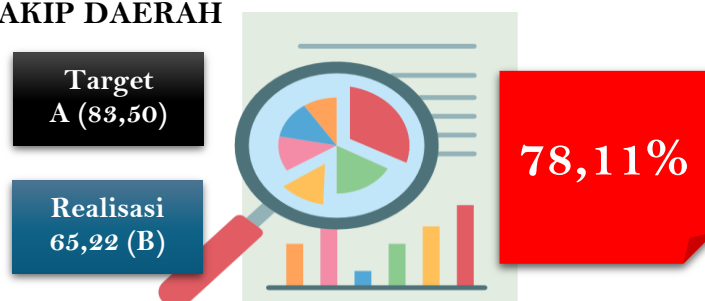
- a. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mempersiapkan data dan dokumen yang akurat dan lengkap
- b. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah uji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
- c. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyusun pelaporan keuangan telah berbasis Akrua (*Accrual Basis*) yaitu akuntansi yang memberikan gambaran lebih akurat dan kompleks atas kondisi keuangan organisasi, karena telah mencatat semua transaksi pengeluaran dan penerimaan kas serta jumlah hutang dan piutang.
- d. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melakukan rekonsiliasi keuangan secara berkala
- e. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melakukan audit internal secara berkala.
- f. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melakukan pencegahan temuan berulang.
- g. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melakukan deteksi dini yang berpotensi menjadi temuan

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat untuk meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang adalah selain melakukan upaya optimal dalam rangka menunjang pemerintah daerah mempertahankan WTP, seluruh perangkat daerah terus melakukan perbaikan berkelanjutan, seperti :

- a. Atas pemeriksaan BPK/BPKP/Inspektorat tahun berkenaan, hal-hal yang menjadi temuan ditindaklanjuti dan dipantau secara langsung oleh pimpinan.
- b. Sekretaris daerah sebagai pengelola Barang Milik Daerah untuk melaksanakan tugasnya secara optimal dan Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pembaruan informasi pada KIB secara aktual dan menambahkan informasi yang terkait detail barang dan pemanfaatannya.

3. MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA

➤ NILAI AKIP DAERAH



Berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/337/AA.05/2024, Hal: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, Pemerintah

Kabupaten Lombok Barat memperoleh Predikat B dengan nilai 65,22 dari target 83,50.

Adapun yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja untuk indikator kinerja nilai AKIP daerah adalah sebagian besar masih sama dengan tahun lalu yakni Pohon kinerja yang telah dirumuskan dan disusun oleh Perangkat daerah tahun 2023 belum bisa direalisasikan dan belum bisa masuk dalam perencanaan 2024 karena RPJMD telah dilakukan revisi sebelumnya dan telah disahkan oleh pihak legislative. Kendati demikian, Upaya perbaikan masih terus dilakukan walaupun masih terdapat permasalahan dalam evaluasi oleh pusat.

- a. Masih ditemukan beberapa rumusan kinerja level perangkat daerah yang belum memiliki indikator kinerja yang menggambarkan kecukupan dalam mengawal sasaran strategis yang diperjanjikan dalam dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah.
- b. Penetapan target kinerja yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja belum spesifik dan relevan dengan indikator yang digunakan.
- c. Pohon kinerja yang dimiliki belum sepenuhnya menggali *potensi critical success* faktor yang ada dan berpengaruh dengan kinerja di level strategis, sehingga kondisi-kondisi kinerja yang ada di level tactical belum sepenuhnya relevan dan mampu menjawab kondisi kerja.
- d. Identifikasi *crosscutting* kinerja sebagai bagian dari proses kolaborasi kinerja lintas sektor dalam mewujudkan kinerja strategis Kabupaten belum tergambar dengan baik sehingga pola kolaborasi kinerja lintas perangkat daerah maupun terhadap stakeholder lainnya belum dapat dipastikan keandalannya dalam mendukung kinerja Kabupaten.
- e. Pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan dengan aplikasi SAKIP Kabupaten Lombok Barat belum maksimal dikarenakan ketaatan pengisian pada aplikasi belum intens dilakukan oleh perangkat daerah sehingga masih terdapat beberapa data monitoring kinerja yang belum terisi secara lengkap.
- f. Kualitas monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan belum optimal dikarenakan proses monitoring yang dilakukan cenderung melihat realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan, belum dispesifikan hingga keterkaitan hasil pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan terhadap ketercapaian target kinerja yang dimiliki oleh level strategis.
- g. Keterkaitan pengukuran capaian kinerja organisasi belum dikaitkan dengan penilaian atas hasil kinerja individu sehingga belum dapat dipastikan bagaimana pengaruh hasil kinerja individu terhadap capaian kinerja organisasi dan makro di level pemerintah daerah.
- h. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan belum dimanfaatkan secara optimal dalam penentuan strategi, aktivitas, penyesuaian antara kinerja dan anggaran jangka pendek, serta pemberian reward dan punishment baik kepada individu maupun perangkat daerah.
- i. Informasi yang disampaikan dalam LPPD maupun laporan kinerja seluruh perangkat daerah belum dilengkapi dengan analisis factor keberhasilan atau kegagalan yang mempengaruhi realisasi kinerja, analisis atas program

maupun kegiatan yang mempengaruhi kinerja, serta hasil analisis efisiensi sumber daya yang telah dilakukan guna mencapai realisasi kinerja.

- j. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan strategi perencanaan kinerja tahun berikutnya, terutama pada capaian kinerja yang belum tercapai di tahun sebelumnya
- k. Laporan hasil evaluasi belum menyajikan temuan dan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap perangkat daerah sehingga belum mampu memberikan saran perbaikan yang signifikan terkait dengan kualitas implementasi SAKIP setiap perangkat daerah. Hal ini disebabkan temuan dan rekomendasi yang diberikan belum disertai contoh konkret dari permasalahan yang dimiliki setiap perangkat daerah
- l. Belum ada kebijakan reward dan punishment atas hasil evaluasi AKIP internal ini sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan komitmen setiap perangkat daerah dalam mengimplementasikan SAKIP.

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan di masa depan, diantaranya:

- a. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat agar melakukan *review* atas perumusan kinerja dari level kepala daerah dan seluruh perangkat daerah dengan memastikan telah berorientasi hasil, memiliki indikator kinerja yang berkualitas dan memenuhi prinsip *specific, measurable, achievable, Relevant, Time Bound* (SMART) dan cukup, dan juga memperhatikan setiap kondisi kinerja maupun Isu strategis yang dimiliki sehingga kualitas rumusan kinerja yang dimiliki dapat berorientasi hasil.
- b. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat agar melakukan review terhadap target yang digunakan dengan memastikan target yang ditetapkan relevan dengan indikator yang digunakan. Selain itu pada saat melakukan review target, agar memperhatikan realisasi kinerja tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan dapat spesifik, relevan dengan indikator dan menantang.
- c. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat agar mereview kembali pohon kinerja yang sudah disusun, baik dari level Kabupaten maupun seluruh perangkat daerah, dengan memperhatikan isu strategis, hubungan sebab akibat, *critical success factor* yang berpotensi mendukung kinerjanya, dan kaidah-kaidah yang tertuang dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi nomor 89 tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja. Hasil penyusunan pohon kinerja tersebut agar dimanfaatkan dalam menyusun rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah teknokratik untuk pelaksanaan ke depan sehingga kualitas perencanaan kinerja yang dimiliki saat ini dapat semakin lebih baik untuk kedepannya.
- d. Setelah pohon kinerja telah disusun, pemerintah Kabupaten Lombok Barat agar melakukan identifikasi potensi *crosscutting* kinerja yang mendukung kinerja dan penyelesaian isu strategis di Kabupaten Lombok Barat. Sehingga dapat tergambar Bagaimana hubungan kinerja antar lintas perangkat daerah maupun dengan stakeholder sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.

- e. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat agar terus mendorong ketaatan pengisian data kinerja aplikasi SAKIP Kabupaten Lombok Barat agar dapat dipantau secara Real Time oleh pimpinan daerah dan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan strategis kinerja kedepan.
- f. Mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dengan mengaitkan hasil pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan terhadap pengaruh terhadap target kinerja yang diperjanjikan di level strategisnya. Sehingga monitoring dan evaluasi tidak hanya berfokus kepada realisasi program, kegiatan, dan anggaran saja. Namun juga terhadap dampaknya dengan target kinerja yang diperjanjikan.
- g. Mendorong pemanfaatan hasil pengukuran kinerja organisasi sebagai dasar dalam menilai kinerja individu serta dijadikan dasar dalam melakukan review terhadap rencana hasil kerja individu yang dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.
- h. Mendorong pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk menjadi masukan dalam menentukan strategi, aktivitas, penyesuaian antara kinerja dan anggaran ke depan, serta pemberian reward and punishment baik kepada individu maupun perangkat daerah.
- i. Meningkatkan kualitas informasi dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan laporan kinerja yang menyajikan informasi yang spesifik perihal analisis faktor keberhasilan atau kegagalan yang mempengaruhi realisasi kinerja, analisis atas program maupun kegiatan yang mempengaruhi kinerja, serta hasil analisis efisiensi sumber daya yang telah dilakukan guna mencapai realisasi kinerja.
- j. Memanfaatkan informasi yang tertuang dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah maupun laporan kinerja seluruh perangkat daerah agar menjadi dasar dalam menetapkan perbaikan strategi perencanaan kinerja baik pada tahun depan maupun jangka menengah berikutnya.
- k. Meningkatkan kualitas evaluasi internal yang telah dilakukan dengan memberikan temuan dan rekomendasi yang bersifat spesifik dan tidak hanya pada menemukan dokumen saja, namun juga pada aspek kualitas dan pemanfaatan setiap komponen SAKIP sehingga setiap perangkat daerah mampu melaksanakan rekomendasi yang disampaikan dengan baik dan mampu memberikan perbaikan yang signifikan.
- l. Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi AKIP internal sebagai bagian dari mekanisme dasar pemberian reward and punishment kepada perangkat daerah dalam meningkatkan komitmen bersama untuk perbaikan implementasi SAKIP pemerintah Kabupaten Lombok Barat ke depannya.

Untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Pemerintah Kabupaten telah melakukan upaya perbaikan, yaitu:

- a. Dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2025 - 2029, Bappeda bersama seluruh perangkat daerah telah mulai melakukan pemetaan masalah dan perumusan pohon kinerja. Dalam upaya memastikan perumusan kinerja dari level Bupati sampai dengan Perangkat Daerah berorientasi hasil, memiliki indikator kinerja yang berkualitas dan memenuhi prinsip SMART kami telah melakukan orientasi Orientasi Penyusunan RPJMD Lombok Barat 2025-2029 dalam rangka penyusunan

RPJMD Kabupaten Lombok Barat dan penyelarassannya dengan RPJMN. Orientasi dilaksanakan selama 5 (lima) hari dengan melibatkan unsur Bappeda, BPKAD, Bapenda, Inspektorat dan Sekretariat Daerah sebagai Tim penyusun. Kegiatan ini menghasilkan rancangan awal pohon kinerja tingkat daerah. Kegiatan dilanjutkan dengan asistensi secara berkala terhadap seluruh Perangkat Daerah dalam membahas pohon kinerja hingga level program. Asistensi dilakukan selama 5 (hari) dengan menghadirkan perangkat daerah dengan tim lengkap secara terjadwal di Bappeda. dan Tim asistensi terdiri dari Tim inti yang telah mengikuti orientasi sebelumnya untuk mendapat penajaman dan hasil diskusi yang lebih optimal. Hasil dari kegiatan ini menghasilkan pohon kinerja daerah sampai level kepala perangkat daerah. Kegiatan akan dilanjutkan dengan pembahasan pohon kinerja perangkat daerah sampai level teknis/pelaksana pada jadwal berikutnya. (Perencanaan Kinerja)

- b. Dengan disusunnya RPJMD periode baru (2025-2029), mekanisme penyusunan pohon kinerja dibarengi dengan pengumpulan data-data dasar indikator kinerja terpilih. Dengan mekanisme pembahasan bersama Tim dan perangkat daerah ditetapkan target yang relevan dengan indikator dan sesuai kondisi existing. Pembahasan dan penajaman terhadap pohon kinerja, indikator, data dasar dan penentuan target terus dilakukan sesuai tahapan penyusunan RPJMD-Renstra, dan akan berproses terus hingga waktunya penetapan dokumen tersebut. (Perencanaan Kinerja)
- c. Mekanisme pembahasan dan penyusunan pokok yang saat ini sedang berlangsung sudah memperhatikan isu strategis, hubungan sebab akibat, *critical success factor* yang berpotensi mendukung kinerjanya, dan kaidah-kaidah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja. Hasil penyusunan pokok kinerja tersebut ini tentunya akan menjadi ranwal RPJMD dan Renstra perangkat daerah 2025 - 2029 dan akan terus dilakukan pembahasan, penajaman dan perbaikan sampai dengan penetapan dokumen tersebut. (Perencanaan Kinerja)
- d. Mekanisme pembahasan dan penyusunan pokok yang sedang kami lakukan sudah termasuk mengidentifikasi *crosscutting* kinerja yang mendukung kinerja dan penyelesaian isi strategis di Kabupaten Lombok Barat. Sehingga dapat tergambar Bagaimana hubungan kinerja antar lintas perangkat daerah maupun dengan stakeholder sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. (Perencanaan Kinerja)
- e. Pada Tahun 2024, Bagian Organisasi telah menjadwalkan pendampingan ke masing-masing perangkat daerah untuk pengisian SAKIP Lombok Barat per triwulan dan telah dijalankan bersama Tim selama 10 hari kerja. Selanjutnya, tim akan memverifikasi upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target, termasuk dengan faktor keberhasilan dan faktor kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan. (Pengukuran Kinerja)
- f. Dalam evaluasi renja dan RKPD yang dilakukan pada setiap triwulan hal ini terus dilakukan. Kami terus berupaya memperbaiki kualitas monitoring dan evaluasi. (Pengukuran Kinerja)

- g. Bappeda berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam bagi pakai data capaian indikator kinerja daerah (IKU dan IKK). Dengan harapan data kinerja dapat menjadi dasar dalam melakukan reviu RHK individu. Dalam Evaluasi Renja hal ini juga menjadi perhatian. Bappeda melakukan verifikasi laporan evaluasi renja termasuk mengklarifikasi capaian kinerja sampai dengan level sub kegiatan/pelaksana dan melihat korelasi/dukungannya terhadap capaian kinerja perangkat daerahnya. (Pengukuran Kinerja)
- h. Hasil evaluasi kinerja dijadikan dasar dalam perencanaan. Dituangkan dalam BAB 2 dokumen perencanaan dan diharapkan dimanfaatkan optimal oleh seluruh perangkat daerah dalam penentuan langkah perbaikan selanjutnya. Dalam laporan evaluasi renja, bappeda juga memberikan saran masukan untuk perbaikan perencanaan berikutnya. pemberian *reward* dan *punishment* belum diatur. (Pengukuran Kinerja)
- i. Bagian Organisasi Setda telah memverifikasi laporan kinerja masing-masing perangkat daerah sesuai dengan sistematika dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Asistensi yang dilakukan secara intens menghasilkan laporan kinerja yang sistematis dan sesuai kaidah penulisan. Selain itu, dalam asistensi tersebut lebih menekankan pada upaya yang telah dilakukan perangkat daerah sebagai Tindaklanjut temuan tahun sebelumnya, dan faktor keberhasilan/kegagalan dalam mencapai target yang telah ditentukan. (Pelaporan)
- j. Hasil evaluasi renja, hasil evaluasi RKPD dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun perangkat daerah menjadi dasar dalam menetapkan strategi perencanaan kinerja. Kami memanfaatkan capaian kinerja tersebut sebagai dasar perencanaan, sekaligus akan diutangkan dalam BAB 2 dokumen perencanaan baik di daerah maupun perangkat daerah. (Pelaporan)
- k. Akan meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan memberikan temuan dan rekomendasi yang bersifat spesifik dan tidak hanya pada menemukan dokumen saja, namun juga pada aspek kualitas dan pemanfaatan setiap komponen SAKIP, sehingga setiap perangkat daerah mampu melaksanakan rekomendasi yang disampaikan dengan baik dan mampu memberikan perbaikan yang signifikan. (Evaluasi internal)
- l. Akan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan evaluasi SAKIP, dengan mengusulkan beberapa orang APIP untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan evaluasi SAKIP yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada bulan Mei 2025 di Jakarta. (Evaluasi internal)

4. MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH

➤ PERSENTASE WILAYAH TERHUBUNG DENGAN PUSAT PEREKONOMIAN



Capaian kinerja wilayah terhubung dengan pusat perekonomian adalah 94.07 dari target 94.00 dengan persentase 100.07%. Berdasarkan tabel 3.2, persentase capaian indikator menurun, akan tetapi capaian realisasinya meningkat.

Persentase wilayah terhubung dengan pusat perekonomian dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : Persentase capaian wilayah terhubung dengan moda transportasi; Persentase jalur trayek menuju pusat pariwisata; persentase jalur trayek aktif menuju pusat perekonomian (pasar); Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap.

- **Persentase capaian wilayah terhubung dengan moda transportasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 66 Tahun 2023 tentang Jaringan Trayek Pedesaan dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat, jumlah jaringan trayek angkutan umum di wilayah Kabupaten Lombok Barat adalah sebanyak 33 trayek.

TABEL 3.6
KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM PADA JARINGAN TRAYEK DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

No.	Kode Trayek	Jaringan Trayek	Jumlah Angkutan Pedesaan				Ket.
			2021	2022	2023	2024	
1	S.01	LEMBAR - GERUNG - KEDIRI - BENGKEL - MANDALIKA, PP.	33	20	32	39	
2	S.02	LEMBAR - SEKOTONG - PELANGAN - LABUAN POH. PP.	22	18	22	20	
3	S.03	LEMBAR - SEKOTONG - BLONGAS - PENGANTAP, PP.	1	1	1	1	subsidi angkutan perintis Tahun 2022
4	S.04	LABUAN POH - PELANGAN - LEMBAR - MANDALIKA, PP.	1	1	1	1	subsidi angkutan perintis Tahun 2022
5	S.05	GERUNG - PENARUKAN - KEBON AYU - KURANJI - PRAMPUAN - LABUAPI, PP	0	0	0	0	

<i>No.</i>	<i>Kode Trayek</i>	<i>Jaringan Trayek</i>	<i>Jumlah Angkutan Pedesaan</i>				<i>Ket.</i>
			2021	2022	2023	2024	
6	S.06	GERUNG – KEDIRI – RUMAK – BANYUMULEK – GAPUK, PP.	0	0	0	0	
7	S.07	GERUNG - GIRI TEMBESI - TEMPOS - GIRI SASAK - KURIPAN SELATAN – KUMBUNG - KEDIRI – TERMINAL MANDALIKA, PP.	3	3	4	3	
8	S.08	GERUNG – RUMAK – GUNUNG PENGSONG – PRAMPUAN – BAJUR – PAGUTAN, PP.	0	0	0	0	
9	S.09	GERUNG – RUMAK – LABUAPI – BENGKEL – MANDALIKA -, PP.	0	0	0	1	subsidi angkutan perintis tahun 2023
10	S.10	GERUNG - BELEKA – GAPUK - BANYUMULEK-RUMAK-LABUAPI-BENGKEL-MANDALIKA,PP	0	0	1	1	subsidi angkutan perintis tahun 2023
11	S.11	PERAMPUAN – JERNENG – LABUAPI – BENGKEL – MANDALIKA, PP.	0	0	0	0	
12	S.12	PERAMPUAN – BAJUR – BENGKEL – MANDALIKA, PP.	0	0	0	0	
13	S.13	KEDIRI – BAGEK POLAK – JERNENG - PERAMPUAN, PP.	0	0	0	0	
14	S.14	GERUNG – TEMPOS – AIK AMPAT – DASAN GERES – GERUNG, PP.	0	0	1	1	subsidi angkutan perintis Tahun 2022
15	S.15	GERUNG – MENANG – AIKAMPAT – DASAN GERES – RUMAK – LABUAPI, PP	1	1	1	1	
16	S.16	GERUNG-BANYU URIP-AIK AMPAT-GERUNG,PP	0	0	0	0	
17	S.17	GERUNG - RUMAK - BANYU MULEK - SUKA MAKMUR - MESANGGOK - GERUNG, PP	0	0	0	0	
18	S.18	LEMBAR – SEKOTONG – BLONGAS – MEKAKI – PELANGAN, PP			1	1	subsidi angkutan perintis tahun 2023
19	T.01	KERU – NARMADA – MANDALIKA , PP.	21	12	21	26	
20	T.02	SESAOT – NARMADA – MANDALIKA, PP.	11	9	8	10	
21	T.03	NARMADA – LINGSAR – MANDALIKA, PP.	1	1	1	1	
22	T.04	NARMADA – TANAK BEAK – KUMBUNG – KURIPAN – GERUNG, PP.	1	0	0	0	
23	T.05	NARMADA – TANAK BEAK – KUMBUNG – KURIPAN – GERUNG, PP.	1	1	2	1	subsidi angkutan perintis tahun 2023
24	T.06	NARMADA – BATU KUMBUNG – KARANG BAYAN – SEGERONGAN – KEKERI – GUNUNG SARI, PP	0	0	0	0	

No.	Kode Trayek	Jaringan Trayek	Jumlah Angkutan Pedesaan				Ket.
			2021	2022	2023	2024	
25	T.07	KERU – SEDAU – SESAOT – NARMADA, PP.	4	3	4	3	
26	U.01	GUNUNGSARI – MAMBELAN – LILIR – KEKERI – SIGERONGAN – BUG-BUG – PETELUAN INDAH – LINGSAR – BATU KUMBUNG – NARMADA, PP	0		1	1	subsidi angkutan perintis tahun 2023
27	U.02	GUNUNG SARI – MONTONG – MANGSIT – AMPENAN, PP.	0	1	1	1	subsidi angkutan perintis tahun 2022
28	U.03	KERANDANGAN – SENGGIGI – SESELA – MIDANG – KEKERI – SAYANG-SAYANG – SELAGALAS – LINGSAR – NARMADA, PP	41	34	38	59	
29	U.04	SENGGIGI – MONTONG – MANGSIT – AMPENAN, PP.	6	4	6	3	
30	U.05	SIDEMEN – GUNUNG SARI – REMBIGA – AMPENAN, PP.	45	29	43	36	
31	U.06	GUNUNG SARI – LILIR – KEKERI – SAYANG-SAYANG – SINDU, PP.	0	0	0	0	
32	U.07	GUNUNG SARI – LILIR – SAYANG-SAYANG – MANDALIKA, PP.	0	0	1	1	
33	U.08	GUNUNGSARI – SANDIK – PUNCANG SARI – LEMBAH SARI – BATULAYAR – SENGGIGI – KERANDANGAN, PP			1	1	subsidi angkutan perintis tahun 2023
JUMLAH ANGKUTAN DALAM TRAYEK			192	138	191	212	
			<i>Jumlah Jaringan Trayek</i>				33 trayek
			<i>Jumlah Jaringan Trayek Aktif</i>				22 trayek
<i>Capaian wilayah terhubung dengan moda transportasi</i>							66.67 %

Sumber: LAKIP DISHUB 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah jaringan trayek mengalami penambahan pada tahun 2023, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Jaringan Trayek Pedesaan dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat. Penambahan jumlah jaringan trayek dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan wilayah pelayanan transportasi darat di Kabupaten Lombok Barat. Namun dari jumlah jaringan trayek yang tersedia, hanya 22 trayek saja yang telah dilayani angkutan umum pedesaan. Sejumlah 11 jaringan trayek masih berstatus non aktif, atau belum terlayani oleh angkutan umum. Sehingga sesuai dengan rumus di atas, persentase capaian wilayah yang terhubung dengan jaringan trayek aktif adalah sebesar 66,67%

Adapun ketersediaan kendaraan umum di seluruh jaringan trayek hingga tahun 2024 adalah sebanyak 202 unit, namun ketidaktersediaan kendaraan pada beberapa trayek non aktif didukung oleh penyediaan kendaraan mini bus perintis yang dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten

Lombok Barat kepada sejumlah BUMD/desa di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Hingga tahun 2023, jumlah kendaraan perintis yang dihibahkan kepada desa sejumlah 10 unit.

- Persentase jalur trayek menuju pusat pariwisata

TABEL 3.7
KETERSEDIAAN JALUR TRAYEK MENUJU OBYEK
WISATA TAHUN 2024

<i>Nama Obyek/ Desa</i>	<i>Lokasi</i>	<i>Daya Tarik Wisata</i>	<i>Jarak dari Ibukota Provinsi</i>	<i>Jaringan Trayek Angkutan Umum Pedesaan</i>	<i>Ket.</i>	
<i>1</i>	Pasar Seni Sesela	Desa Sesela, Kec. Gunungsari	Centra Kerajinan Rakyat	5 km	KERANDANGAN – SENGIGI – SESELA - MIDANG – KEKERI – SAYANG-SAYANG - SELAGALAS – LINGSAR - NARMADA, PP	Terlayani
<i>2</i>	Pura Agung Gunungsari	Desa Gunungsari, Kec. Gunungsari	pura yang terletak di atas bukit; pemandangan alam; flora dan fauna	4 km	SIDEMEN - GUNUNGSARI - REMBIGA - AMPENAN, PP	Terlayani
<i>3</i>	Makam Mambalan	Desa Mambalan, Kec. Gunungsari	Makam Tokoh Agama	11 km	GUNUNGSARI - MAMBALAN - LILIR - KEKERI - SIGERONGAN - BUG-BUG - PETELUAN INDAH - LINGSAR - BATU KUMBUNG - NARMADA, PP	Terlayani
<i>4</i>	Air Terjun Grepek	Desa Mambalan, Kec. Gunungsari	Air terjun; pemandangan alam yang indah	9 km	GUNUNGSARI - MAMBALAN - LILIR - KEKERI - SIGERONGAN - BUG-BUG - PETELUAN INDAH - LINGSAR - BATU KUMBUNG - NARMADA, PP	Terlayani
<i>5</i>	Pantai Senggigi dan sekitarnya	Desa Senggigi, Kec. Batulayar	Pantai Laguna; panorama alam perbukitan; sunset; festival kebudayaan	10 km	KERANDANGAN – SENGIGI – SESELA – MIDANG – KEKERI – SAYANG-SAYANG – SELAGALAS – LINGSAR – NARMADA, PP SENGIGI - MONTONG - MANGSIT - AMPENAN, PP	Terlayani
<i>6</i>	Pura Batu Bolong	Desa Batulayar, Kec. Batulayar	pura di atas batu; terdapat batu bolong (berlobang) di pinggir pantai; panorama alam pantai	8 km	KERANDANGAN – SENGIGI – SESELA – MIDANG – KEKERI – SAYANG-SAYANG – SELAGALAS – LINGSAR – NARMADA, PP	Terlayani
<i>7</i>	Pantai Mangsit	Desa Senggigi, Kec. Batulayar	Deburan ombak dan pantai yang landai; dapat melihat sunset	20 km	GUNUNGSARI - MONTONG - MANGSIT - AMPENAN, PP SENGIGI - MONTONG - MANGSIT - AMPENAN, PP	Terlayani
<i>8</i>	Hutan Wisata Pusuk	Desa Lembah Sari, Kec. Batulayar	hutan wisata; kehidupan kera liar; iklim pegunungan	16 km	SENGIGI - MONTONG - MANGSIT - AMPENAN, PP	Terlayani

<i>Nama Obyek/ Desa</i>		<i>Lokasi</i>	<i>Daya Tarik Wisata</i>	<i>Jarak dari Ibukota Provinsi</i>	<i>Jaringan Trayek Angkutan Umum Pedesaan</i>	<i>Ket.</i>
					GUNUNGSARI - SANDIK - PUNCANG SARI - LEMBAH SARI - BATULAYAR - SENGGIGI - KERANDANGAN, PP	
<i>9</i>	Makam Batulayar	Desa Batulayar, Kec. Batulayar	hutan wisata; kehidupan kera liar; iklim pegunungan	9 km	KERANDANGAN – SENGGIGI – SESELA – MIDANG – KEKERI – SAYANG-SAYANG – SELAGALAS – LINGSAR – NARMADA, PP	Terlayani
<i>10</i>	Pantai Meninting	Desa Meninting	Keindahan alam pantai	7 km	KERANDANGAN – SENGGIGI – SESELA – MIDANG – KEKERI – SAYANG-SAYANG – SELAGALAS – LINGSAR – NARMADA, PP	Terlayani
<i>11</i>	Mata Air Manggong	Desa Batu kumbang, Kec. Lingsar	Mata air yang jernih; keindahan alam	14 km	NARMADA – BATU KUMBUNG – KARANG BAYAN – SEGERONGAN – KEKERI – GUNUNGSARI, PP	Terlayani
<i>12</i>	Pura Lingsar	Desa Lingsar, Kec. Lingsar	Candi peninggalan Agama Hindu; event perang topat; nilai sejarah	9 km	NARMADA – LINGSAR – MANDALIKA, PP.	Terlayani
<i>13</i>	Masjid Kuno Karang Bayan	Desa Karang Bayan, Kec. Lingsar	Masjid peninggalan sejarah; nilai sejarah	17 km	NARMADA – BATU KUMBUNG – KARANG BAYAN – SEGERONGAN – KEKERI – GUNUNG SARI, PP	Terlayani
<i>14</i>	Air Terjun Prabe		Mata Air yang jernih; tempat pemandian	15 km	NARMADA – LINGSAR – MANDALIKA, PP.	Terlayani
					GUNUNGSARI - MAMBALAN - LILIR - KEKERI - SIGERONGAN - BUG-BUG - PETELUAN INDAH - LINGSAR - BATU KUMBUNG - NARMADA, PP	
<i>15</i>	Hutan Wisata Sesaot	Desa Sesaot, Kec. Narmada	Hutan lindung; mata air yang jernih; keindahan alam	20 km	SESAOT – NARMADA – MANDALIKA, PP.	Terlayani
					KERU – SEDAU – SESAOT – NARMADA, PP.	
<i>16</i>	Goa Lembah Sempage	Desa Sesaot, Kec. Narmada	Goa Lawul; keindahan alam	25 km	KERU – SEDAU – SESAOT – NARMADA, PP.	Terlayani
<i>17</i>	Aik Nyet	Desa Sesaot, Kec. Narmada	Hutan Lindung; panorama alam yang indah; sumber mata air yang jernih	20 km	SESAOT – NARMADA – MANDALIKA, PP.	Terlayani
					KERU – SEDAU – SESAOT – NARMADA, PP.	Terlayani
<i>18</i>	Gunung Jae	Desa Sedau, Kec. Narmada	Desa Budaya; Keindahan alam; dam irigasi	23 km	KERU – SEDAU – SESAOT – NARMADA, PP.	Terlayani
<i>19</i>	Padang Golf Golong	Desa Sedau, Kec. Narmada	Keindahan alam; rekreasi dan olahraga	16 km	KERU – NARMADA – MANDALIKA , PP.	Terlayani
<i>20</i>	Taman Narmada	Desa Lembuak, Kec. Narmada	Taman sari bagi kerajaan; sumber	12 km	KERU – NARMADA – MANDALIKA , PP.	Terlayani

Nama Obyek/ Desa		Lokasi	Daya Tarik Wisata	Jarak dari Ibukota Provinsi	Jaringan Trayek Angkutan Umum Pedesaan	Ket.
			mata air dari Gunung Rinjani; Air Awet Muda		SESAOT – NARMADA – MANDALIKA, PP. NARMADA – LINGSAR – MANDALIKA, PP. NARMADA – TANAK BEAK – KUMBUNG – KURIPAN – GERUNG, PP. NARMADA – DASAN TERENG – MEREMBU – BENGKEL – MANDALIKA, PP. NARMADA – BATU KUMBUNG – KARANG BAYAN – SEGERONGAN – KEKERI – GUNUNGSARI, PP KERU – SEDAU – SESAOT – NARMADA, PP.	
21	Hutan Wisata Suranadi	Desa Suranadi, Kec. Narmada	Keindahan kera liar; hutan wisata; iklim pegunungan; makanan khas bulayak, dodol nangka	17 km	SESAOT – NARMADA – MANDALIKA, PP. KERU – SEDAU – SESAOT – NARMADA, PP.	Terlayani
22	Dam Keru	Desa Keru, Kec. Narmada	Desa Budaya; Keindahan alam; dam irigasi	20 km	KERU – SEDAU – SESAOT – NARMADA, PP.	Terlayani
23	Centra Kerajinan Gerabah	Desa Banyumulek, Kec. Kediri	Centra kerajinan gerabah dengan hiasan anyaman ketak	17 km	GERUNG - KEDIRI - RUMAK - BANYUMULEK - GAPUK, PP GERUNG - BELEKA - GAPUK - BANYUMULEK - RUMAK - LABUAPI - BENGKEL - MANDALIKA, PP	Terlayani Terlayani
24	Gunung Pengsong	Desa Perampuan, Kec. Labuapi	Keindahan pemandangan dari puncak bukit; terdapat kera yang jinak	16 km	GERUNG - RUMAK - GUNUNG PENGSONG - PERAMPUAN - BAJUR - PAGUTAN, PP	Terlayani
25	Makam Ilham	Desa Kuranji, Kec. Labuapi	Makam Tokoh Agama dekat pantai	13 km	GERUNG - PENARUKAN - KEBON AYU - KURANJI - PERAMPUAN - LABUAPI, PP	Terlayani
26	Gunung Sasak	Desa Kuripan, Kec. Kuripan	Hutan Lindung; puncak bukit yang indah	12 km	GERUNG - GIRI TEMBESI - TEMPOS - GIRI SASAK - KURIPAN SELATAN - KUMBUNG - KEIDRI - TERMINAL MANDALIKA, PP	Terlayani
27	Pantai Induk	Desa Kebon Ayu, Kec. Gerung	Keindahan alam pantai	18 km	GERUNG - PENARUKAN - KEBON AYU - KURANJI - PERAMPUAN - LABUAPI, PP	Terlayani
28	Pelabuhan Lembar	Desa Lembar, Kec. Lembar	Keindahan alam pantai	23 km	LEMBAR - GERUNG - KEDIRI - BENGKEL - MANDALIKA, PP LEMBAR - SEKOTONG - PELANGAN - LABUAN POH, PP	Terlayani

<i>Nama Obyek/ Desa</i>	<i>Lokasi</i>	<i>Daya Tarik Wisata</i>	<i>Jarak dari Ibukota Provinsi</i>	<i>Jaringan Trayek Angkutan Umum Pedesaan</i>	<i>Ket.</i>
29	Pantai Cemara	Desa Lembar, Kec. Lembar	Pantai yang indah	17 km	LEMBAR - SEKOTONG - BLONGAS - PENGANTAP, PP
					LEMBAR - SEKOTONG - BLONGAS - MEKAKI - PELANGAN, PP
					LABUAN POH - PELANGAN - LEMBAR - MANDALIKA, PP.
					LEMBAR - GERUNG - KEDIRI - BENGKEL - MANDALIKA, PP.
30	Makam Keramat Cemare	Desa Lembar, Kec. Lembar	Makam Tokoh Agama	21 km	LEMBAR - SEKOTONG - PELANGAN - LABUAN POH. PP.
					LABUAN POH - PELANGAN - LEMBAR - MANDALIKA, PP.
					LEMBAR - SEKOTONG - BLONGAS - PENGANTAP, PP.
					LABUAN POH - PELANGAN - LEMBAR - MANDALIKA, PP.
31	Pantai Mekaki	Desa Pelangan, Kec. Sekotong	Alam Pantai dengan pasir putih	58 km	LEMBAR - SEKOTONG - BLONGAS - MEKAKI - PELANGAN, PP
32	Goa Jepang Labuan Poh	Desa Batu Putik, Kec. Sekotong	Nilai sejarah; goa bebas benteng pertahanan penjajahan Jepang; meriam peninggalan Jepang dengan panjang 8 meter	70 km	LEMBAR - SEKOTONG - PELANGAN - LABUAN POH. PP.
					LABUAN POH - PELANGAN - LEMBAR - MANDALIKA, PP.
33	Gili Gede	Desa Pelangan, Kec. Sekotong	Pantai yang indah	60 km	LEMBAR - SEKOTONG - PELANGAN - LABUAN POH. PP.
					LABUAN POH - PELANGAN - LEMBAR - MANDALIKA, PP.
34	Gili Poh	Desa Tawun, Kec. Sekotong	Pantai yang indah	60 km	LEMBAR - SEKOTONG - PELANGAN - LABUAN POH. PP.
					LEMBAR - SEKOTONG - BLONGAS - MEKAKI - PELANGAN, PP
35	Gili Lontar	Desa Tawun, Kec. Sekotong	Pantai yang indah	60 km	LEMBAR - SEKOTONG - PELANGAN - LABUAN POH. PP.
					LEMBAR - SEKOTONG - BLONGAS - MEKAKI - PELANGAN, PP
36	Gili Nanggu	Desa Tawun, Kec. Sekotong	Pantai pasir putih, dapat melihat sunset dan sunrise	60 km	LEMBAR - SEKOTONG - PELANGAN - LABUAN POH. PP.
					LABUAN POH - PELANGAN - LEMBAR - MANDALIKA, PP.

<i>Nama Obyek/ Desa</i>		<i>Lokasi</i>	<i>Daya Tarik Wisata</i>	<i>Jarak dari Ibukota Provinsi</i>	<i>Jaringan Trayek Angkutan Umum Pedesaan</i>	<i>Ket.</i>
<i>37</i>	Gili Rengit	Desa Pelangan, Kec. Sekotong	Pantai yang indah	70 km	LEMBAR - SEKOTONG - PELANGAN - LABUAN POH. PP. LEMBAR - SEKOTONG - BLONGAS - MEKAKI - PELANGAN, PP	Terlayani
<i>38</i>	Gili Sudak	Desa Tawun, Kec. Sekotong	Pantai yang indah	60 km	LEMBAR - SEKOTONG - PELANGAN - LABUAN POH. PP. LABUAN POH - PELANGAN - LEMBAR - MANDALIKA, PP.	Terlayani
<i>39</i>	Gili Tangkong	Desa Tawun, Kec. Sekotong	Pantai yang indah	60 km	LEMBAR - SEKOTONG - PELANGAN - LABUAN POH. PP. LEMBAR - SEKOTONG - BLONGAS - MEKAKI - PELANGAN, PP	Terlayani
<i>40</i>	Gili Layar	Desa Pelangan, Kec. Sekotong	Pantai yang indah	70 km	LEMBAR - SEKOTONG - PELANGAN - LABUAN POH. PP. LEMBAR - SEKOTONG - BLONGAS - MEKAKI - PELANGAN, PP	Terlayani
<i>41</i>	Gili Asahan	Desa Batu Putik, Kec. Sekotong	Pantai yang indah	60 km	LEMBAR - SEKOTONG - PELANGAN - LABUAN POH. PP. LABUAN POH - PELANGAN - LEMBAR - MANDALIKA, PP.	Terlayani
<i>42</i>	Gili Genting	Desa Tawun, Kec. Sekotong	Pantai yang indah	60 km	LEMBAR - SEKOTONG - PELANGAN - LABUAN POH. PP. LEMBAR - SEKOTONG - BLONGAS - MEKAKI - PELANGAN, PP	Terlayani
<i>43</i>	Gili Goleng	Desa Batu Putik, Kec. Sekotong	Pantai yang indah dengan ombak yang besar	60 km	LEMBAR - SEKOTONG - PELANGAN - LABUAN POH. PP. LABUAN POH - PELANGAN - LEMBAR - MANDALIKA, PP.	Terlayani
<i>44</i>	Bangko- Bangko	Desa Batu Putik, Kec. Sekotong	Pantai yang indah dengan ombak yang besar	60 km	LEMBAR - SEKOTONG - PELANGAN - LABUAN POH. PP.	Terlayani
<i>45</i>	Pantai Bange	Desa Sepi, Kec. Sekotong	Pantai yang indah dengan ombak yang besar	58 km	LEMBAR - SEKOTONG - BLONGAS - PENGANTAP, PP	Terlayani
<i>46</i>	Goa Alam Raksasa	Desa Sepi, Kec. Sekotong	Goa Alam	58 km	LEMBAR - SEKOTONG - BLONGAS - PENGANTAP, PP	Terlayani
<i>47</i>	Makam Keramat	Desa Kedaro, Kec. Sekotong	Makam Tokoh agama	58 km	LEMBAR - SEKOTONG - BLONGAS - PENGANTAP, PP	Terlayani
<i>48</i>	Embung Kedaro	Desa Kedaro, Kec. Sekotong	Waduk Penyimpanan air irigasi; keindahan alam perbukitan	58 km	LEMBAR - SEKOTONG - BLONGAS - PENGANTAP, PP	Terlayani
<i>49</i>	Pantai Sepi	Desa Sepi, Kec. Sekotong	Pantai yang indah dan aman	58 km	LEMBAR - SEKOTONG - BLONGAS - PENGANTAP, PP	Terlayani

<i>Nama Obyek/ Desa</i>	<i>Lokasi</i>	<i>Daya Tarik Wisata</i>	<i>Jarak dari Ibukota Provinsi</i>	<i>Jaringan Trayek Angkutan Umum Pedesaan</i>	<i>Ket.</i>	
<i>50</i>	Pantai Nambung		60 km	LEMBAR - SEKOTONG - BLONGAS - PENGANTAP, PP	Terlayani	
<i>51</i>	Kerandangan	Desa Senggigi, Kec. Batulayar	Pantai yang indah dan bagus	17 km	SENGGIGI - MONTONG - MANGSIT - AMPENAN, PP	Terlayani
<i>52</i>	Pantai Loco	Desa Senggigi, Kec. Batulayar	Pantai yang indah dan bersih	13 km	SENGGIGI - MONTONG - MANGSIT - AMPENAN, PP	Terlayani
<i>53</i>	Pantai Duduk	Desa Senggigi, Kec. Batulayar	Pantai yang indah pasir putih	11 km	SENGGIGI - MONTONG - MANGSIT - AMPENAN, PP	Terlayani
<i>54</i>	Pantai Tanjung Bias	Desa Senggigi, Kec. Batulayar	Pantai yang indah dan kuliner seafood	8,3km	SENGGIGI - MONTONG - MANGSIT - AMPENAN, PP	Terlayani
<i>55</i>	Taman Langit	Desa Bengkaung, Kec. Batulayar	Bukit yang indah dan spot foto bagus	12 km	GUNUNGSARI - SANDIK - PUNCANG SARI - LEMBAH SARI - BATULAYAR - SENGIGI - KERANDANGAN, PP.	Terlayani
<i>56</i>	Pusuk Lestari	Pusuk Pas, Kec. Batulayar	bukit yang indah dan minuman tuak tradisional	17 km	GUNUNGSARI - SANDIK - PUNCANG SARI - LEMBAH SARI - BATULAYAR - SENGIGI - KERANDANGAN, PP.	Terlayani
<i>57</i>	Bukit Tiga Rasa	Gelangsar, Kec. Gunungsari	bukit yang indah dan hijau	12 km	GUNUNGSARI - SANDIK - PUNCANG SARI - LEMBAH SARI - BATULAYAR - SENGIGI - KERANDANGAN, PP.	Terlayani
<i>58</i>	Karang Bayan	Desa Karang Bayan, Kec. Lingsar	Wisata alam dan berkuda	16 km	NARMADA - BATU KUMBUNG - KARANG BAYAN -SEGERONGAN - KEKERI - GUNUNG SARI, PP.	Terlayani
<i>59</i>	Rafting Batu Mekar	Desa Batu Mekar, Kec. Lingsar	Wisata Arung Jeram	19 km	NARMADA - BATU KUMBUNG - KARANG BAYAN -SEGERONGAN - KEKERI - GUNUNG SARI, PP.	Terlayani
<i>60</i>	Air terjun Timponan	Desa Batu Mekar, Kec. Lingsar	Air Terjun yang indah	20 km	NARMADA - BATU KUMBUNG - KARANG BAYAN -SEGERONGAN - KEKERI - GUNUNG SARI, PP.	Terlayani
<i>61</i>	Purekmas Sesaot	Desa Sesaot, Kec. Narmada	Nuansa alam dan sungai	22 km	SESAOT – NARMADA – MANDALIKA, PP.	Terlayani
<i>62</i>	Air Terjun Tibu Atas	Desa Buwun Sejati, Kec. Narmada	Air terjun alami	20 km	SESAOT – NARMADA – MANDALIKA, PP.	Terlayani
<i>63</i>	Air Terjun Segenter	Desa Lembah Sempage, Kec. Narmada	Air terjun alami	26 km	SESAOT – NARMADA – MANDALIKA, PP.	Terlayani
<i>64</i>	Taman Suranadi	Desa Suranadi, Kec. Narmada	Taman Pemandian	17 km	SESAOT – NARMADA – MANDALIKA, PP.	Terlayani
<i>65</i>	Taman Gandari Kawari	Desa Narmada, Kec. Narmada	Wisata religi pura kawari dan mata Air	13 km	NARMADA - LINGSAR - MANDALIKA, PP.	Terlayani
<i>66</i>	Kokok Babak Kediri	Desa Kediri, Kec. Kediri	Wisata alam air koko	10 km	GERUNG - RUMAK - LABUAPI - BENGKEL - MANDALIKA, PP.	Terlayani
<i>67</i>	Bukit Ledu	Desa Giri Sasak, Kec. Kuripan	Bukit yang indah dan hijau	20 km	GERUNG - RUMAK - LABUAPI - BENGKEL - MANDALIKA, PP.	Terlayani

Nama Obyek/ Desa		Lokasi	Daya Tarik Wisata	Jarak dari Ibukota Provinsi	Jaringan Trayek Angkutan Umum Pedesaan	Ket.
68	Pantai Uringin	Desa Kuranji, Kec. Labuapi	Pantai yang indah	6,8 km	GERUNG - PENARUKAN - KEBON AYU - KURANJI - PERAMPUAN - LABUAPI, PP.	Terlayani
69	Pantai Kuranji Dalang	Desa Kuranji, Kec. Labuapi	Pantai yang indah	7 km	GERUNG - PENARUKAN - KEBON AYU - KURANJI - PERAMPUAN - LABUAPI, PP.	Terlayani
70	Batu Idung	Desa Jembatan Gantung, Kec. Lembar	Bukit yang indah dan sunset yang bagus	17 km	LEMBAR - GERUNG - KEDIRI - BENGKEL - MANDIRI, PP.	Terlayani
71	Gili Mas	Desa Mareje Timur, Kec. Lembar	Pelabuhan sandar kapal pesiar	27 km	LEMBAR - SEKOTONG - PELANGAN - LABUAN POH, PP	Terlayani
72	Desa Telaga Pandan Wangi	Desa Mareje Timur, Kec. Lembar	Wisata embung pandan wangi	33 km	LEMBAR - SEKOTONG - PELANGAN - LABUAN POH, PP	Terlayani
73	Buwun Mas Hill	Desa Buwun Mas, Sekotong	Bukit yang indah	43 km	LEMBAR - SEKOTONG - BLONGAS- PENGANTAP, PP.	Terlayani
74	Mangrove Bagek Kembar	Desa Cendi Manik, Kec. Sekotong	Ekowisata alam mangrove trekking	34 km	LEMBAR - SEKOTONG - BLONGAS- PENGANTAP, PP.	Terlayani
75	Mangrove Tanjung Batu	Desa Sekotong Tengah, Kec. Sekotong	Ekowisata alam mangrove trekking	36 km	LEMBAR - SEKOTONG - BLONGAS- PENGANTAP, PP.	Terlayani
76	Tanjung Kelor	Desa Sekotong Tengah, Kec. Sekotong	Pantai yang indah dan perbukitan	40 km	LEMBAR - SEKOTONG - BLONGAS- PENGANTAP, PP.	Terlayani
77	Gili Kedis	Desa Sekotong Tengah, Kec. Sekotong	Gili dan pantai yg indah	42 km	LEMBAR - SEKOTONG - BLONGAS - MEKAKI - PELANGAN, PP.	Terlayani
78	Tawun	Desa Sekotong Barat, Kec. Sekotong	Darmaga penyembranan tawun	43 km	LEMBAR - SEKOTONG - BLONGAS - MEKAKI - PELANGAN, PP.	Terlayani
79	Batu Kijuk	Desa Sekotong Barat, Kec. Sekotong	Pantai yang indah dan bersih	41 km	LEMBAR - SEKOTONG - BLONGAS - MEKAKI - PELANGAN, PP.	Terlayani
80	Elak-Elak	Desa Sekotong Barat, Kec. Sekotong	Pantai yang indah dan pasir putih yang bersih	49 km	LEMBAR - SEKOTONG - BLONGAS - MEKAKI - PELANGAN, PP.	Terlayani
81	Tembowong	Desa Batu Putih, Kec. Sekotong	Darmaga tembowong	54 km	LEMBAR - SEKOTONG - BLONGAS - MEKAKI - PELANGAN, PP.	Terlayani
82	Pao-Pao	Desa Batu Putih, Kec. Sekotong	Laut yang indah dan pasir putih yang membentang	64 km	LABUAN POH - PELANGAN - LEMBAR - MANDALIKA, PP.	Terlayani
83	Dessert Point	Desa Batu Putih, Kec. Sekotong	pantai yang bagus dan ombak yang terbaik	72 km	LABUAN POH - PELANGAN - LEMBAR - MANDALIKA, PP.	Terlayani
84	Zero Kilometer	Desa Batu putih, Kec. Sekotong	Tugu titik nol kilometer mekaki	52 km	LABUAN POH - PELANGAN - LEMBAR - MANDALIKA, PP.	Terlayani
Jumlah Obyek/Desa Wisata				84	lokasi	
Jumlah Obyek/Desa wisata yang dilayani jaringan trayek				84	lokasi	
persentase jalur trayek menuju pusat pariwisata				100.00	%	

Sumber: LAKIP DINAS PERHUBUNGAN 2024

Persentase jalur trayek menuju pusat pariwisata adalah 100%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Penambahan jumlah jaringan trayek untuk melayani wilayah yang agak jauh dari pusat perekonomian dan pariwisata sehingga cakupan akses wilayah meningkat
 - b. Penambahan armada berupa mini bus disejumlah jaringan trayek yang non aktif dan kekurangan moda angkutan
 - c. Pendataan moda angkutan pedesaan pada sejumlah pengusaha angkutan rutin dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan moda dan memperhatikan kondisinya
 - d. Kegiatan pengujian kendaraan bermotor tidak dipungut biaya, untuk memberikan pelayanan maksimal bagi pengusaha angkutan dan sopir angkutan pedesaan dalam menyediakan moda angkutan yang laik jalan.
- Persentase jalur trayek aktif menuju pusat perekonomian (pasar)

TABEL 3.8
KETERSEDIAAN JARINGAN TRAYEK MENUJU PASAR
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2024

<i>No.</i>	<i>Nama Pasar</i>	<i>Type</i>	<i>Lokasi</i>	<i>Jaringan Trayek Angkutan Umum Pedesaan</i>	<i>Ket.</i>
<i>1</i>	Pasar Narmada	A	Narmada	KERU – NARMADA – MANDALIKA, PP.	Terlayani
				SESAOT – NARMADA – MANDALIKA, PP.	Terlayani
				NARMADA – LINGSAR – MANDALIKA, PP.	Terlayani
				NARMADA – TANAK BEAK – KUMBUNG – KURIPAN – GERUNG, PP.	Terlayani
				NARMADA – DASAN TERENG – MEREMBU – BENGKEL – MANDALIKA, PP.	Terlayani
				NARMADA – BATU KUMBUNG – KARANG BAYAN – SEGERONGAN – KEKERI – GUNUNGSARI, PP	Terlayani
				KERU – SEDAU – SESAOT – NARMADA, PP.	Terlayani
<i>2</i>	Pasar Keru	B	Narmada	KERU – NARMADA – MANDALIKA, PP.	Terlayani
				KERU – SEDAU – SESAOT – NARMADA, PP.	Terlayani
<i>3</i>	Pasar Suranadi	C	Narmada	SESAOT – NARMADA – MANDALIKA, PP.	Terlayani
<i>4</i>	Pasar Endut	C	Narmada	NARMADA – BATU KUMBUNG – KARANG BAYAN – SEGERONGAN – KEKERI – GUNUNG SARI, PP	Terlayani
<i>5</i>	Pasar Gunungsari	A	Gunungsari	GUNUNGSARI – SANDIK – PUNCANG SARI – LEMBAH SARI – BATULAYAR –	Terlayani

<i>No.</i>	<i>Nama Pasar</i>	<i>Type</i>	<i>Lokasi</i>	<i>Jaringan Trayek Angkutan Umum Pedesaan</i>	<i>Ket.</i>
				SENGGIGI - KERANDANGAN, PP	
6	Pasar Sidemen	C	Gunungsari	SIDEMEN – GUNUNG SARI – REMBIGA – AMPENAN, PP.	Terlayani
7	Pasar Gerung	B	Gerung	GERUNG - PENARUKAN - KEBON AYU - KURANJI - PERAMPUAN - LABUAPI, PP	Terlayani
				GERUNG – KEDIRI – RUMAK – BANYUMULEK – GAPUK, PP.	Terlayani
				GERUNG – RUMAK – GUNUNG PENGSONG – PERAMPUAN – BAJUR – PAGUTAN, PP.	Terlayani
				GERUNG – RUMAK – LABUAPI – BENGKEL – MANDALIKA, PP.	Terlayani
				GERUNG – BELEKA - GAPUK – BANYUMULEK – RUMAK – LABUAPI – BENGKEL – MANDALIKA, PP.	Terlayani
				GERUNG – TEMPOS – AIK AMPAT – DASAN GERES – GERUNG, PP.	Terlayani
				GERUNG – TEMPOS – AIK AMPAT – DASAN GERES – RUMAK - LABUAPI, PP.	Terlayani
				GERUNG - BANYU URIP - AIK AMPAT - GERUNG, PP	Terlayani
				GERUNG - RUMAK - BANYUMULEK - SUKA MAKMUR - MESANGGOK - GERUNG, PP	Terlayani
8	Pasar Tempos	C	Gerung	GERUNG - BANYU URIP - AIK AMPAT - GERUNG, PP	Terlayani
9	Pasar Penarukan	C	Gerung	GERUNG - PENARUKAN - KEBON AYU - KURANJI - PRAMPUAN - LABUAPI, PP	Terlayani
10	Pasar Kediri	B	Kediri	LEMBAR - GERUNG - KEDIRI - BENGKEL - MANDALIKA, PP.	Terlayani
				GERUNG – KEDIRI – RUMAK – BANYUMULEK – GAPUK, PP.	Terlayani
				KEDIRI – BAGEK POLAK – JERNENG - PERAMPUAN, PP.	Terlayani
11	Pasar Jagaraga	C	Kediri	GERUNG – GIRI TEMBESI – TEMPOS – GIRI SASAK – KURIPAN SELATAN – KUMBUNG – KEDIRI – MANDALIKA, PP.	Terlayani
12	Pasar Lembar	C	Lembar	LEMBAR - SEKOTONG - PELANGAN - LABUAN POH. PP.	Terlayani
				LABUAN POH - PELANGAN - LEMBAR - MANDALIKA, PP.	Terlayani
13	Pasar Eat Mayang	C	Lembar	LEMBAR - SEKOTONG - PELANGAN - LABUAN POH, PP	Terlayani
14	Pasar Jembatan Kembar	C	Lembar	LABUAN POH - PELANGAN - LEMBAR - MANDALIKA, PP	Terlayani
15	Pasar Sekotong	C	Sekotong	LEMBAR - SEKOTONG - BLONGAS - PENGANTAP, PP.	Terlayani
16	Pasar Pelangan	C	Sekotong	LEMBAR - SEKOTONG - PELANGAN - LABUAN POH. PP.	Terlayani
17	Pasar Lilir	C	Lingsar	GUNUNGSARI - LILIR - KEKERI - SAYANG-SAYANG - SINDU, PP	Terlayani

<i>No.</i>	<i>Nama Pasar</i>	<i>Type</i>	<i>Lokasi</i>	<i>Jaringan Trayek Angkutan Umum Pedesaan</i>	<i>Ket.</i>
18	Pasar Jelateng Lingsar	C	Lingsar	NARMADA - LINGSAR - MANDALIKA, PP	Terlayani
19	Pasar Duman	C	Lingsar	GUNUNGSARI - MAMBALAN - LILIR - KEKERI - SIGERONGAN - BUG-BUG - PETELUAN INDAH - LINGSAR - BATU KUMBUNG - NARMADA, PP	Terlayani
20	Pasar Kumbung	C	Kuripan	GERUNG - GIRI TEMBESI - TEMPOS - GIRI SASAK - KURIPAN SELATAN - KUMBUNG - KEDIRI - TERMINAL MANDALIKA, PP.	Terlayani
21	Pasar Kuripan	C	Kuripan	GERUNG - GIRI TEMBESI - TEMPOS - GIRI SASAK - KURIPAN SELATAN - KUMBUNG - KEDIRI - TERMINAL MANDALIKA, PP.	Terlayani
22	Pasar Karang Bongkot	C	Labuapi	PERAMPUAN - JERNENG - LABUAPI - BENGKEL - MANDALIKA, PP.	Terlayani
23	Pasar Jerneng	C	Labuapi	PERAMPUAN - JERNENG - LABUAPI - BENGKEL - MANDALIKA, PP.	Terlayani
Jumlah Pasar				unit	23
jumlah pasar yang dilayani jaringan trayek				unit	23
persentase jalur trayek menuju pusat perekonomian (pasar)				%	100

Sumber: LAKIP DINAS PERHUBUNGAN 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah pasar di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2024 berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat adalah sebanyak 23 pasar, dan keseluruhan pasar sudah dilewati oleh jaringan trayek pedesaan. Sehingga dengan menggunakan rumus di atas dapat dihitung persentase jalur trayek menuju pusat perekonomian sebesar 100%.

- Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap**

Persentase capaian sebesar 100,21% merupakan hasil perhitungan dari capaian Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap sebesar 76,03% dari target 75,87%. Pada Tahun 2024, sasaran ini telah dilaksanakan secara optimal dimana capaiannya melampaui dari target sebesar 0,16%. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap 76,03% atau sepanjang 434,568 Km dari total panjang Jalan Kabupaten sepanjang 571,584 Km.

Indikator Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap meningkat sebesar 0,92% dari tahun sebelumnya, dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 76,03%. Sedangkan capaian realisasi Tahun 2023 sebesar 75,11%. Peningkatan kondisi kemantapan jalan ini tidak terlepas dari penanganan jalan melalui pembangunan jalan, rekonstruksi jalan dan pemeliharaan rutin jalan serta ketersediaan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun APBD

dalam rangka peningkatan konektivitas wilayah. Keberhasilan sasaran ini juga dicapai dengan telah dilaksanakannya penanganan jalan melalui pembangunan jalan, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan dan pemeliharaan rutin jalan yang semakin berjalan dengan baik dan optimalnya penyerapan anggaran yang tersedia pada tahun berjalan untuk peningkatan konektivitas wilayah mulai dari pemukiman sampai kepusat-pusat kegiatan yang ada di wilayah kabupaten Lombok Barat.

TABEL 3.9
DATA KONDISI KEMANTAPAN JALAN KABUPATEN

<i>Uraian</i>	2023		2024	
	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
A. Jenis Permukaan Jalan				
- Hotmix	541.435	94.73	544.465	95,26
- Aspal	3.390	0.59	1.360	0,24
- Kerikil	6.570	1.15	5.570	0,97
- Tanah	12.614	2.21	12.614	2.21
- Beton	7.575	1.33	7.575	1.33
<i>Jumlah / Total</i>	571.584	100.00	571.584	100.00
B. Kondisi				
- Baik	312.322	54.64	323,352	56,57
- Sedang	117.016	20.47	111,216	19,46
- Rusak	110.667	19.36	105,437	18,45
- Rusak Berat	31.579	5,52	31.579	5,52
<i>Jumlah / Total</i>	571.584	100.00	571.584	100.00
C. Kemantapan Jalan				
- Mantap (Baik + Sedang)	429.338	75.11	434,568	76,03
- Tidak Mantap (Rusak)	110.667	19.36	105,437	18,45
- Kritis (Rusak Berat)	31.579	5.52	31,579	5,52
<i>Jumlah / Total</i>	571.584	100.00	571.584	100.00

Sumber: LAKIP DPUPR 2025

Dari tabel diatas dengan total Jalan Kabupaten sepanjang 571,584 Km, pada Tahun 2024 kondisi kemantapan jalan sebesar 76,03% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,92 %.

Terkait dengan peningkatan kualitas infrastruktur dalam pengembangan wilayah, terdapat beberapa upaya yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja di masa depan yaitu:

- Melakukan penyusunan Rencana Umum Jaringan Taransportasi (RUJT) untuk memberikan gambaran umum dan detail terkait jalur transportasi di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam rangka pembangunan jalan, pengadaan perlengkapan jalan, dan simpul transportasi.
- Melakukan pendataan pada angkutan pedesaan yang masih beroperasi pada jaringan trayek untuk mengetahui tingkat kelayakan moda. Sehingga kenyamanan dan keselamatan penumpang bisa ditingkatkan.

- c. Melakukan komunikasi dengan Koperasi-koperasi angkutan untuk mengupayakan peremajaan moda angkutan pedesaan dan penambahan moda untuk melayani jaringan trayek non aktif. Termasuk melakukan distribusi moda sehingga tidak menumpuk pada beberapa jaringan trayek saja.
- d. Memberikan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor tanpa dipungut biaya.
- e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana simpul-simpul transportasi sebagai penunjang pemberian layanan angkutan pedesaan.
- f. Pengoptimalan pemenuhan kebutuhan prasarana jalan untuk mendukung sistem transportasi daerah dengan terus melakukan peningkatan kondisi kemandapan jalan dan jembatan baik dengan penambahan ruas-ruas jalan maupun dengan peningkatan status jalan.
- g. Peningkatan keterpaduan sistem jaringan transportasi dalam penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi dengan fungsi tugas lintas institusi terkait regulasi pada tataran operasional.

5. MENINGKATNYA AKSES INFRASTRUKTUR DASAR

➤ PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI



Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2024 adalah 100.66%. Capaian ini melebihi target yang ditentukan yaitu 98.15 dengan realisasi 98.80. Setiap tahun Pemda Lombok Barat terus berupaya meningkatkan unit rumah layak huni. Adapun data yang dimaksud dapat dilihat di tabel berikut:

TABEL 3.10
RASIO RUMAH TAHUN 2019-2024

No	Bidang Perumahan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Layak Huni	Unit	219.723	224.138	224.955	228.412	231.508	231.729
2	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Unit	6.314	5.326	5.154	4.760	3.053	2.832
Jumlah Semua Rumah		Unit	226.037	229.464	230.109	233.172	234.543	234.543
% RLH			97.21	97.68	97.76	97.96	98.71	98.80
% RTLH			2.79	2.32	2.24	2.04	1.30	1.2

Sumber: LAKIP DISPERKIM 2024

Berdasarkan Tabel di atas dapat disampaikan bahwa jumlah seluruh rumah di Kabupaten Lombok Barat sampai dengan tahun 2024 adalah sebanyak 234.543 unit. Jumlah rumah layak huni dari tahun ke tahun sejak 2019 (tahun pertama RPJMD) hingga tahun 2024 (tahun akhir RPJMD) mengalami peningkatan sebanyak 12.006 unit dari 219.723 unit menjadi 231.729 unit. Sedangkan jumlah rumah tidak layak huni, dari target penanganan satu periode RPJMD 2019-2024 sebanyak 6.314 unit rumah telah tertangani sebanyak 3.482 unit (55,15%) selama 5 tahun atau menyisakan sebanyak 2.832 unit rumah.

Untuk meningkatkan persentase capaian rumah layak huni, Pemda Lombok Barat juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti Baznas dalam program yang diberi nama MAHYANI. Program Mahyani merupakan upaya untuk menyediakan tempat tinggal yang layak dan sehat bagi masyarakat kurang mampu. Program ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat. Pada tahun 2024, Baznas Lombok Barat telah membangun 54 unit Rumah Layak Huni (Mahyani). Program ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

Selain menyediakan rumah layak huni, Pemda Lombok Barat juga melakukan penanganan Rumah Layak Huni, yaitu meningkatkan kualitas rumah agar memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Rumah layak huni merupakan rumah yang aman, nyaman, dan sehat bagi penghuninya. Adapun data yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut,

TABEL 3.11
PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK LAYAK HUNI TAHUN 2024

No	Lokasi (Kecamatan)	RTLH BDP	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Yang sudah tertangani	Sisa RTLH
1	Sekotong	1.439	340	322	7	9	133	25	836	603
2	Lembar	840	190	249	-	34	8	21	502	338
3	Gerung	431	130	46	-	25	45	-	246	185
4	Narmada	769	100	107	8	-	28	23	266	503
5	Lingsar	927	50	49	100	60	53	46	358	569
6	Batu Layar	277	60	16	-	51	13	12	152	125
7	Kuripan	352	60	60	19	33	3	1	176	176
8	Gunung Sari	659	20	52	10	-	35	29	146	513
9	Kediri	217	77	41	94	64	12	46	334	(117)
10	Labuapi	403	205	46	75	117	5	18	466	(63)
Jumlah		6.314	1.232	988	313	393	335	221	3.482	2.832

Sumber: LAKIP DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN 2024

Tabel di atas menggambarkan jumlah penanganan rumah tidak layak huni di masing-masing kecamatan sejak tahun 2019 – 2024. Khusus untuk Kecamatan Kediri dan Labuapi jauh melampaui jumlah RTLH yang ada karena adanya penanganan rumah di luar data RTLH (data RTLH tambahan).

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah berhasil mencapai target kinerja untuk indikator sasaran persentase Rumah layak Huni. Keberhasilan ini tidak terlepas dari semakin baiknya penanganan RTLH yang bukan hanya dilakukan oleh Pemda, akan tetapi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak baik unsur pemerintahan maupun non pemerintahan (swasta).

Selain itu, Pemda juga bekerja sama dengan Baznas Lombok Barat dalam program MAHYANI yaitu penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Dalam segi perencanaan, Pemda telah berupaya meningkatkan koordinasi dan kualitas komunikasi bersama anggota DPRD dalam rangka memprioritaskan pembangunan pada kawasan kumuh untuk penuntasan kawasan kumuh dan menunjang ketersediaan prasarana dan sarana penunjang hunian layak.

Terkait dengan persentase Rumah Layak Huni, terdapat beberapa upaya yang perlu diperhatikan untuk peningkatan kinerja di masa depan yaitu:

- a. Peningkatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berdasarkan data yang tersedia dengan lebih banyak berkoordinasi dengan pihak-pihak baik itu kepada Perangkat Daerah terkait dengan pihak swasta, CSR ataupun pihak Baznas yang pada saat ini juga banyak membantu dalam penanganan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman berupa bantuan sosial kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, selain dari anggaran DAK yang selama ini juga banyak membantu dalam hal peningkatan kinerja terutama terkait tentang kemiskinan
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat secara umum dengan mengajak untuk ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan lingkungan sekitarnya dan menjaga fasilitas umum, bersama-sama dengan lembaga/institusi dan instansi sehingga tercipta pola pikir yang mengerti pentingnya pengelolaan kebersihan, penataan ruang yang baik, penataan taman yang asri, serta penerangan jalan umum yang di sosialisasikan melalui penyuluhan-penyuluhan secara langsung atau melalui media cetak dan elektronik

➤ **PERSENTASE JUMLAH RUMAH TANGGA YANG MENDAPATKAN AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK**



Tahun 2024 indikator jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak adalah 94.45% dari target 84.72% dengan capaian persentase 111.48%. Berdasarkan tabel 3.2, capaian persentase indikator ini menurun dari 111.58 di tahun 2023 menjadi 111.48 di tahun 2024. Akan tetapi

walaupun persentase capaiannya menurun, realisasi kinerjanya meningkat dari 93.53% menjadi 94.45%.

Indikator jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak dipengaruhi beberapa faktor yaitu Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi; dan Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak.

- **Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.**

Persentase capaian sebesar 111,48% merupakan realisasi capaian akses air minum layak sebesar 94,45% dari rencana target 84,72% yang ditetapkan pada Tahun 2024, capaian ini didapat dari ketersediaan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan yang terlindungi Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat.

Keberhasilan capaian ini tidak terlepas dari semakin baiknya pendataan sumber-sumber mata air baru yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku di wilayah Kabupaten Lombok Barat baik untuk penyediaan air minum maupun kebutuhan sehari-hari lainnya. Capaian Layanan Air Minum Tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut:

TABEL 3.12
DATA CAKUPAN LAYANAN AIR MINUM

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Cakupan Layanan Air Minum	
		Jiwa	KK	KK	%
1	Sekotong	76.357	23.881	19.919	83,41
2	Lembar	53.524	16.988	15.033	88,49
3	Gerung	90.496	29.606	28.359	95,79
4	Labuapi	95.726	30.136	29.546	98,04
5	Kediri	60.659	18.214	17.932	98,45
6	Kuripan	42.921	13.394	12.867	96,07
7	Narmada	105.517	36.107	33.993	94,15
8	Lingsar	75.759	25.100	22.375	93,13
9	Gunung Sari	91.634	28.873	28.749	99,57
10	Batu Layar	49.710	15.545	14.882	95,73
Jumlah		742.303	237.844	222.455	94,45

Sumber: LAKIP DPUPR 2024

Indikator rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak capaiannya sebesar 94,45% meningkat 0,92% melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi yang melayani penduduk sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 222.455 KK dari jumlah penduduk Kabupaten Lombok Barat sebanyak 237,844 KK. Peningkatan ini tidak terlepas dari semakin baiknya penanganan perbaikan jaringan irigasi dan pendataan sumber-sumber mata air baru yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

- **Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak**

Capaian untuk Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 sebesar 102.94% dengan realisasi 90,58% telah tercapai dari target sebesar 87,99%, dan terhadap realisasi capaian tahun sebelumnya (90,21%) mengalami kenaikan sebesar 0,37%. Capaian realisasi ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah dalam penanganan Stunting di Kabupaten Lombok Barat dengan penyediaan sarana sanitasi berupa pembangunan MCK Komunal dan Pembangunan tangki septik individual. Capaian layanan sanitasi Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.13
DATA CAKUPAN LAYANAN SANITASI

<i>No.</i>	<i>Kecamatan</i>	<i>Jumlah Penduduk</i>		<i>Cakupan Layanan Sanitasi</i>	
		<i>Jiwa</i>	<i>KK</i>	<i>KK</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	Sekotong	76.357	23.881	19.396	81,22
<i>2</i>	Lembar	53.524	16.988	15.048	88,58
<i>3</i>	Gerung	90.496	29.606	26.209	88,53
<i>4</i>	Labuapi	95.726	30.136	29.286	97,18
<i>5</i>	Kediri	60.659	18.214	17.711	97,24
<i>6</i>	Kuripan	42.921	13.394	10.718	80,02
<i>7</i>	Narmada	105.517	36.107	32.202	89,18
<i>8</i>	Lingsar	75.759	25.100	21.651	86,26
<i>9</i>	Gunung Sari	91.634	28.873	28.460	98,57
<i>10</i>	Batu Layar	49.710	15.545	14.757	94,93
<i>Jumlah</i>		<i>742.303</i>	<i>237.844</i>	<i>214.568</i>	<i>90,58</i>

Sumber: LAKIP DPUPR 2025

Indikator Rumah tangga dengan akses sanitasi layak capaiannya sebesar 90,58% pada Tahun 2024 meningkat 0,37% dari tahun sebelumnya sebesar 90,21%, dimana jumlah tangki septik atau MCK yang dimiliki oleh masyarakat seluruh Kabupaten Lombok Barat merupakan komulatif dari pembangunan daerah oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Kesehatan serta pembangunan secara swadaya oleh masyarakat sendiri dengan cakupan layanan sebesar 214.568 KK dari jumlah penduduk Kabupaten Lombok Barat sebesar 237,844 KK.

Terkait peningkatan akses air minum layak dan akses sanitasi layak, terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa depan, yaitu:

- Peningkatan pendataan sumber-sumber mata air baru untuk pemenuhan kebutuhan air minum dan air baku lainnya
- Peningkatan pembangunan prasarana air minum melalui jaringan perpipaan terlindungi
- Sosialisasi penyediaan lahan untuk kesiapan lahan lokasi pembangunan prasarana MCK.
- Peningkatan pembangunan pengelolaan air limbah skala kawasan.

6. MENINGKATNYA DAYA SAING SEKTOR EKONOMI UNGGULAN

➤ PERSENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH



Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya. PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah: Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran kabupaten Lombok Barat Tahun 2024, Pendapatan daerah adalah sebesar Rp. 2.118.524.496.944,12. Hasil rekapitulasi yang telah disusun Badan Pendapatan Daerah, disebutkan bahwa capaian PAD pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 403.129.303.879,12 (LRA 2024 per tanggal 31 Desember 2024). Jadi, persentase PAD terhadap pendapatan daerah adalah jumlah realisasi PAD dibagi Jumlah Pendapatan Daerah, dikali 100 persen sehingga hasilnya 19,03%.

TABEL 3.14
CAPAIAN PAD DIRINCI MENURUT PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

<i>Perangkat Daerah</i>	<i>Target (%)</i>	<i>Capaian (%)</i>
1. Dinas Kesehatan (Puskesmas)	100	104,71
2. RSUD Patut Patuh Patju	100	99,45
3. RSUD Awet Muda	100	88,97
Jumlah BLUD		98,76
4. Badan Pendapatan Daerah	100	100,98
5. Dinas Penanaman Modal dan PTSP	100	64,75
6. Dinas Lingkungan Hidup	100	100,79
7. Dinas Pemuda dan Olahraga	100	83,57
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100	70,63
9. Dinas Perikanan dan Kelautan	100	65,00
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	51,49
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100	94,29
12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	100	121,44
13. Dinas Pertanian	100	92,20
14. Dinas Perhubungan	100	37,32
15. Dinas Kesehatan (non BLUD)	100	144,47
16. Dinas Tenaga Kerja	100	55,79
Jumlah non BLUD		99,87
TOTAL	100	99,26

*Data 31 Januari 2025, Sumber: Bapenda 2025

Berbeda dari LRA Tahun 2024, pergerakan PAD terus meningkat. Data terakhir yaitu 31 Januari 2025 Capaian PAD per perangkat daerah tahun 2024 adalah 99,26%. Terdapat 16 perangkat daerah penghasil PAD yang telah menghasilkan Rp. 403.454.500.526 dari target Rp. 406.462.761.343. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pemda Lombok Barat menghasilkan Rp. 340.596.960.493 dari target Rp. 395.446.782.572, atau meningkat Rp. 62.857.540.033 dengan pertumbuhan 18,46%.

Dari tabel di atas, dapat dilihat capaian PAD dari BLUD dan non BLUD tidak mencapai target 100%. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa perangkat daerah yang sudah mencapai target PAD nya dengan capaian lebih dari 100% yaitu Badan Pendapatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan yang membawahi Rumah Sakit Awet Muda dan semua Puskesmas di Lombok Barat serta Laboratorium Kesehatan. Untuk perangkat daerah yang tidak mencapai target, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya:

- **BLUD**

- a. Pelayanan Hemodialisa di RSUD Awet Muda Narmada, belum mendapatkan Kredensial dari BPJS Kesehatan. Oleh karena itu belum bisa melakukan pelayanan dan tidak menghasilkan PAD. Selain itu, tertundanya pembayaran klaim rumah sakit oleh BPJS Kesehatan dapat berdampak signifikan terhadap pencapaian target pendapatan rumah sakit. Keterlambatan ini sering kali disebabkan oleh proses verifikasi yang memakan waktu, ketidaksesuaian dokumen klaim, atau kendala anggaran di pihak BPJS. Akibatnya, aliran kas rumah sakit terganggu, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan operasional, seperti pembelian obat-obatan, pembayaran gaji karyawan, dan pemeliharaan fasilitas. Ketidakpastian ini tidak hanya menurunkan efisiensi manajemen keuangan rumah sakit tetapi juga memengaruhi kualitas layanan kesehatan.
- b. Belum maksimalnya Pendapatan dari lain-lain PAD yang sah atau dari BLUD Puskesmas, seperti angka kontak adalah 15% dari Angka kontak, rujukan non spesialisik dan dan terkendalinya Hipetensi dan Diabetes Melitus.

Terkait dengan PAD BLUD, terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hambatan tersebut, yaitu:

- a. Untuk mendapatkan kredensial Pelayanan Hemodialisa di rumah sakit harus melakukan beberapa persiapan antara lain adalah membentuk tim kredensial yang terdiri dari dokter spesialis nefrologi, perawat bersertifikasi hemodialisa, dan teknisi terlatih untuk mengelola peralatan. Selanjutnya, rumah sakit perlu memastikan bahwa fasilitas dan peralatan, termasuk mesin hemodialisa dan sistem pengolahan air reverse osmosis (RO), telah memenuhi standar yang ditetapkan. Penyusunan dokumen standar operasional prosedur (SOP) dan kebijakan pencegahan infeksi juga

menjadi prioritas utama. Selain itu, rumah sakit perlu melengkapi persyaratan administratif, seperti izin operasional dari Kementerian Kesehatan atau dinas kesehatan setempat, dan mempersiapkan program pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis. Dengan langkah-langkah ini, kredensial dapat diajukan dengan lebih efektif, mendukung pelayanan yang berkualitas dan sesuai regulasi.

- b. Perlunya atensi dari pemerintah daerah dalam berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk mengurangi risiko tidak dibayarkannya klaim oleh rumah sakit. Salah satunya dengan memfasilitasi forum komunikasi rutin antara rumah sakit dan BPJS untuk menyelesaikan kendala administratif atau teknis yang sering menjadi penyebab penundaan pembayaran klaim. Selain itu, daerah perlu mendukung pengawasan terhadap kualitas pelayanan rumah sakit agar sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga meminimalkan potensi klaim yang ditolak. Dengan sinergi yang baik, risiko tertundanya klaim dapat ditekan, sehingga keberlanjutan layanan kesehatan di daerah tetap terjamin.

- **NON BLUD**

Hambatan yang ditemukan dalam pencapaian PAD pada perangkat daerah non BLUD adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya minat masyarakat dalam mengurus proses perizinan karena masih dianggap sulit; Proses Penerbitan Rekomendasi Teknis yang rumit dan berbelit-belit, karena pemungutan retribusi berasal dari perangkat daerah terkait; Penetapan RT/RW dan/atau RDTR masih belum tersedia sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan rekomendasi teknis dan perizinan; Retribusi Daerah tidak mencapai target disebabkan karena ada 2 (dua) jenis Retribusi yang sudah dihapuskan yaitu Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Trayek. (Dinas Penanaman Modal dan PTSP)
- b. Kurangnya Minat Berolahraga bagi Pemuda karena kurangnya pengetahuan tentang manfaat berolahraga; Belum Maksimalnya sarana prasarana keolahragaan yang memadai untuk berolahraga; Kurangnya atlet yang berprestasi; Kurangnya informasi terkait sarana yang dimanfaatkan (Dinas Pemuda dan Olahraga)
- c. Target Pendapatan Asli Daerah yang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Barat; kondisi sebagian besar pasar tradisional yang tidak lain sebagai tempat perdagangan jual beli terlebih di saat musim hujan.; tidak tersedianya mesin poporasi karcis retribusi pasar, sehingga menghambat tersedianya karcis pasar; dan pelayanan tera ulang sudah tidak dilakukan penarikan retribusi (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
- d. Balai Benih Ikan (BBI) merupakan kontributor terbesar penyumbang PAD dari sektor perikanan, dimana tahun 2024 dilakukan rehabilitasi kolam seluas 1000 meter² dan rehabilitasi saluran sepanjang 200 meter, kedua pekerjaan tersebut membutuhkan waktu pengerjaan selama kurang lebih

4 bulan. Hal tersebut menyebabkan siklus produksi benih kurang optimal yang menyebabkan pendapatan dari BBI tidak tercapai dengan optimal yang berdampak pada realisasi PAD dari sektor perikanan. (Dinas Perikanan dan Kelautan)

- e. Penyewaan untuk alat berat dan pengujian alat laboratorium hanya tergantung pada pekerjaan fisik pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten. Lombok Barat, sedangkan untuk pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain tidak pernah menggunakan alat-alat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta adanya permintaan penggunaan alat-alat berat yang bersifat sosial yang secara umum tidak dikenakan biaya. (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
- f. Menurunnya pendapatan dari retribusi sewa gedung SKB Gunungsari dan Gedung Budaya Narmada karena kondisi sarana dan prasarana kurang memadai serta kondisinya rusak, serta kurangnya promosi kepada masyarakat untuk penggunaan SKB Gunungsari dan Gedung Budaya Narmada untuk berbagai kegiatan formal maupun kegiatan non formal (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
- g. Kualitas air irigasi yang kurang baik sebagai akibat dari dampak pembangunan bendungan meninting; adanya pengurangan pupuk subsidi pupuk dari pemerintah dan harga pupuk yang sangat tinggi terutama pupuk-pupuk non subsidi; keterbatasan anggaran menyebabkan pembiayaan BBU hanya bisa di alokasikan hanya untuk satu kali musim tanam; serangan hama terutama hama burung yang tidak bisa dikendalikan. (Dinas Pertanian)
- h. Target retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum masih menggunakan target retribusi bruto, dimana jumlah pungutan retribusi parkir ditambah dengan penghasilan juru parkir, sehingga target tersebut cukup tinggi dibandingkan kondisi potensi per titik parkir; Jumlah titik parkir yang telah dikelola Pemerintah Daerah belum bertambah signifikan, dibandingkan keseluruhan potensi titik parkir yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat; Masih belum tertibnya penyetoran retribusi parkir oleh juru parkir berdasarkan Perjanjian Kerja sama yang telah disepakati di awal tahun; Kondisi fasilitas tempat khusus parkir Segenter masih belum memadai, sehingga daya tampung areal parkir terhadap kendaraan angkutan barang masih terbatas.; Kondisi dermaga sandar di pelabuhan Tembowong masih kurang memadai dan membutuhkan pemeliharaan.; Masih adanya boatman di wilayah Selatan yang melayani penumpang naik dan turun pada “dermaga tikus”, tidak melalui Pelabuhan Tawun dan Tembowong yang resmi dikelola Pemerintah Daerah. (Dinas Perhubungan)
- i. Pengawasan yang kurang ketat terhadap penggunaan tenaga asing dapat menyebabkan penyalahgunaan izin atau pelanggaran yang tidak terdeteksi, sehingga mengurangi penerimaan retribusi; Keterbatasan tenaga kerja yang terlatih dan berkompeten dalam menangani pengurusan izin IMTA mengurangi efektivitas layanan dan pengumpulan retribusi;

Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dan perusahaan terkait kewajiban retribusi IMTA menyebabkan banyak pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar, mengurangi potensi penerimaan PAD (Dinas Tenaga Kerja)

Terkait dengan PAD, terdapat beberapa Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hambatan tersebut, yaitu:

- a. Penyederhanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan memaksimalkan pelaksanaan pelayanan perizinan berdasarkan SOP; Mengoptimalkan peran koordinasi dengan perangkat daerah teknis melalui Tim Teknis dalam melakukan pelayanan perizinan kepada masyarakat/pelaku usaha; Menyusun dan melengkapi data potensi yang ada, baik yang bersumber dari perangkat daerah teknis maupun Kecamatan dan Desa sehingga penentuan target retribusi sesuai realita; Mengoptimalkan informasi kepada masyarakat/pelaku usaha tentang keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik secara fungsi maupun kedudukannya melalui penyebaran brosur, papan informasi di setiap Kecamatan, baliho dan sosialisasi langsung kepada masyarakat/pelaku usaha; Menyusun format baku untuk formulir dan blanko secara terpadu dengan berpedoman pada prinsip cepat, murah dan aman (Dinas Penanaman Modal dan PTSP)
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana penghasil PAD agar target bisa tercapai dan bisa ditingkatkan lagi (Dinas Pemuda dan Olahraga)
- c. Pelaksanaan evaluasi pemungutan retribusi melalui pertemuan rutin dengan mandor pasar; meningkatkan monitoring penerimaan retribusi pasar; penggunaan Q-RIS dan Tap Cash sebagai pembayaran non tunai retribusi pasar yang dilakukan di pasar Narmada dimana kegiatan ini merupakan kerjasama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Bank Negara Indonesia. (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
- d. Peningkatan kegiatan dengan sumber daya yang ada, melakukan terobosan-terobosan dalam proses produksi benih dan pemasarannya, tetap melakukan kalibrasi pada alat uji garam sehingga pencapaiannya dapat mencapai maksimal dan dapat memenuhi target PAD sebesar 100%; memanfaatkan potensi objek PAD yang ada sebaik-baiknya walaupun dengan keterbatasan anggaran,; mengupayakan dukungan anggaran yang optimal agar pencapaian presentase realisasi PAD dari sektor perikanan dapat memenuhi target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. (Dinas Perikanan dan Kelautan)
- e. Peningkatan koordinasi eksternal yaitu dengan cara meningkatkan kerjasama, komunikasi dan memberikan pelayanan prima dengan melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para penyewa alat berat dan alat pengujian material, sehingga menimbulkan rasa puas; meningkatkan sistem pengelolaan alat berat yang baik tidak terlepas dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Perencanaan alat berat dimulai dari analisis kebutuhan penyewa akan kebutuhan alat berat dan alat

pengujian material yang sering disewa; melaksanakan pemeliharaan alat berat dan alat pengujian material secara rutin sehingga alat selalu siap bekerja dan selalu dalam kondisi baik pada saat penyewaan. Pemeliharaan ini bertujuan untuk meminimalisir kerusakan alat dan meningkatkan umur alat. (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

- f. Peningkatan sarana prasarana pada target-target retribusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat; Penambahan target retribusi jumlah kantin pada masing-masing sekolah baik jenjang SD maupun SMP (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
- g. Pembinaan secara intensif terhadap sumber-sumber penghasil PAD dengan membentuk tim pembinaan yang sudah disusun sejak tahun 2023.; melakukan identifikasi permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber-sumber PAD; melakukan pembangian tugas secara internal sesuai dengan tupoksi masing-masing unit pengelola sumber-sumber PAD; mengusulkan perubahan Perda retribusi sumber-sumber PAD sesuai dengan standar yang baru. (Dinas Pertanian)
- h. Melakukan kajian potensi retribusi parkir dengan melibatkan pihak ketiga untuk lebih menjamin kevalidan data; melakukan penyesuaian target retribusi parkir netto, disesuaikan dengan jumlah potensi parkir di wilayah Kabupaten Lombok Barat; memaksimalkan potensi jumlah pengawas perparkiran yang terbatas untuk meningkatkan ketertiban pada proses penyetoran pungutan parkir oleh juru parkir; mulai mengoperasikan tempat khusus parkir Kediri, yang berlokasi di depan Pasar Kediri yang telah dilengkapi dengan sarana prasarana rambu dan portal pembatas untuk lebih mengefektifkan pelayanan parkir; melakukan pengawasan dan penertiban parkir liar di sejumlah ruas jalan strategis; melakukan kajian dokumen lingkungan dan perencanaan pengembangan dermaga Pelabuhan Tembowong sebagai persiapan dalam kegiatan pembangunan fasilitas dermaga yang lebih memadai untuk mengupayakan lebih banyak operator kapal yang melakukan sandar di Pelabuhan Tembowong; melakukan pengawasan dan penertiban yang lebih intensif pada sejumlah boatman di wilayah Selatan yang beroperasi tidak pada pelabuhan resmi Pemerintah Daerah. (Dinas Perhubungan)
- i. Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya perizinan IMTA kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA); Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Tenaga Kerja terkait dengan pengelolaan retribusi IMTA; Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian retribusi IMTA secara berkala (Dinas Tenaga Kerja)

➤ NILAI PDRB PERKAPITA



PDRB per kapita adalah perhitungan pendapatan rata-rata per orang di suatu daerah dalam satu tahun. PDRB per kapita biasa digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara makro. PDRB per kapita yang tinggi mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat yang lebih baik, dan sebaliknya PDRB per kapita yang rendah mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat yang kurang berkembang. Nilai PDRB perkapita Lombok Barat tahun 2024 adalah 15,10 juta rupiah dari target 15,56 juta rupiah dengan persentase 97,04%. Tahun 2023 capaian PDRB Lombok barat adalah 96,81%. Capaian ini tidak hanya meningkat dari segi persentase saja, tapi dari realisasi kinerja yang juga lebih tinggi dari tahun sebelumnya yakni 14,87 juta rupiah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB per kapita adalah jumlah penduduk dan nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang masuk dalam perencanaan daerah yang menjadi faktor yang mempengaruhi nilai PDRB Perkapita Lombok Barat adalah Persentase pertumbuhan industri; Nilai ekspor perdagangan daerah; Persentase peningkatan produksi pertanian; Jumlah pelaku pariwisata yang tersertifikasi; Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terlatih di desa wisata; Jumlah kunjungan wisatawan; Lama tinggalnya wisatawan di destinasi; Volume produksi perikanan; Persentase jumlah Wirausaha baru/WUB ; Jumlah koperasi aktif.

- **Persentase pertumbuhan industri**

Pertumbuhan industri di Kabupaten Lombok Barat tahun 2024 adalah 0,2% dari target 0,5% dengan persentase 44%. Capaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 0.92%. Menurunnya capaian ini disebabkan oleh beberapa hambatan yaitu Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku lokal sebagai bahan baku industri, koordinasi antara instansi terkait belum optimal dalam pembinaan IKM dan UKM yang meliputi pembinaan mutu produk, fasilitasi kerja sama dan kemitraan serta dalam memfasilitasi pelayanan perijinan Unit Usaha (penerbitan TDI/IUI). Selain itu, Sumber daya manusia IKM yang relative masih rendah khususnya yang menyangkut tingkat Pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat keterampilan, inovasi dan kreativitas, manajemen dan kemampuan berwirausaha sehingga kurang mampu memanfaatkan peluang yang tersedia secara maksimal dan daya saing produk di pasar global menjadi rendah. Belum optimalnya pemanfaatan produk-produk industri baik pangan maupun non pangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan oleh Perangkat Daerah seperti penggunaan-penggunaan produk pangan dalam kegiatan rapat, serta penggunaan meubelair lokal di setiap perangkat daerah, penggunaan bata, pavin blok dan SDM Industri dalam pembangunan fisik.

- **Nilai ekspor perdagangan daerah**

Nilai ekspor perdagangan Kabupaten Lombok Barat tahun 2024 mencapai angka \$822.273,99 dari target \$ 307.000 dengan persentase 267,84%. Capaian ini memiliki kontribusi sebesar 0,04 % terhadap ekspor perdagangan Provinsi NTB (di luar ekspor pertambangan). Nilai ekspor ini mengalami penurunan sebesar

69.671.55 US\$ dari tahun sebelumnya. Beberapa produk/barang ekspor yang memiliki kontribusi dalam ekspor ini antara lain: vanili, batu apung, mutiara dan coco.

Dari data yang diperoleh, diketahui stabilisasi harga kebutuhan pokok sebesar 60.53% sedangkan target 80% ke tidak tercapaian target ini disebabkan karena Lombok Barat bukan kabupaten penghasil dari sebagian komoditas bahan kebutuhan sehingga fluktuatif perkembangan harga ringsnya cukup jauh. Selain itu, Faktor cuaca/musim merupakan hal yang mempengaruhi dari kesetabilan harga terhadap komoditi bahan kebutuhan pokok karena dengan adanya cuaca ekstrim menyebabkan harga barang kebutuhan pokok seperti sayur-sayuran, dan ikan-ikan tidak stabil.

- **Persentase peningkatan produksi pertanian**

Capaian kinerja untuk produksi pertanian adalah 4,86 dari target 3,25 dengan persentase 149,61%. Produksi pertanian terdiri atas Produksi tanaman pangan (padi, Jagung, Kedelai, Kacang tanah), Produksi tanaman hortikultura, Produksi Perkebunan (Kelapa, Kopi, Kakau, Jambu Mente, Tembakau) dan Produksi dan hasil peternakan (Sapi, Kambing, ayam, dan Itik). Tingkat capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Tingkat Serangan hama dan penyakit tanaman (OPT) pada tanaman pangan kecenderungannya meningkat karena petani tidak melakukan pergantian varietas tanaman setiap musim tanam.
- b. Pemahaman dan kesadaran petani untuk menerapkan GAP (*Good Agriculture Practice*) atau cara budidaya yang baik dan benar kecenderungannya menurun dan tingkat adopsi inovasi teknologi baru oleh petani semakin belum optimal.
- c. Adanya perubahan iklim (kekeringan) yang menyebabkan terjadinya brow dan puso di beberapa wilayah bagian Selatan (Sekotong, Lembar, Kuripan) yang cukup tinggi sehingga terjadi penurunan luas panen.
- d. Mahalnya biaya produksi terutama harga pupuk, dan obat-obatan dapat disikapi oleh petani dengan secara mandiri atau swadaya membuat pupuk dan obat-obatan organik dengan memanfaatkan sisa-sisa atau limbah pertanian yang ada namun dapat meningkatkan produksi secara signifikan.
- e. Penataan kebun dan pemeliharaan tanaman masih kurang terutama pada pemupukan buah-buahan. Faktor cuaca akibat kemarau panjang menyebabkan terjadinya penghambatan pertumbuhan calon bakal buah durian dan manggis (buah rontok karena kurang air). Masih kurangnya upaya peremajaan tanaman terutama pada komoditi nangka, sementara tanaman yang ada saat ini sudah tua dan kurang produktif. Penurunan produksi pada tanaman sayur sayuran seperti tomat, kacang panjang, dan kangkung disebabkan oleh penurunan luas tanam, petani memilih beralih komoditi ke tanaman pangan dan perkebunan seperti jagung dan tembakau. Terjadi fluktuasi harga mempengaruhi minat petani untuk menanam komoditi sayur –sayuran relatif menurun.

- f. Rata-rata umur tanaman perkebunan sudah tua, kurang produktif dan belum optimalnya upaya peremajaan tanaman oleh petani sehingga tanaman yang tua banyak mengalami kerusakan.
- g. Adanya penurunan areal tanam tanaman perkebunan rata-rata sebesar - 1,56 Persen dan penurunan produktivitas tanaman Perkebunan rata-rata sebesar 0,24 Persen.
- h. Tingkat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Pada Tanaman Perkebunan mengalami peningkatan karena perubahan cuaca dan iklim elnino yang ektrim. Dan masih adanya serangan penyakit hewan menular karena sarana prasaran (obat-obatan) belum memadai.
- i. Rendahnya KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) peternak masih rendah; Rendahnya modal peternak yang mengakibatkan banyak peternak yang beralih ke bidang usaha yang lain.
- j. Tingginya mobilitas/lalulintas ternak dan lemahnya Pencatatan Pertambahan Populasi Ternak.

- **Jumlah pelaku pariwisata yang tersertifikasi dan Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terlatih di desa wisata.**

Capaian untuk Jumlah pelaku pariwisata yang tersertifikasi dan Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terlatih, masing-masing adalah 30,60% dan 42,76%. Capaian kinerja ini tidak tercapai disebabkan karena tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan pelatihan pelaku ekonomi kreatif serta sertifikasi pelaku pariwisata yang bersumber dari APBD. Selama ini anggaran pelatihan pelaku ekonomi kreatif bersumber dari DBHCHT dan sertifikasi tenaga kerja sektor pariwisata hanya bersumber dari kolaborasi kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi dan BNSP dimana anggaran yang mereka miliki juga masih terbatas.

- **Jumlah kunjungan wisatawan.**

Capaian kunjungan wisatawan tahun 2024 adalah 439.138 orang dari target 186.000 orang dengan persentase 236,09%. Penetapan target jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 186.000 orang di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2024 didasarkan pada asumsi bahwa dampak COVID-19 masih akan mempengaruhi sektor pariwisata, meskipun pandemi sudah terkendali. Namun, kenyataannya sektor pariwisata pulih lebih cepat dari yang diperkirakan. Banyak negara dan wisatawan yang kini lebih percaya diri dalam melakukan perjalanan khususnya ke Pulau Lombok, dibuktikan dengan kedatangan 27 kapal pesiar yang bersandar melalui Pelabuhan Gili Mas pada tahun 2024. Hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, selain itu juga karena meningkatnya minat wisatawan Nusantara untuk berkunjung ke Lombok Barat sehingga capaian kinerja jauh melebihi target yang telah ditetapkan.

- **Lama tinggalnya wisatawan di destinasi.**

Capaian lama tinggal wisatawan tahun 2024 adalah 1,68 hari dari target 1,5 hari dengan persentase 112%. Ketercapaian target ini dipengaruhi selain

karena banyaknya kunjungan wisatawan baik nusantara maupun manca negara tapi juga banyaknya pelaksanaan acara MICE yang berpengaruh terhadap lama tinggal di hotel dan akomodasi lainnya.

- **Volume produksi perikanan.**

Produksi perikanan hanya mencapai 95,46% dari target 39.971,62 ton dari target 43.075,85 ton, hal ini disebabkan adanya ketidaktercapaian produksi perikanan budi daya. Kontribusi utama penyebab produksi perikanan budi daya yang tidak mencapai target, utamanya disebabkan oleh karena terdapat penurunan produksi yang tinggi pada komoditas rumput laut gracillaria yaitu rumput laut yang dibudi daya di tambak. Penurunan produksi pada komoditas rumput laut ini disebabkan karena permintaan pasar yang tidak stabil, dimana pada saat musim panen justru pembeli tidak hadir untuk mengambil produk yang sudah disepakati untuk dibeli di pembudi daya.

- **Persentase jumlah Wirausaha baru/WUB.**

Sasaran Pengembangan Wira Usaha Baru menjadi UKM Formal dengan target 3,87 % (450 UKM) di tahun 2024 dengan capaian 4,70 % (452 UKM) sehingga di tahun 2024 ini jumlah UKM formal di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 7.052 UMKM dan UKM non formal sebanyak 9.583 UMKM, dengan tingkat capaian sebesar 121,4%. Keberhasilan capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Pemda yang dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM telah menumbuh kembangkan wirausaha baru, dengan memberikan pendampingan, konsultasi dan pembinaan kepada UMKM agar lebih berkembang sesuai tuntutan perkembangan zaman. Selain itu, memberikan bimbingan, pelatihan dan sosialisasi kepada pelaku UMKM dan mendorong UMKM untuk melakukan kemitraan dengan pihak lain, serta memberikan bantuan peralatan bagi Para Pelaku UMKM.

- **Jumlah koperasi aktif**

Sasaran Menjadikan Koperasi & UKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan Indikator Kinerja Persentase Jumlah Koperasi Aktif dengan Targer di tahun 2024 sebesar 2 % (11 Koperasi) dan terealisasi sebesar 1,7 % (10 koperasi) dengan tingkat capaian 85 %. Pada sasaran ini tidak mencapai target ini disebabkan karena beberapa hal yaitu:

- a. Manajemen yang kurang efektif, seperti perencanaan dan pengelolaan keuangan yang buruk sehingga menghambat perkembangan koperasi;
- b. Kurangnya partisipasi anggota juga memperburuk kondisi ini, karena koperasi membutuhkan keterlibatan anggota untuk tumbuh
- c. Pendanaan yang terbatas dan kurangnya inovasi membuat koperasi kesulitan bersaing dan beradaptasi dengan perubahan
- d. Persaingan dengan sektor swasta dan ketidakstabilan ekonomi juga menjadi faktor eksternal yang memperburuk kondisi koperasi keterbatasan anggaran yang tersedia menjadi salah satu alasan yang berdampak pada terbatasnya cakupan capaian pada indikator ini.

Untuk mencapai target nilai PDRB perkapita Lombok Barat, terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa depan, yaitu:

- a. Pembentukan inovasi pelatihan industri untuk menumbuhkan daya inovasi dan kreasi serta kemampuan berusaha bagi pelaku usaha bidang industri khususnya dengan memperhatikan potensi lokal daerah. Selain itu, senantiasa melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan terpadu satu pintu, Dinas Kesehatan, MUI dan Instansi terkait lainnya, BPOM.
- b. Pembinaan/penyuluhan/pendampingan industri lebih diarahkan pada penciptaan industri-industri baru namun tidak mengabaikan industri yang sudah ada, khususnya dalam pemberian bantuan sarana industri.
- c. Peningkatan pemanfaatan pasar on-line untuk memperluas jaringan usaha dan menumbuhkan kecintaan terhadap produk dalam daerah dan
- d. Peningkatan pemahaman melalui sosialisasi kepada pelaku industri/usaha mengenai mekanisme pembuatan izin usaha, sertifikasi halal, dan standardisasi produk lainnya agar produk local IKM dapat bersaing dan memiliki peluang pasar yang lebih baik. Dan senantiasa dilakukan pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan kapasitas aparatur penyuluh/Pembina industri.
- e. Peningkatan kemitraan atau kerja sama antara Pemda dengan daerah lain yang memiliki potensi produksi komoditas bahan kebutuhan yang lebih stabil. Dengan cara ini, ketersediaan barang dapat lebih terjamin, dan harga lebih terkendali.
- f. Penerapan sistem pertanian yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrem seperti rumah kaca, irigasi tetes, atau teknik pertanian hidroponik yang dapat mengurangi ketergantungan pada cuaca.
- g. Peningkatan extensifikasi atau perluasan luas tanam komoditi tanaman pangan Mengoptimalkan penyediaan sarana produksi (Benih, pupuk dan obat-obatan)
- h. Peningkatan Pembangunan dan pemeliharaan prasarana pertanian (jaringan irigasi, embung, jalan usaha tani, dll) dan Mengoptimalkan kegiatan penyuluhan pertanian untuk mendiseminasikan inovasi baru kepada petani sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan.
- i. Peningkatan kapasitas petani untuk melakukan peremajaan tanaman dengan mengoptimalkan penyediaan bibit unggul terutama untuk tanaman buah-buahan secara mandiri maupun suwadaya. Meminimalisir resiko usaha tani tanaman hortikultura dengan menjamin ketersediaan pupuk dan obat-obatan.
- j. Peningkatan kegiatan penyuluhan pertanian untuk mendiseminasikan inovasi baru (Penataan Kebun dan Pemeliharaan Tanaman) kepada petani sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman Hortikultura.

- k. Peningkatan penyediaan bibit unggul terutama untuk tanaman tahunan seperti kopi, kakau, kelapa, dan mente. Mengoptimalkan penyediaan dan pemeliharaan prasarana produksi perkebunan seperti jaringan irigasi dan jalan usaha tani
- l. Mengoptimalkan kegiatan penyuluhan pertanian untuk mendiseminasikan inovasi baru kepada petani sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman Hortikultura.
- m. Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan pengendalian organisme pengganggu tanaman terpadu kepada petani pekebun serta penyediaan sarana prasarana pengendalian OPT Perkebunan.
- n. Peningkatan sarana dan prasarana (obat-obatan), dan Pencatatan Hasil Kawin Alam dan Inseminasi Buatan
- o. Peningkatan KIE melalui kegiatan penyuluhan pertanian untuk mendiseminasikan inovasi baru kepada peternak sebagai salah satu upaya
- p. Peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada wisatawan, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga fasilitas wisata lainnya. Selain itu, membangun kerjasama dengan pihak terkait, seperti industri pariwisata dan komunitas lokal, untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman wisatawan. Selanjutnya mengembangkan SDM yang kompeten dalam bidang pariwisata untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada wisatawan.
- q. Peningkatan kinerja pada sektor kunjungan pariwisata dengan mengadakan event-event di setiap destinasi wisata yang ada di Lombok Barat sehingga semakin menarik minat wisatawan untuk berkunjung.
- r. Peningkatan kerjasama dengan pihak terkait, seperti industri kreatif, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal, untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas program pelatihan.
- s. Peningkatan aksesibilitas dan kemudahan dalam mengikuti proses sertifikasi, misalnya dengan menyediakan informasi lengkap tentang persyaratan dan prosedur yang harus diikuti, dan memperkuat kerjasama dengan lembaga sertifikasi untuk menyediakan program sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku.
- t. Peningkatan pembinaan dan pendampingan pada kelompok perikanan terutama yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pemberian bantuan sarana prasarana produksi perikanan, Fasilitasi Bantuan dan Modernisasi Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan, bimtek terkait kecakapan nelayan dan perbaikan alat tangkap.
- u. Intensifikasi dan ekstensifikasi Budidaya.
- v. Peningkatan penggunaan pakan mandiri untuk menekan biaya operasional
- w. Program bantuan pembuatan sertifikat tanah nelayan supaya bisa di manfaatkan sebagai agunan oleh nelayan untuk mengakses modal di Bank, dan Kemandirian Usaha Yang di Tunjang Kemudahan Dalam Akses Permodalan dan Kemitraan

- x. Pengembangan wirausaha baru, memberikan pendampingan, konsultasi dan pembinaan kepada UMKM agar lebih berkembang sesuai tuntutan perkembangan zaman
- y. Peningkatan kapasitas melalui bimbingan, pelatihan dan sosialisasi kepada pelaku UMKM dan mendorong UMKM untuk melakukan kemitraan dengan pihak lain, serta memberikan Bantuan Peralatan bagi Para Pelaku UMKM

➤ NILAI REALISASI INVESTASI



Nilai realisasi investasi dibagi menjadi 2 yaitu Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan masing-masing perolehan persentase capaian 10.05 % dan 144.66%. Penanaman Modal Asing (PMA) tidak pernah mencapai target karena merupakan kewenangan Pusat sesuai Perka BKPM No. 5 Tahun 2021 dan banyak Investor terutama PMA hanya mendirikan perusahaan untuk mendapatkan izin tinggal di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan ketimpangan capaian yang sangat besar diantara kedua indikator tersebut.

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan pencapaian target kinerja terutama pada PMA, yaitu

- a. Masih minimnya data potensi investasi yang akurat, dan belum tersaji dengan baik.
- b. Peningkatan kuantitas pelaksanaan promosi investasi
- c. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik sesuai SPP (Standar Pelayanan Publik).
- d. Masih lemahnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan dinas terkait terhadap investor.
- e. Kurangnya kesadaran para investor dalam melaporkan perkembangan usahanya.
- f. Untuk PMA sudah bukan merupakan kewenangan daerah/Kabupaten melainkan diambil alih oleh Kementerian Investasi berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.

Tahun 2024 Kementerian Investasi/Kepala BKPM RI telah memberikan bantuan pendanaan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik fasilitas

penanaman modal berjumlah Rp. 585.146.850 yang peruntukannya digunakan untuk kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan Pengawasan Penanaman Modal yang bertujuan untuk tercapainya target realisasi investasi sehingga kegiatan investasi di daerah dapat tumbuh dan berkembang dalam memajukan daerah, membuka lapangan usaha dan menciptakan lapangan kerja baru serta menambah pendapatan/*income* bagi peningkatan perekonomian di daerah.

Pada akhir tahun 2024, Pemda Lombok Barat yang dalam hal ini Bersama DPMPTSP telah meresmikan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lombok Barat. MPP bertujuan untuk mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, kepastian dan keamanan pelayanan; meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha; dan peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. Kegiatan yang diresmikan oleh wakil presiden RI ini menjalankan pelayanan yang berasal dari 17 perangkat daerah lingkup Kabupaten Lombok Barat, dan 10 lembaga di luar Pemda. 17 perangkat daerah tersebut adalah: 1.Layanan OSS RBA (DPMPTSP) 2.Layanan PKKPR, Rekomendasi Tata ruang & PBG (DPUPR) 3.Alih Fungsi Lahan (Dinas Pertanian) 4.Persetujuan Lingkungan Hidup (DLH) 5.Pengesahan Site Plan Perumahan (DISPERKIM) 6.Rekomendasi Izin Sektor Kesehatan (DIKES) 7.Rekomendasi Izin Sektor Perdagangan (DISPERINDAG) 8.Rekomendasi Izin Sektor Tenaga Kerja (DISNAKER) 9.Rekomendasi Izin Sektor Telekomunikasi (DISKOMINFO). Dan 10 layanan yang berasal dari lembaga di luar Pemda adalah: 1.Layanan PT. Air minum Girimenang 2.Layanan Pertek Pertanahan (ATR-BPN) 3.Layanan NPWP (Kantor Pajak Pratama Mataram Timur) 4.BPJS Kesehatan 5.BPJS Ketenagakerjaan 6.Retorative Justice Kejaksaan Negeri Mataram 7.Layanan Konsultasi & Desain Rumah (Balai Pelaksana Perumahan NTB) 8.Layanan SIM (Polres Lobar) 9.Layanan Perbankan (BANK NTB Syariah) 10.Layanan Kementrian Hukum dan HAM

Pelayanan yang awalnya berada di Perangkat Daerah dan Lembaga/kantor masing-masing, dengan adanya MPP semua menjadi terpusat. SOP yang dipersingkat, persyaratan yang dimudahkan dan kejelasan informasi yang diperoleh menjadi standar awal yang dimiliki oleh MPP, yang selanjutnya akan terus dilakukan *update*-ing guna kepuasan penerima layanan.

Terkait dengan nilai realisasi investasi, terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa depan, yaitu:

- a. Peningkatan jumlah layanan perizinan/non perizinan dalam MPP
- b. Peningkatan kompetensi aparatur yang menangani pelayanan dalam bimbingan dan pelatihan teknis tentang pelayanan perizinan bidang penanaman modal.
- c. Pendampingan kepada pelaku usaha melalui kegiatan pelayanan bergerak gunamenjangkau pelaku usaha di wilayah Kabupaten Lombok Barat
- d. Mengoptimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan dan realisasi anggaran secara berkala, serta mengkomunikasikan semua

hambatan dan permasalahan yang ditemui dalam melaksanakan masing-masing kegiatan dan berdiskusi untuk mengupayakan solusi dalam menghadapi tantangan.

- e. Fasilitasi kepada perusahaan yang bermasalah atau mengalami kesulitan baik dalam pelaksanaan usahanya sampai dengan pelaporan kegiatannya yang berupa LKPM
- f. Perbaikan iklim investasi melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS).
- g. Penyederhanaan perizinan (pengurangan waktu, syarat, dan prosedur)
- h. Tersedianya Help Desk
- i. Implementasi perizinan secara online dengan Online Single Submission (OSS) dan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCANTIK)
- j. Digital Signature untuk percepatan dan kemudahan perizinan nonperizinan

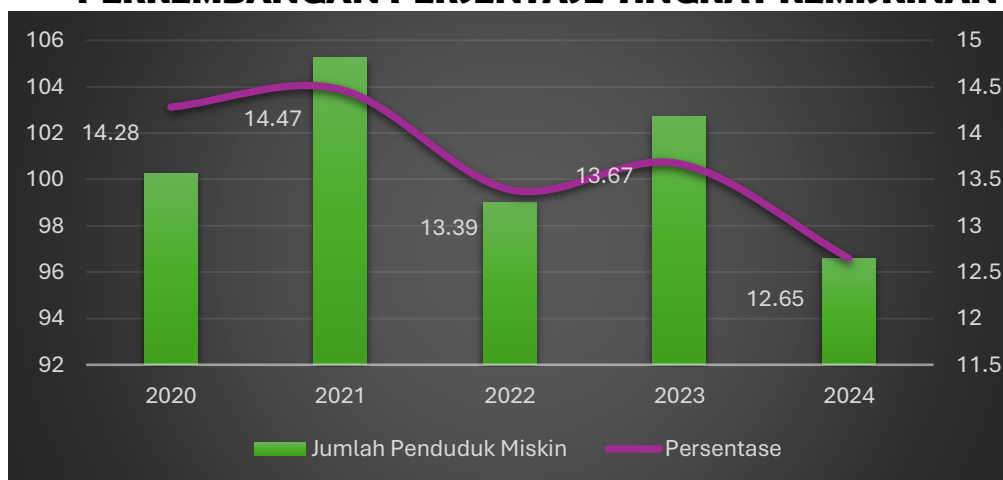
7. MENINGKATNYA KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT

➤ ANGKA KEMISKINAN



Kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensi, sehingga kemiskinan tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang tertentu. Persentase penduduk miskin Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 sebesar 12,65%, mengalami penurunan sebesar 1,02% dari Tahun 2023 dengan capaian 13,67%. Adapun perkembangan persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

GRAFIK 3.3
PERKEMBANGAN PERSENTASE TINGKAT KEMISKINAN



Sumber : Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024

Penurunan presentase kemiskinan disebabkan oleh terlaksananya program-program penanggulangan kemiskinan dengan baik. Salah satunya adalah program pemberian bantuan yang telah dilaksanakan tepat waktu dan pembaruan data intervensi bantuan seperti data P3KE dan DTKS menyebabkan program pemberian bantuan menjadi lebih tepat sasaran. Selain itu penurunan laju inflasi menyebabkan peningkatan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Program-program penanggulangan kemiskinan daerah yang sudah tertuang pada dokumen strategi penanggulangan kemiskinan untuk tahun 2024 adalah seluruh program dan kegiatan beserta alokasi belanja yang menunjang program penanggulangan kemiskinan seperti tertuang pada tabel berikut.

TABEL 3.15
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
KABUPATEN LOMBOK BARAT MELALUI PROGRAM
NASIONAL DAN PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI NTB
TAHUN 2024

	<i>Program</i>	<i>Jenis Transfer</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Jumlah Penerima Manfaat</i>	<i>Jumlah Bantuan (Rp)</i>	<i>Kementerian /PD Pelaksana</i>
Nasional	1. Bantuan Sosial Pangan (Penyaluran CPP)	Bantuan CPP (Beras)	PBP (Penerima Bantuan Beras)	91.866 PBP x 4 Tahap	-	Badan Pangan Nasional / BULOG
	2. Bantuan Sosial Pangan (Bansos Sembako)	Voucher ke rekening KPM	KPM Sembako	70.482 KPM x 12 Bulan	169.158.000.000	Kemensos RI / Dinas Sosial Lobar
	3. Sembako Adaptif dan YAPI	Voucher ke rekening KPM	KPM Sembako	1.125 KPM x 12 Bulan	2.700.000.000	Kemensos RI / Dinas Sosial Lobar
	4. Program Keluarga Harapan (PKH)	Voucher ke rekening KPM	KPM	42.367 x 12 Bulan	111.644.280.000	Kemensos RI / Dinas Sosial Lobar
	5. Program Indonesia Pintar (PIP)	Transfer ke rekening	Pemegang KIP / Siswa (keluarga kurang mampu)	36.103	106.335.500.000	Kemendikbud RI / Dinas Pendidikan Lobar

Sumber : Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024

- Program Penanggulangan Kemiskinan untuk Pemberdayaan

Pemetaan program-program penanggulangan kemiskinan daerah yang dirancang oleh pemerintah daerah yang sarasannya adalah kelompok dan komunitas di Kabupaten Lombok Barat dengan tujuan untuk memberdayakan

kelompok dan komunitas untuk menunjang program nasional pemberdayaan masyarakat, seperti pada Tabel berikut.

TABEL 3.16
PEMETAAN PROGRAM UNTUK PEMBERDAYAAN DI DAERAH
TAHUN 2024

	<i>Program/Kegiatan/ Sub kegiatan</i>	<i>Jenis Transfer</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Jumlah Penerima Manfaat</i>	<i>Jumlah Anggaran (Rp.)</i>	<i>PD Pelaksana</i>
<i>Daerah</i>	1. Program Kawasan Permukiman	Swakelola	Masyarakat	78 unit	1.807.072.200	Perkim
	2. Program Pengembangan Perumahan	Swakelola	Masyarakat	1 unit	3.164.045	Perkim
	3. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Swakelola	Kelompok Ekonomi Perikanan	1 unit	1.717.250	Dislutkan
	4. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Swakelola	Kelompok Ekonomi Perikanan	4 Kelompok	380.847.250	Dislutkan
	5. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Swakelola	Kelompok Ekonomi Perikanan	100 Nelayan	1.881.323.372	Dislutkan
	6. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Swakelola	Kelompok Ekonomi Perikanan	3 Kelompok	4.055.167.250	Dislutkan
	7. Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Swakelola	Kelompok Pengolah Hasil Perikanan	3 Kelompok (Pelaku Usaha)	908.570.625	Dislutkan
	8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Swakelola	Masyarakat	10 Kec. (100 kegiatan)	1.834.800.000	DP2KBP3A
	9. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan Kelompok Tani/ Ternak	Masyarakat	10 Kec.	8.752.176.338	Dinas Pertanian
	10. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Bantuan Kelompok Tani	Masyarakat	10 Kec.	4.998.202.540	Dinas Pertanian

<i>Program/Kegiatan/ Sub kegiatan</i>	<i>Jenis Transfer</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Jumlah Penerima Manfaat</i>	<i>Jumlah Anggaran (Rp.)</i>	<i>PD Pelaksana</i>
11. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Bantuan Kelompok Wanita Tani (KWT)	Masyarakat	10 Desa (15 KWT)	218.465.650	Dinas Ketahanan Pangan

Sumber : Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024

- Program Penanggulangan Kemiskinan untuk Usaha Ekonomi Kreatif

Pemetaan program-program penanggulangan kemiskinan daerah yang dirancang oleh pemerintah daerah yang sarasannya adalah Kelompok Usaha dari keluarga dan rumah tangga miskin di Kabupaten Lombok Barat dengan memberikan bantuan peralatan dan peningkatan kemampuan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan rumah tangga miskin di Kabupaten Lombok Barat serta dapat mengakses modal usahanya, ditampilkan dalam Tabel berikut

TABEL 3.17
PEMETAAN PROGRAM USAHA EKONOMI KREATIF DI
DAERAH TAHUN 2024

<i>Program/Kegiatan/ Sub kegiatan</i>	<i>Jenis Transfer</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Jumlah/ Penerima Manfaat</i>	<i>Jumlah Anggaran (Rp)</i>	<i>PD Pelaksana</i>
1. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Monitoring	Lembaga / Orang	10 Kecamatan	12.174.000	Dinsos
2. Sub. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Ke Klp. KUBE	Kelompok	24 KUBe	2.601.187.209	Dinsos
3. Pemasaran Pariwisata	Swakelola	Wisatawan dan pelaku	POKDARWIS	352.250.000	Pariwisata
4. Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Swakelola	Kelompok	6 Desa dan 6 Kelompok TKM	304.874.683	Disnaker
5. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Swakelola	IKM / UKM	17 IKM (di 10 Kec.)	1.168.676.660	Disperindag
6. Sub Kegiatan Pemberdayaan	Swakelola	Kelompok	76 Unit (di 10 Kec.)	807.120.473	Disperindag

<i>Program/Kegiatan/ Sub kegiatan</i>	<i>Jenis Transfer</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Jumlah/ Penerima Manfaat</i>	<i>Jumlah Anggaran (Rp)</i>	<i>PD Pelaksana</i>
Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Swakelola	Masyarakat	28 UMKM	1.880.833.800	Dinas Koperasi
8. Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD)	Sumber dana DD	Masyarakat	119 desa (4.269 KPM)	15.368.400.000	Desa Koordinasi DPMD

Sumber : Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024

Turunnya persentase penduduk miskin di Tahun 2024 ini adalah sebagai capaian positif intervensi yang tepat sasaran dan terkendalinya inflasi serta kenaikan upah pekerja mampu mengimbangi kenaikan laju inflasi. Capaian persentase angka kemiskinan pada Tahun 2024 ini mencapai target indikator penurunan angka kemiskinan pada Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, dimana pada Tahun 2024 target kemiskinan daerah pada 12,69%. Untuk angka kemiskinan ekstrem kabupaten/kota dihitung dari penyesuaian pengeluaran perkapita dalam PPP (*purchasing power parity*) dan penghitungan GKE (Garis Kemiskinan Ekstrem) tiap kabupaten/kota merupakan hasil perkalian rasio rata-rata pengeluaran dengan GKE Nasional. Pada tahun dasar 2011, kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai mereka yang hidup dibawah US \$1,9 PPP per hari. Dalam laporan *Poverty and Equity Brief East Asia and Pacific* (2024) dari World Bank bahwa pada tahun 2024 nilai US \$1,9 PPP = Rp.11.924,13,- per kapita per hari atau Rp.362.692,14 orang/bulan. Dengan metode tersebut berdasarkan rilis estimasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan estimasi oleh Satgas data P3KE diperoleh kemiskinan ekstrem Kabupaten Lombok Barat tahun 2023 sebanyak 8,82 ribu orang atau sekitar **1,17%** (rilis dari Satgas data P3KE), namun capaian tahun 2024 berdasarkan estimasi yang dihitung oleh BPS mengalami peningkatan jumlah kemiskinan ekstrem dibandingkan tahun 2023 menjadi 8,95 ribu orang atau **1,57%** (rilis dari BPS).

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), secara fokus mengkoordinasikan, mengontrol, mendorong sampai dengan melaporkan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah. Dengan memperhatikan kondisi Masyarakat dewasa ini dan isu strategis yang kian berkembang, dilakukan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah diantaranya:

- Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
- Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
- Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil
- Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

Langkah-langkah kebijakan penanggulangan kemiskinan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, perlindungan sosial, dan peningkatan kesempatan berusaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sementara itu terdapat pula upaya penanganan masalah gizi kurang dan kerawanan pangan bagi keluarga miskin. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin atas Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Dasar melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

a. Pelayanan Pendidikan

Pelayanan pendidikan kepada keluarga miskin bertujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh pelayanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat sekolah lanjutan pertama penuntasan wajib belajar 9 tahun yang menjadi kewenangan kabupaten. Kabupaten Lombok Barat dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun ini melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan juga kebijakan nasional melalui Bantuan Operasional Sekolah serta pemberian beasiswa bagi siswa wajib belajar untuk keluarga miskin. Melalui Kegiatan Penyelenggaraan Program Pengelolaan Pendidikan, untuk Paket A Setara SD dan Paket B setara SMP yang dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) harus dilaksanakan lebih efektif dan tepat sasaran.

b. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin bertujuan meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk miskin dengan terselenggaranya pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat miskin. Pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat dilaksanakan melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Upaya Kesehatan Masyarakat. Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui komponen pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin adalah rawat jalan tingkat pertama di Puskesmas, rawat inap tingkat pertama di Puskesmas, pelayanan gawat darurat di Puskesmas, dan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjutan di Rumah Sakit Pemerintah.

c. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Penyediaan prasarana dilakukan di daerah yang dikategorikan banyak dihuni keluarga miskin yang dilakukan dengan tujuan memberikan lapangan kerja dan perluasan lapangan usaha kepada keluarga miskin dan juga bertujuan menyediakan prasarana fisik yang mendukung kegiatan ekonomi keluarga miskin di perdesaan. Program dan Kegiatan organisasi perangkat daerah sudah banyak yang menyentuh pemenuhan prasarana untuk masyarakat miskin diantaranya pembangunan perumahan bagi rumah tidak layak huni dan prasarana dasar permukiman bagi masyarakat miskin melalui Program Kawasan Permukiman dan Program Pengembangan Perumahan.

d. Perlindungan Sosial

Dalam rangka mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak Inflasi, pada Tahun 2024 dilaksanakan beberapa program untuk mengurangi

beban masyarakat, diantaranya Bantuan Sosial Pangan (Penyaluran CPP), Bantuan Sosial Pangan (Bansos Sembako), Sembako Adaptif dan YAPI, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Program-program dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan dampak inflasi baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat/Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi NTB/APBD I, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat/APBD II sangat berpengaruh dan membantu mengurangi beban masyarakat miskin di masa pandemi global saat ini. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program-program tersebut perlu terus ditingkatkan validitas data penerima manfaat program agar tepat sasaran dan tidak terjadi polemik dan permasalahan di tingkat desa/masyarakat.

Berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat dengan pendekatan sektoral dan kewilayahan terus dilakukan dalam rangka terus menurunkan penduduk miskin sehingga dapat bermuara pada berkurangnya jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Lombok Barat. Meskipun Pemerintah daerah telah mengalokasikan sangat besar dana untuk penanggulangan kemiskinan, namun sejumlah permasalahan masih ditemui. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin atas pendidikan dan kesehatan menemui kendala pendataan dan akurasi, sementara itu penyediaan prasarana dasar menjumpai masalah kelembagaan dan akurasi sasaran penerima manfaat program. Disamping itu, permasalahan lain yang muncul adalah belum mempunyai sistem pendataan kita dalam mengukur keuntungan dan kemajuan sosial sebagai akibat dari investasi berbagai program penanggulangan kemiskinan seperti tersebut di atas.

Perlindungan sosial relatif tidak menjumpai masalah selain kebutuhan pembiayaan program yang sangat besar dibandingkan dengan program-program lain dan validasi data penerima manfaat. Peningkatan kesempatan berusaha umumnya menjumpai masalah keberlanjutan pasca program. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tindak lanjut yang diperlukan untuk program-program di tahun 2024 dan untuk penyempurnaan program di tahun 2025 di Kabupaten Lombok Barat dalam rangka menjaga konsistensi untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), serta pemanfaatan data lainnya sesuai arahan Pemerintah Pusat.
- b. Penyempurnaan arah kebijakan, pedoman pelaksanaan, dan manajemen pengelolaan program agar program-program yang berjalan di tahun 2025 dapat semakin berdampak pada peningkatan kesejahteraan penduduk miskin.
- c. Perlunya difokuskan anggaran pada kebijakan yang mampu memberikan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan penduduk miskin.
- d. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.
- e. Mengembangkan desain program yang mampu memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan penduduk miskin, dengan demikian kebutuhan

dasar penduduk miskin khususnya kesehatan dan pendidikan dapat lebih dirasakan dengan merata.

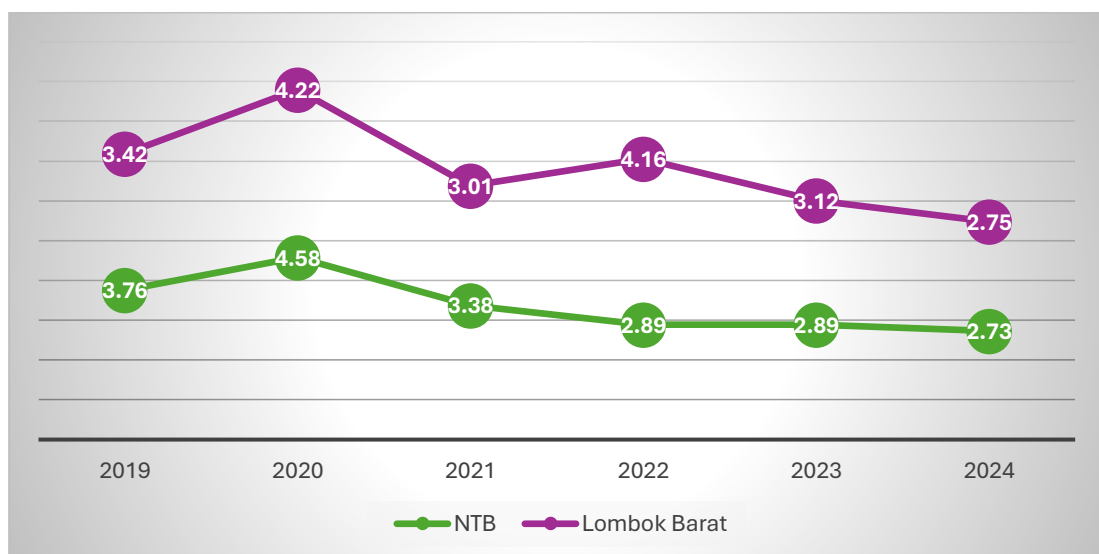
- f. Mengembangkan sistem pendataan rumah tangga miskin yang semakin akurat.
- g. Mengembangkan mekanisme komunikasi dan kerja sama yang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta Lembaga non pemerintah (kerjasama multipihak) untuk bersama-sama bersinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

➤ TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT merupakan indikator yang menunjukkan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT di Kabupaten Lombok Barat mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir di mana tahun 2010 TPT mencapai 3,14 persen, kemudian meningkat secara signifikan menjadi 5,25 persen pada tahun 2012. Ketika Indonesia mengalami bencana COVID-19, hal ini berdampak pada TPT yang kembali meningkat pada tahun 2020 yaitu sebesar 4,58 persen. Namun, pada tahun 2023, TPT Lombok Barat kembali menurun menjadi 3,12 persen. Dan tahun 2024, angka inipun kembali menurun menjadi 2,75 persen.

GRAFIK 3.4
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
TAHUN 2019-2024



Sumber: Bappeda 2024

Dalam mendukung indikator TPT, capaian program yang dilaksanakan oleh Pemda tahun 2024, dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap 3 sasaran. Faktor pendorong tercapainya indikator tersebut adalah:

- **Persentase wirausaha muda yang aktif**

Wirausaha muda yang aktif adalah wirausahawan muda yang sedang merintis usaha dan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun negara. Dilihat dari data Dinas Pemuda dan Olahraga, capaian indikator ini adalah 100%. Adapun yang menjadi faktor keberhasilannya adalah:

- a. Melakukan Pendataan terhadap wira usaha muda usia 16-30 tahun dan melaksanakan seleksi terhadap pemuda pelopor dalam Bidang Ekonomi, Seni, sosial dan budaya pemuda di Kabupaten Lombok Barat.
- b. Mengadakan Pembinaan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi wira usaha muda
- c. Memberikan penghargaan terhadap Pemuda Pelopor
- d. Memberikan bantuan kelompok pemuda berupa alat masak, sound system, pengadaan roda tiga, alat cuci mobil dan motor, alat media, alat konveksi

- **Persentase transmigran yang diberangkatkan**

Tahun 2024 sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya dimana Pemda tidak dapat memberangkatkan transmigran karena tidak adanya kuota transmigrasi dari pemerintah pusat.

- **Tingkat partisipasi angkatan kerja**

Berdasarkan laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja, capaian dari tingkat partisipasi angkatan kerja adalah 76,21% dari target 76% dengan persentase 100,28%. Capaian ini berbanding lurus dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lombok Barat yang menurun dari tahun sebelumnya. Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2024 merupakan hasil dari upaya yang telah dilakukan Pemda dalam menyediakan informasi lowongan pekerjaan dan melaksanakan pelatihan pendidikan vokasi bagi tenaga kerja. Selain itu, memberikan bantuan sarana usaha tenaga kerja mandiri melalui Program kewirausahaan dan kemitraan dengan dunia usaha

Terkait dengan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lombok Barat yang menunjukkan perkembangannya, Pemda terus berupaya melakukan peningkatan kinerja melalui beberapa aspek guna memberikan kesempatan kerja yang lebih besar kedepannya. Adapun upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- a. Peningkatan kompetensi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan menurunkan pengangguran melalui Pelatihan berbasis Masyarakat.
- b. Peningkatan Kerjasama dengan berbagai bidang industri baik di skala regional nasional maupun internasional hingga upaya membuka lowongan pekerjaan dan pelatihan kewirausahaan.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelatihan tenaga kerja dari sisi kuantitas dan kualitasnya.

- d. Pemberian bantuan berupa sarana pemuda untuk berwira usaha seperti Alat catering, Roda Tiga, Alat multimedia.
- e. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai manfaat dan peluang yang ada dalam program transmigrasi agar lebih banyak orang tertarik untuk bergabung.
- f. Koordinasi dengan pemerintah pusat mengenai kuota transmigrasi

8. MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

➤ USIA HARAPAN HIDUP (UHH)



UHH adalah perkiraan rata-rata jumlah tahun yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir. UHH dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Spesific Death Rate/ASDR*). Capaian kinerja untuk indikator UHH Kabupaten Lombok Barat adalah 72.64 dari target 67.92 dengan persentase capaian 106.95%.

UHH dipengaruhi beberapa faktor yaitu Indeks Keluarga Sehat (IKS); Persentase Sarana Kefarmasian, Perbekalan Kesehatan dan Industri Rumah Tangga yang memiliki Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang Sesuai Standar; Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar dan Kompetensi; Prevalensi Stunting; Angka Kematian Bayi (AKB); dan Angka Kematian Ibu (AKI).

Dalam mendukung indikator UHH, capaian program yang dilaksanakan oleh Pemda tahun 2024, dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap 5 sasaran. Faktor pendorong tercapainya indikator tersebut adalah:

• Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) adalah salah satu program kesehatan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan dengan cara mengunjungi setiap keluarga dengan fokus sasaran kesehatan yang lebih kecil, dengan demikian didapatkan permasalahan kesehatan di setiap keluarga sehingga dapat ditangani dengan baik oleh tenaga kesehatan. Dalam rangka pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan keluarga (PIS-PK) telah disepakati adanya 12 indikator utama untuk penanda status kesehatan sebuah keluarga. Untuk menunjukkan status kesehatan yang dimiliki sebuah keluarga. IKS dibagi menjadi tiga, yaitu keluarga sehat apabila nilai IKS ($>0,8$), keluarga pra sehat apabila nilai IKS ($0,5-0,8$), dan keluarga tidak sehat apabila nilai IKS ($<0,5$). Capaian kinerja IKS adalah 0.68 dari target 0.50 dengan persentase 136.00%.

adapun upaya yang dilakukan oleh Pemda Lombok Barat dalam mencapai target kinerjanya, yaitu:

- Peningkatan kegiatan pendampingan ke Puskesmas untuk memandu dan memotivasi Tim Puskesmas agar mengentri setiap kegiatan intervensi yg sudah dilakukan kedalam aplikasi PIS PK.
- Peningkatan evaluasi terhadap beberapa indikator PIS-PK yang menyebabkan rendahnya pencapaian IKS Kabupaten Lombok Barat
- Pelaksanaan memonitoring entrian PIS PK di Puskesmas secara berkala

Untuk selanjutnya, upaya yang dilakukan dalam rangka percepatan peningkatan IKS Kabupaten Lombok Barat adalah masih sama dengan sebelumnya yaitu dengan melaksanakan Gebrak PIS PK, yaitu dengan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada semua Puskesmas untuk memastikan bahwa semua Puskesmas sudah melakukan kegiatan intervensi dan memastikan juga bahwa setiap kegiatan intervensi sudah diinput ke dalam aplikasi PIS PK

• **Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar dan Kompetensi**

Realisasi indikator kinerja ini pada Tahun 2024 adalah sebesar 100%, sesuai dengan target yang diharapkan sebesar 100%. Artinya sebanyak 100% fasilitas Kesehatan sudah terpenuhi sumberdaya manusia kesehatannya.

Untuk mengetahui dan membandingkan jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Lombok Barat berikut disajikan gambar Jumlah Tenaga Kesehatan kurun waktu 5 tahun terakhir periode Tahun 2020 s/d 2024 sebagai berikut :

TABEL 3.18
JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2020 – 2024

<i>No.</i>	<i>Tenaga Kesehatan</i>	<i>Tahun</i>				
		2020	2021	2022	2023	2024
<i>1</i>	Dokter spesialis	25	37	45	45	61
<i>2</i>	Dokter umum	77	113	85	161	170
<i>3</i>	Dokter gigi	20	23	23	23	23
<i>4</i>	Dokter gigi spesialis	2	2	3	3	3
<i>5</i>	Perawat	633	685	700	700	849
<i>6</i>	Bidan	471	445	457	457	520
<i>7</i>	Kesehatan Masyarakat	47	36	39	39	41
<i>8</i>	Kesling	51	51	51	51	52
<i>9</i>	Gizi	98	82	109	109	131
<i>10</i>	Apoteker	17	16	25	25	25
<i>11</i>	Tenaga farmasi	73	73	85	86	113
<i>TOTAL</i>		1.514	1.563	1.622	1.699	1.988

Sumber : Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, 2024

Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar dan Kompetensi sudah mencapai target

Tahun 2024 dan Indikator ini juga sudah berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga pada akhir Renstra Tahun 2024 dengan capaian 100%. Beberapa hal yang menjadi faktor pendorong dalam tercapainya indikator ini adalah:

- a. Menerapkan pola PPK BLUD di unit pelayanan, sehingga unit pelayanan dapat membelanjakan pendapatannya untuk kebutuhan menambah tenaga.
- b. Melakukan dukungan pendanaan dari sumber dana BOK Puskesmas untuk pengangkatan tenaga kontrak di Puskesmas.

Untuk Selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk memenuhi sumber daya manusia Kesehatan di fasilitas Kesehatan yang dimiliki adalah dengan mengalihkan status tenaga kontrak menjadi tenaga PPPK sampai tahun 2024.

- **Persentase Sarana Kefarmasian, Perbekalan Kesehatan dan Industri Rumah Tangga yang memiliki Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang Sesuai Standar**

Realisasi indikator kinerja ini pada Tahun 2024 adalah sebesar 100%, sesuai dengan target yang diharapkan sebesar 100%. Artinya sebanyak 100% sarana kefarmasian, perbekalan kesehatan dan industri rumah tangga yang memiliki sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang sesuai standar. Beberapa hal yang menjadi faktor pendorong dalam tercapainya indikator ini adalah:

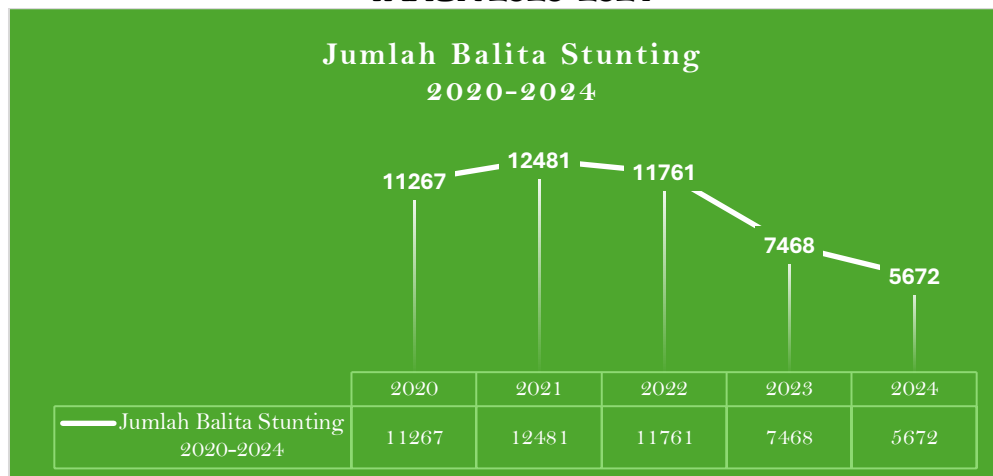
- a. Dukungan pendanaan dari BOK POM yang dapat menjangkau lebih banyak industri rumah tangga.
- b. Meningkatnya peran lintas sektor dalam meningkatkan pertumbuhan industri rumah tangga

Untuk Selanjutnya, upaya yang dilakukan untuk memenuhi sarana kefarmasian, perbekalan kesehatan dan industri rumah tangga yang memiliki sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang sesuai standar adalah dengan terus meningkatkan monitoring dan melakukan bimbingan teknis terhadap fasilitas yang ada.

- **Prevalensi Stunting**

Angka stunting diperoleh dari hasil penimbangan anak di Posyandu setiap bulannya. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat setiap tahunnya melakukan bulan penimbangan anak di Posyandu, yang dilakukan setiap bulan. Realisasi indikator kinerja Prevalensi Stunting pada Tahun 2024 adalah sebesar 9.74%, lebih tinggi dibandingkan dengan target yang diharapkan sebesar 13%. Sementara itu untuk capaian kinerja untuk indikator Prevalensi Stunting adalah sebesar 125.08%. Berikut gambaran Trend Jumlah Balita stunting Tahun 2020 dan 2024:

GRAFIK 3.5
TREND JUMLAH BALITA STUNTING DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2020-2024



Sumber: LAKIP DIKES 2025

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa kasus stunting di Kabupaten Lombok Barat selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami trend yang cenderung mengalami penurunan. Kalau melihat trend kasus stunting ini mulai didengungkan menjadi masalah kesehatan pada Tahun 2020. Pendanaan dan program khusus untuk mengatasi kasus stunting kemudian difokuskan terus menerus sampai saat ini. Target nasional kasus stunting menurut RPJMD pada Tahun 2024 harus turun sebesar 14%. Dari data terakhir menunjukkan kasus stunting pada Bulan Desember Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Barat sudah mencapai sebesar 9.74% sudah melebihi dari target RPJMD.

Dalam penanganan kasus stunting, Dinas Kesehatan tentunya tidak dapat bekerja sendiri, namun harus melibatkan lintas sektor dan lintas program. Beberapa program intervensi kasus stunting telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dimana intervensinya meliputi intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik merupakan intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan berkontribusi pada 30% penurunan kasus stunting. Kerangka kegiatan intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan pada sektor kesehatan dimulai dari masa kehamilan ibu hingga melahirkan balita. Beberapa bentuk kegiatan yang termasuk dalam kegiatan intervensi gizi spesifik, yaitu pemberian makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil, pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil, Inisiasi Menyusui Dini (IMD), pemberian ASI eksklusif, pemberian ASI didampingi oleh pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) pada usia 6-24 bulan, dan memberikan imunisasi lengkap pada anak.

Sementara itu intervensi kasus stunting yang lebih besar kontribusinya justru pada intervensi gizi sensitif yang memberikan kontribusi sebesar 70% penurunan kasus stunting. Intervensi gizi sensitif dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan. Kegiatan terkait intervensi gizi sensitif dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang umumnya makro dan

dilakukan secara lintas Kementerian dan Lembaga. Beberapa bentuk kegiatan yang termasuk dalam intervensi gizi sensitif, yaitu menyediakan dan memastikan akses pada air bersih dan sanitasi, menyediakan akses ke layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB), memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua, dan memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja. Sehingga pada tahun terakhir RPJMD 2019-2024 prevalensi stunting tercapai 9.74% jauh melebihi target RPJMD sebesar 14%.

Terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh Pemda Lombok Barat dalam menurunkan Prevalensi stunting di tahun 2024 adalah:

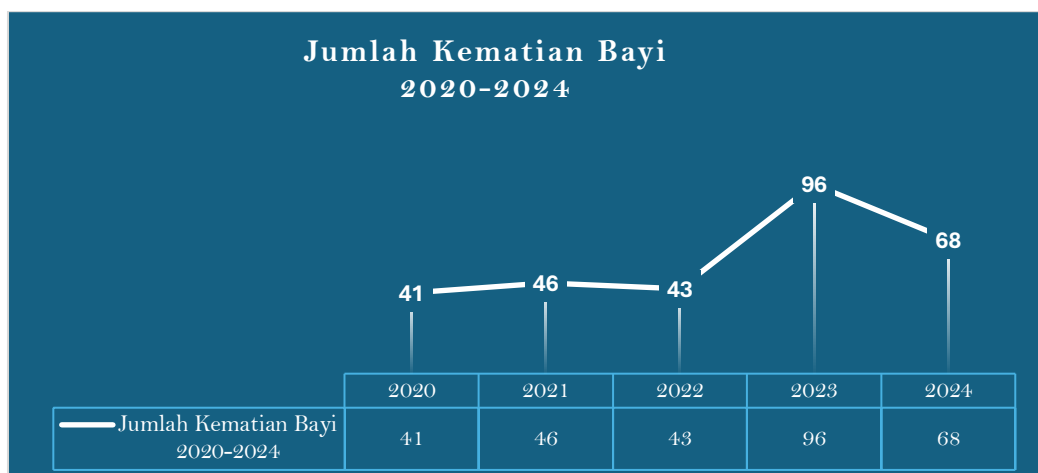
- a. Melengkapi peralatan Antopomenter di Posyandu.
- b. Melakukan Kalibrasi peralatan posyandu sehingga pengukuran status gizi lebih akurat.
- c. Menyediakan PMT Lokal untuk balita Kurang Gizi selama 90 hari makan
- d. Menyediakan PMT Lokal untuk Ibu Hamil KEK selama 120 hari makan
- e. Pemberdayaan CSR dari pengusahaan yang berada di Kabupaten Lombok Barat untuk untuk membantu dalam penyediaan sumber makanan tinggi protein (protein hewani) kepada lokus yang sudah ditentukan Dinas Kesehatan.

Untuk selanjutnya, upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam menekan angka stunting adalah dengan menyediakan PMT Lokal untuk Balita Gizi Kurang, Eradikasi Pemberian Protein Tinggi pada Keluarga Beresiko Stunting, dan Pemberian Diet Khusus Balita Stunting dengan susu Nusa F-100. Serta melakukan Deteksi dini dari ibu hamil sehingga tidak terjadi kasus stunting baru (Zero New Stunting).

- **Angka Kematian Bayi (AKB)**

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang Kesehatan. Realisasi indikator kinerja Angka Kematian Bayi pada tahun 2024 adalah sebesar 5.36 per 1.000 Kelahiran Hidup, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan target yang diharapkan sebesar 2,6 per 1.000 Kelahiran Hidup. Berdasarkan laporan dari Puskesmas, jumlah kasus kematian bayi di Kabupaten Lombok Barat selama Tahun 2024 adalah 68 kasus. Selengkapannya gambaran jumlah kasus kematian bayi di wilayah kerja Puskesmas se Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada gambar berikut,

GRAFIK 3.6
TREND JUMLAH KEMATIAN BAYI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2020-2024



Sumber: LAKIP DIKES 2025

Dari grafik diatas diketahui bahwa Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Lombok Barat selama 5 tahun terakhir mengalami trend fluktuatif, namun masih dibawah target yang diharapkan. Pada tahun 2020 hingga tahun 2022 AKB fluktuatif dan pada Tahun 2023 meningkat menjadi 96 Kasus dan pada tahun 2024 Angka Kematian Bayi Kabupaten Lombok Barat menurun menjadi 68 kasus. Indikator ini hanya mencapai - 6.20% dan tidak mencapai target Akhir RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan. Adapun yang menjadi faktor penghambat Penyebab Kasus kematian Bayi di Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut.

- a. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebesar 27% dan kelainan bawaan sebesar 25%. Kedua penyebab ini menunjukkan pentingnya intervensi sejak masa kehamilan melalui pemeriksaan kehamilan rutin (ANC) dan perbaikan status gizi ibu untuk mencegah bayi lahir dengan berat badan rendah atau kelainan bawaan
- b. Sepsis 16% dan asfiksia neonatal 16%, mengindikasikan perlunya peningkatan layanan persalinan aman, sanitasi, serta penanganan cepat terhadap infeksi dan kegagalan pernapasan pada bayi.
- c. pneumonia (7%), kelainan jantung (5%), dan kategori lain-lain (4%). Hal ini menunjukkan perlunya penguatan fasilitas kesehatan, deteksi dini, serta pemberian imunisasi yang memadai. Data ini menggarisbawahi pentingnya akses kesehatan yang merata, edukasi kepada masyarakat, dan penguatan program kesehatan ibu dan bayi untuk menurunkan angka kematian bayi.

Dari hambatan di atas, berikut adalah Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa depan.

- a. Mengatasi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Untuk mengurangi risiko kematian bayi akibat BBLR, diperlukan upaya peningkatan gizi ibu hamil melalui pemenuhan kebutuhan zat besi, asam folat, dan protein selama kehamilan. Pemeriksaan kehamilan rutin (ANC) harus dilakukan untuk memantau pertumbuhan janin dan mendeteksi faktor risiko yang dapat

menyebabkan BBLR. Selain itu, fasilitas neonatal seperti inkubator dan NICU perlu tersedia di rumah sakit untuk menangani bayi dengan berat badan lahir rendah, disertai pelatihan tenaga kesehatan dalam menangani komplikasi yang sering terjadi pada bayi BBLR.

- b. Penanganan Kelainan Bawaan. Deteksi dini kelainan bawaan sangat penting melalui pemeriksaan USG selama kehamilan, sehingga tindakan medis dapat direncanakan sejak dini. Ketersediaan fasilitas rujukan dan tenaga ahli, seperti dokter spesialis anak dan bedah, diperlukan untuk melakukan intervensi terhadap kelainan bawaan setelah bayi lahir. Edukasi kepada ibu hamil tentang pencegahan infeksi selama kehamilan, seperti rubella, dan penghindaran paparan zat berbahaya juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi risiko terjadinya kelainan bawaan.
- c. Pencegahan dan Penanganan Sepsis Neonatal. Pencegahan sepsis neonatal dapat dilakukan dengan meningkatkan kebersihan selama proses persalinan dan perawatan bayi baru lahir untuk mengurangi risiko infeksi. Selain itu, fasilitas kesehatan harus dilengkapi dengan persediaan antibiotik esensial untuk penanganan dini sepsis pada bayi. Edukasi kepada ibu tentang tanda-tanda awal infeksi, seperti demam dan perubahan perilaku bayi, juga penting agar penanganan medis dapat dilakukan segera.
- d. Penanganan Asfiksia Neonatal. Asfiksia neonatal dapat dicegah dan ditangani melalui pelatihan tenaga medis untuk melakukan resusitasi segera setelah bayi lahir. Penyediaan alat bantu pernapasan dan fasilitas persalinan yang memadai, termasuk ruang bersalin yang dilengkapi peralatan canggih, menjadi prioritas. Selain itu, sistem rujukan yang cepat dan efisien perlu diterapkan agar bayi yang mengalami asfiksia dapat segera dirawat di fasilitas kesehatan dengan peralatan intensif.
- e. Pencegahan Pneumonia. Pneumonia pada bayi dapat dicegah melalui program imunisasi lengkap untuk melindungi bayi dari infeksi saluran pernapasan. Lingkungan yang bersih dan bebas dari polusi udara, termasuk asap rokok, sangat penting untuk melindungi bayi dari faktor pemicu pneumonia. Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama juga harus didorong, karena ASI meningkatkan daya tahan tubuh bayi terhadap infeksi dan mempercepat pemulihan jika bayi jatuh sakit.
- f. Penanganan Kelainan Jantung. Kelainan jantung bawaan perlu dideteksi sejak dini melalui fasilitas diagnostik seperti echocardiography pada bayi baru lahir atau selama masa kehamilan. Ketersediaan dokter spesialis jantung anak dan fasilitas bedah jantung sangat penting untuk menangani kasus-kasus berat yang memerlukan intervensi segera. Selain itu, penyuluhan kepada ibu hamil mengenai faktor risiko yang dapat menyebabkan kelainan jantung bawaan juga penting untuk pencegahan.
- g. Penanganan Penyebab Lain-Lain. Untuk menangani penyebab kematian bayi yang tidak spesifik, diperlukan pemantauan rutin bayi baru lahir melalui kunjungan rumah oleh bidan atau tenaga kesehatan. Peningkatan program kesehatan neonatal, seperti Posyandu, dapat memastikan bayi mendapatkan perawatan dan imunisasi tepat waktu. Selain itu, penguatan layanan kesehatan

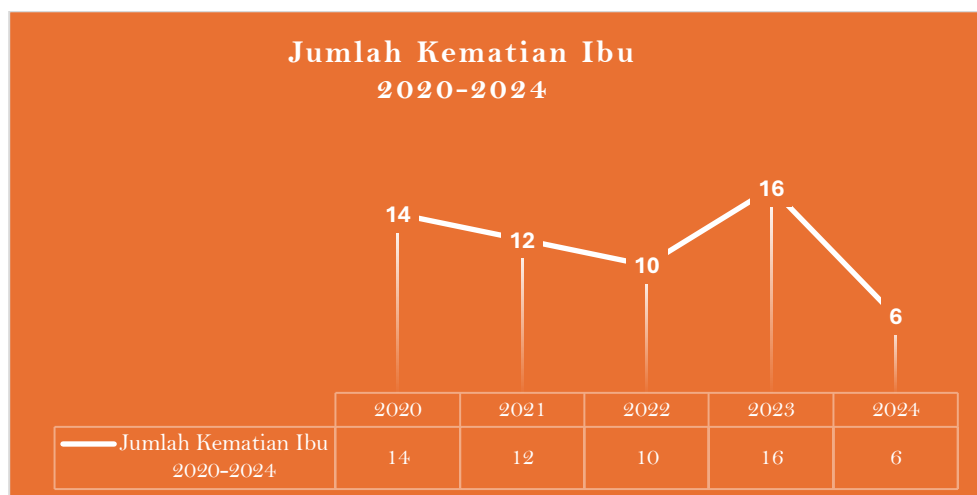
berbasis masyarakat perlu dilakukan untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dasar, terutama di daerah terpencil.

Untuk selanjutnya, upaya yang dilakukan dalam menekan angka kematian bayi adalah peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan Metode Terpadu Balita Sakit, system pemantauan kesehatan bayi baru lahir berbasis keluarga (Si Peka Bu Siska). Disamping itu Pemda akan mengadakan alat Kesehatan untuk mencegah kematian bayi baru lahir akibat Asfiksia yaitu Mix Safe Infant Blending Resuscitator untuk Puskesmas Rawat Inap terlebih dahulu, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan pelatihan Gawat Darurat Maternal neonatal dan meningkatkan Puskesmas Rawat inap dari 6 menjadi 11.

- **Angka Kematian Ibu (AKI)**

Angka Kematian Ibu menurut WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah persalinan atau berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera. Capaian kinerja AKI adalah 118,00%, Realisasi indikator pada tahun 2024 adalah sebesar 47.30 per 100.000 Kelahiran Hidup jauh lebih baik dari target yang diharapkan yaitu sebesar 57.69 per 100.000 Kelahiran Hidup. Berdasarkan laporan dari Puskesmas, jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Lombok Barat selama Tahun 2024 adalah 6 kasus. Sebagian besar kasus kematian ibu melahirkan pada Tahun 2024 Pendarahan, Jantung, Meningitis dan Non Obstetrik. Berikut gambaran trend jumlah kematian ibu di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020-2024:

GRAFIK 3.7
TREND JUMLAH KEMATIAN IBU DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2020-2024



Sumber: LAKIP DIKES 2025

Dari gambar diatas, menunjukkan bahwa jumlah kematian ibu di Kabupaten Lombok Barat selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami trend penurunan paling baik. Sempat mengalami kenaikan pada tahun Tahun 2023 sebanyak 16 kasus kematian ibu, dan kasus kematian ibu terendah hingga

mencapai 6 kasus kematian ibu pada tahun 2024. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam tercapainya indikator tersebut antara lain:

- a. Akses terhadap Pelayanan Kesehatan sangat memengaruhi dalam ketercapaian indikator ini. Seperti ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai terutama untuk Pelayanan Kesehatan Ibu hamil dan bersalin untuk memastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan yang aman dan berkualitas. Ketersediaan transportasi yang memadai, sehingga ibu hamil dapat menjangkau fasilitas kesehatan tepat waktu, terutama dalam situasi darurat. Pelayanan kesehatan yang dekat dan mudah dijangkau akan mengurangi risiko keterlambatan penanganan yang dapat meningkatkan angka kematian ibu.
- b. Pemeriksaan antenatal (ANC) secara rutin selama kehamilan adalah langkah penting untuk mendeteksi risiko atau komplikasi sejak dini. ANC memungkinkan tenaga medis memantau kondisi kesehatan ibu dan janin, memberikan imunisasi, dan menyiapkan ibu untuk persalinan yang aman. Selain itu, pemeriksaan postnatal setelah melahirkan juga penting untuk memastikan kesehatan ibu, mencegah komplikasi pascapersalinan, seperti infeksi atau perdarahan, dan memberikan edukasi tentang perawatan bayi.
- c. Fasilitas PONED diperlukan untuk menangani kasus darurat selama persalinan, seperti operasi caesar, transfusi darah, atau penanganan preeklamsia berat. Rumah sakit dan puskesmas yang berfungsi sebagai PONED harus dilengkapi dengan peralatan medis canggih dan obat-obatan esensial. Keberadaan fasilitas ini memastikan ibu dengan komplikasi persalinan mendapatkan penanganan tepat waktu, sehingga mencegah kematian yang dapat dihindari.
- d. Pencegahan komplikasi selama kehamilan dan persalinan, seperti anemia, preeklamsia, dan infeksi, sangat penting untuk menurunkan risiko kematian ibu. Program suplementasi zat besi dan folat, pemberian imunisasi tetanus, serta penanganan infeksi dini harus dilakukan secara rutin. Selain itu, ketersediaan obat-obatan esensial seperti oksitosin untuk mengatasi perdarahan postpartum dan antibiotik untuk infeksi harus dipastikan di semua fasilitas kesehatan. Dengan pencegahan dan penanganan yang efektif, risiko komplikasi dapat diminimalkan, sehingga angka kematian ibu dapat ditekan.

Untuk selanjutnya, salah satu upaya yang akan dilakukan dalam menekan angka kematian ibu adalah dengan melakukan pendekatan siklus hidup "*continuum of care*" yang dimulai dari masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, sampai dengan masa sesudah melahirkan. Serta melengkapi sarana prasarana untuk pemeriksaan ibu hamil termasuk deteksi dini seperti penyediaan ultrasonography (USG) untuk semua puskesmas.

9. MENINGKATNYA KUALITAS DAN MUTU PENDIDIKAN

Keunggulan pendidikan dalam suatu daerah dapat dilihat dari besarnya capaian indeks pendidikan yang dihitung dari angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara HLS didefinisikan sebagai rata-rata (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan penduduk sejak umur tertentu.

Rata-rata lama sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh penduduk di suatu daerah. Berarti semakin tinggi RLS dan HLS maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani dan semakin tinggi pula kualitas seseorang dalam pola pikir maupun pola tindakannya. RLS seseorang sangat dipengaruhi oleh perbedaan upah atau pendapatan antara sektor modern dengan sektor tradisional, probabilitas keberhasilan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor modern dengan adanya pendidikan, biaya pendidikan langsung yang harus ditanggung siswa/keluarganya, dan biaya tidak langsung dari pendidikan, pendapat lain juga menyimpulkan bahwa RLS dipengaruhi tingkat kemiskinan, beban ketergantungan, dan tempat tinggal.

➤ RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)



Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal. RLS menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk untuk menjalani pendidikan formal. RLS dihitung berdasarkan semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani oleh penduduk.

Capaian RLS Kabupaten Lombok Barat adalah 6,88 tahun dari target 7,19 dengan persentase 95,69%. Artinya rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas hanya mencapai bangku SD. Perolehan data tersebut berbeda jika dibandingkan dengan perolehan Provinsi NTB dan Nasional, dimana capaiannya masing-masing adalah 7,87 tahun dan 8,85 Tahun. Angka ini menunjukkan bahwa tahun 2024 capaian Pemda masih rendah, walaupun terdapat kenaikan 0,01 dari tahun sebelumnya yakni 6,87 tahun.

RLS dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Angka partisipasi kesetaraan penduduk usia 7-18 tahun; dan angka partisipasi kesetaraan penduduk usia 25 tahun ke atas. Berdasarkan data capaian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, capaian dari Angka partisipasi kesetaraan penduduk usia 7-18 tahun adalah 74% (sedang), dan angka partisipasi kesetaraan penduduk usia 25 tahun ke atas adalah 4,75% (sangat rendah). Kegagalan pencapaian target ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu diantaranya kurangnya minat masyarakat yang putus

sekolah baik pada usia sekolah maupun usia 25 tahun keatas untuk menyelesaikan pendidikannya. Selain itu, sosialisasi terkait pendidikan kesetaraan bagi masyarakat Lombok Barat yang putus sekolah belum dilaksanakan secara optimal. Secara umum, tidak tercapainya target ini disebabkan karena faktor ekonomi dimana masyarakat yang tidak bersekolah tersebut lebih memilih untuk bekerja membantu perekonomian keluarga. Sehingga menganggap bahwa pendidikan sifatnya tidak penting.

Untuk menangani kegagalan tersebut, Pemda yang dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan kiat-kiat untuk meningkatkan kinerja di masa depan, yaitu meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan. Selain itu, Pemda juga akan meningkatkan akses layanan Pendidikan Kesetaraan melalui peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan Kesetaraan serta pemberian biaya operasional peserta didik Pendidikan Kesetaraan segala rentang usia.

➤ **HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)**



HLS didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Capaian HLS Kabupaten Lombok Barat adalah 13,99 tahun dari target 14,50 tahun dengan persentase 96,48%. Capaian ini mengindikasikan bahwa harapan lama sekolah siswa yang berumur tujuh tahun pada tahun 2024 rata-rata harapan sekolahnya mencapai Tingkat Diploma 2. Meskipun demikian, angka ini tidak berbeda jauh dengan capaian Provinsi NTB dan Nasional yang masing-masing 13,98 tahun dan 13,21 tahun. Artinya, capaian Pemda Kabupaten Lombok Barat lebih tinggi daripada perolehan Provinsi dan Nasional.

Banyak faktor yang mempengaruhi HLS di Kabupaten Lombok Barat, diantaranya adalah Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan; Jumlah guru kualifikasi S1/DIV; Angka lulusan SMP; Angka lulusan SD; Angka putus sekolah SMP; Angka putus sekolah SD; Angka partisipasi kasar TK/PAUD; Angka partisipasi kasar SD/MI; Angka partisipasi kasar SMP/MTs; Angka partisipasi murni SD/MI; Angka partisipasi murni SMP/MTs.

Berdasarkan data dalam laporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat, rata2 capaian kinerja untuk faktor yang

mempengaruhi HLS di atas adalah 99% sampai dengan 110% dengan rincian sebagai berikut

TABEL 3.19
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024

<i>Faktor yang mempengaruhi HLS</i>	<i>Satuan</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian (%)</i>
Angka Partisipasi Murni SD/MI	persen	100	99.46	99.46
Angka Partisipasi Kasar SD/MI	persen	100	102.68	102.68
Angka Partisipasi Murni SMP/Mts	persen	100	99.23	99.23
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	persen	100	101.77	101.77
Angka Partisipasi Kasar TK/PAUD	persen	88	88.29	100
Angka Putus Sekolah SD	persen	0,02	0.018	110
Angka Putus Sekolah SMP	persen	0,15	0.138	108
Angka Lulusan SD	persen	100	100	100
Angka Lulusan SMP	persen	100	100	100
Jumlah Guru Kualifikasi S1/DIV	persen	86	88	102.33
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Situs	1	1	100

Sumber: LAKIP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2024

Berdasarkan data di atas, capaian atas indikator sasaran yang mempengaruhi HLS di Kabupaten Lombok Barat terbilang sangat tinggi (Permendagri 86 Tahun 2017). Meskipun demikian, target atas HLS tidak tercapai sehingga Pemda berupaya optimal agar target dapat tercapai. Adapun upaya yang telah dilakukan Pemda adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kemudahan akses layanan pendidikan jenjang Sekolah Dasar; meningkatkan pemenuhan sarana prasarana pendidikan jenjang Sekolah Dasar serta pengelolaan satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar.
- b. Memberikan kemudahan akses layanan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama; meningkatnya pemenuhan sarana prasarana pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama serta pengelolaan satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama.
- c. Meningkatkan kesadaran Masyarakat akan pentingnya pendidikan jenjang Pendidikan Sekolah Dasar bagi penduduk usia 7-15 tahun, serta pemberian Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang Sekolah Dasar sehingga seluruh Masyarakat mendapatkan layanan sekolah gratis.
- d. Meningkatkan kesadaran Masyarakat akan pentingnya pendidikan serta pemberian Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- e. Berubahnya sistem penilaian akhir bagi peserta didik jenjang Sekolah Dasar (SD) dengan dihapusnya Ujian Nasional yang digantikan menjadi Asessment Nasional dimana penilaian terhadap siswa tidak lagi mengevaluasi capaian peserta didik secara individu akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses dan hasil. Asessment Nasional juga dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, namun sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. AKM juga merupakan

langkah dari memerdekakan siswa dengan bebasnya peserta didik dari diskriminasi sistemik yang berdampak pada pembelajaran atau pemerolehan materi.

- f. Berubahnya sistem penilaian akhir bagi peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan dihapusnya Ujian Nasional yang digantikan menjadi Asessment Nasional dimana penilaian terhadap siswa tidak lagi mengevaluasi capaian peserta didik secara individu akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses dan hasil. Asessment Nasional juga dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, namun sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. AKM juga merupakan langkah dari memerdekakan siswa dengan bebasnya peserta didik dari diskriminasi sistemik yang berdampak pada pembelajaran atau pemerolehan materi.
- g. Meningkatkan kesadaran pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan S1/DIV secara swadaya sekaligus meningkatkan kompetensi individu masing-masing pendidik dan tenaga kependidikan.
- h. Telah merumuskan target indikator telat disesuaikan dengan kondisi riil cagar budaya yang telah ditetapkan secara nasional serta kemampuan keuangan daerah.
- i. Angka Partisipasi Murni SD masih belum tercapai karena semakin banyaknya orangtua yang menyekolahkan anaknya di luar wilayah Kabupaten Lombok Barat khususnya pada wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah sehingga mempengaruhi perhitungan Angka Partisipasi Murni Jenjang SD; Masih ada anak usia 7-12 tahun yang putus sekolah; dan belum tersedianya data yang valid terkait anak yang DO dan tidak pernah bersekolah sehingga menyulitkan Langkah pengambilan kebijakan strategis dalam penuntasannya
- j. Angka Partisipasi Murni SMP belum tercapai karena Semakin banyaknya orangtua yang menyekolahkan anaknya di luar wilayah Kabupaten Lombok Barat khususnya pada wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah sehingga mempengaruhi perhitungan Angka Partisipasi Murni Jenjang SD; masih ada anak usia 13-15 tahun yang putus sekolah; dan belum tersedianya data yang valid terkait anak yang DO dan tidak pernah bersekolah sehingga menyulitkan Langkah pengambilan kebijakan strategis dalam penuntasannya
- k. Angka Partisipasi Kasar TK/PAUD belum tercapai karena masih kurangnya kesadaran orangtua tentang pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan masa Golden Age (Masa Keemasan) pada perkembangan otak anak yaitu pada usia 3-6 tahun. Sehingga sangat penting menstimulasi otak anak dengan pendidikan anak usia dini.

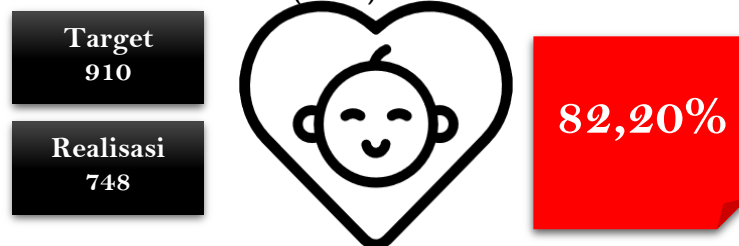
Untuk menangani faktor-faktor yang menjadi kelemahan dalam pencapaian target, Pemda melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa depan, yaitu melalui :

- a. Peningkatkan akses layanan Pendidikan Kesetaraan melalui peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan Kesetaraan serta pemberian biaya operasional peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

- b. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
- c. Peningkatan kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

10. MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

➤ KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)



KLA adalah sistem pembangunan yang mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Sistem ini melibatkan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Dalam mewujudkan Kabupaten Layak anak berdasarkan Peraturan menteri PPPA No.12 tahun 2011 dengan harus memenuhi dua (2) indikator yaitu : Indikator kelembagaan dan Indikator pemenuhan hak anak.

Dari indikator penilaian Kabupaten Layak Anak tersebut, Kabupaten Lombok Barat mendapatkan nilai/skor di tahun 2024 adalah 748, sehingga persentase capaian untuk Kabupaten Layak Anak dengan target nilai 910 adalah 82,20 %. Berikut rincian hasil penilaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Kementerian PPPA Republik Indonesia Nomor B-435/D.PHA/TK.05/8/2023 Tanggal 7 Agustus 2023 Perihal Penyampaian Hasil Evaluasi KLA Tahun 2024.

TABEL 3.20
RINCIAN HASIL PENILAIAN EVALUASI KLA
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2024

No	Indikator Penilaian	Nilai Maksimal Penilaian	Persentase Nilai Kab. Lobar	Nilai Kab. Lobar
1.	Kelembagaan	164,00	74%	124,00
2.	Kluster I : Hak Sipil dan Kebebasan	115,00	86%	133,00
3.	Kluster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alterntif	156,00	67%	104,00
4.	Kluster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	150,00	73%	109,00
5.	Kluster IV : Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	110,00	69%	75,00
6.	Kluster V : Perlindungan Khusus	205,00	68%	139,00
7.	Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak	100,00	64%	64,00
Jumlah		1.000,00	-	748,00

Sumber: LAKIP DP2KBP3A

Berdasarkan data pada Tabel 3.20, dapat dilihat bahwa target kinerja tidak tercapai. Akan tetapi, meskipun target tidak tercapai terdapat peningkatan kinerja dari tahun lalu sebesar 34.42 yaitu 713.58 menjadi 748,00, dan Predikat yang didapat oleh Kabupaten Lombok Barat meningkat dari Predikat KLA tingkat madya menjadi KLA Tingkat Nindya di tahun 2023. Peningkatan nilai dapat dilihat di tabel berikut.

TABEL 3.21
PERBANDINGAN NILAI KLA TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024
BERDASARKAN INDIKATOR PENILAIANNYA

<i>No</i>	<i>Indikator Penilaian</i>	<i>Nilai 2023</i>	<i>Nilai 2024</i>
1.	Kelembagaan	80,00	124,00
2.	Kluster I : Hak Sipil dan Kebebasan	90,00	133,00
3.	Kluster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	130,00	104,00
4.	Kluster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	95,50	109,00
5.	Kluster IV : Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	59,50	75,00
6.	Kluster V : Perlindungan Khusus	129,00	139,00
7.	Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak	70,00	64,00
<i>Jumlah</i>		654,00	748,00
<i>Predikat KLA</i>		Madya	Nindya

Sumber: LAKIP DP2KBP3A

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai pada setiap indikator penilaian KLA rata-rata meningkat dari tahun 2023 ke tahun 2024 walaupun nilai yang di dapat pada tahun 2024 tidak dapat memenuhi target pada tahun 2024. Peningkatan penilaian di setiap indikator penilaian disebabkan karena meningkatnya peran serta stakeholder yang terkait dalam penilaian/evaluasi KLA. Adapun faktor pendorong peningkatan kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Dukcapil terkait dengan kepemilikan Akta Kelahiran Anak dan KIA
- b. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan Dinas Kominfotik terkait dengan Informasi Layak Anak
- c. Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Pemukiman, dan Dinas Perhubungan terkait dengan Infrastruktur Ramah Anak, Air Minum dan Sanitasi
- d. Dinas Kesehatan terkait dengan Persalinan di Fasilitas Kesehatan, Fasyankes dengan Pelayanan Ramah Anak
- e. Dinas Sosial terkait dengan Anak dengan perilaku sosial menyimpang, penyandang disabilitas.

Terkait nilai/skor Kabupaten Layak Anak untuk Kabupaten Lombok Barat, terdapat upaya yang perlu diperhatikan untuk peningkatan kinerja di masa depan, yaitu:

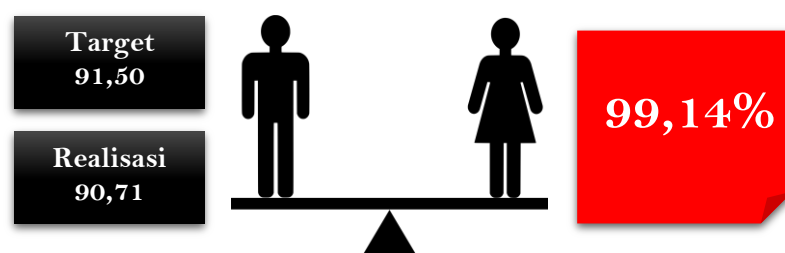
- a. Peningkatan peran serta stakeholder dalam penilaian/evaluasi KLA sesuai dengan klasternya (indikator penilaiannya);

- b. Peningkatan partisipasi anak dalam forum anak
- c. Mendorong terbentuknya Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak;
- d. Mendorong terbentuknya Satuan Pendidikan Ramah Anak (SPRA) dan Puskesmas Ramah Anak;
- e. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak;
- f. Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Kabupaten Layak Anak;
- g. Peningkatan ruang bermain ramah anak;
- h. Peningkatan partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan daerah seperti adanya musrenbang anak;
- i. Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dengan menyediakan sarana prasarana serta tenaga ahli seperti konselor dan psikolog;
- j. Peningkatan perlindungan khusus anak terkait dengan system penanganan, rumah aman dan sumber daya manusia.

Adapun yang menjadi faktor kegagalannya adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam politik, sosial, ekonomi dan budaya dan politik;
- b. Masih kurangnya perangkat daerah yang menerapkan anggaran berbasis PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender);
- c. Masih rendahnya partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan melalui musrenbang anak;
- d. Masih rendahnya kerjasama (MoU) dengan dunia usaha;
- e. Implementasi peraturan Bupati yang ada belum maksimal dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak;
- f. Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang bertujuan untuk memberikan layanan konseling dan rujukan dan di lengkapi dengan sarana prasarana serta tenaga ahli dalam hal ini konselor dan psikolog belum ada.

➤ INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)



Untuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) capaian Provinsi pada tahun 2024 adalah 91,39 berbeda 0,68 dari capaian Kabupaten Lombok Barat yaitu 90,71. Untuk capaian IPG (Indeks Pembangunan Gender) menggunakan data proyeksi BPS karena DP2KBP3A tidak mampu mengolah data sendiri sehingga menggunakan data sekunder dari BPS dari target 91,50 capaian pada tahun 2024 adalah 90,71 sehingga persentase capaian untuk tahun 2024 adalah 99,14 %.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat belum dapat mencapai target sasaran IPG tahun 2024. Adapun yang menjadi faktor penghambat, diantaranya:

- Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam politik, sosial, ekonomi dan budaya dan politik.
- Masih kurangnya perangkat daerah yang menerapkan anggaran berbasis PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender).
- Masih rendahnya kerjasama (MoU) dengan dunia usaha.
- Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang bertujuan untuk memberikan layanan konseling dan rujukan dan di lengkapi dengan sarana prasarana serta tenaga ahli dalam hal ini konselor dan psikolog belum ada.

Penguatan koordinasi menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menghadirkan peran pemerintah Daerah dalam menjawab tantangan dan permasalahan perempuan dan anak. Untuk itu, Bidang PPPA terus membangun komitmen dan memperkuat jejaring antar Organisasi Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, dan masyarakat serta menyediakan fasilitas dan layanan, khususnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Program tersebut adalah sebagai upaya mendukung pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia Lombok Barat, agar dapat menjadi SDM yang sehat cerdas dan Berbudaya serta berdaya saing sehingga kesenjangan yang sampai saat ini masih dijumpai terkait dengan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan bisa di turunkan.

Terkait dengan Indeks Pembangunan Gender tahun 2024, berikut beberapa upaya yang perlu diperhatikan untuk peningkatan kinerja di masa depan yaitu:

- Peningkatan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam Pembangunan.
- Penguatan lembaga/ jejaring PUG.
- Pelaksanaan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
- Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender
- Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya.

11. MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

➤ INDEKS KUALITAS UDARA



Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai polusi udara. Polusi udara yang meningkat akan meningkatkan nilai IKU. Semakin tinggi nilai IKU untuk suatu wilayah, udara di wilayah tersebut menjadi semakin berbahaya pula bagi kesehatan makhluk hidup.

Indeks Kualitas Udara Kabupaten dihitung setelah diperoleh data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa SO₂ dan NO₂ dari hasil pengukuran kualitas udara ambien kabupaten/kota. Pengukuran ini dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi dan perkantoran dengan metode manual passive sampler dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan. Beberapa parameter yang digunakan dalam perhitungan IKU yang umumnya terdiri dari lima pencemar utama, diantaranya bahan permukaan, oksidan/ozon di permukaan, karbonmonoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂), dan nitrogen dioksida (NO₂). Namun untuk IKLH 2023, perhitungan hanya dilakukan untuk dua parameter saja yang umumnya berasal dari kendaraan bermotor, baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat. Kedua parameter tersebut adalah NO₂ yang mewakili emisi kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar bensin dan SO₂ yang mewakili emisi dari industri dan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar lainnya yang mengandung sulfur.

Data didapatkan dengan pengambilan sample di empat lokasi seperti wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran dengan metode passive sampler yang dilakukan di beberapa lokasi di Kabupaten Lombok Barat. IKU dihitung dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar European Union Directives.

Indeks kualitas udara pencapaiannya diatas target dimana target yang ingin dicapai 88,22 tercapai 94,24 dengan kategori pencapaian dikategorikan Sangat Baik. Akan tetapi, meskipun capaiannya sangat baik, masih diperlukan beberapa upaya peningkatan kinerja di masa depan, diantaranya:

- a. Mengusulkan Pengadaan peralatan uji kualitas udara supaya Kabupaten Lombok Barat bisa melakukan pengukuran sendiri terhadap kualitas udara di Lombok Barat.
- b. Merencanakan Pelatihan SDM Laboratorium untuk operasional uji kualitas udara
- c. Melakukan pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan yang berpotensi pencemaran udara.
- d. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral khususnya dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Perumahan Permukiman dalam peningkatan kualitas udara

➤ INDEKS KUALITAS AIR SUNGAI



Indeks Kualitas Air (IKA) adalah metode untuk mengukur tingkat pencemaran air dengan membandingkan hasil sampel terhadap baku mutu air. IKA merupakan bagian dari survei kualitas air secara umum. Perhitungan kualitas air sungai untuk parameter kunci BOD, COD, DO, pH, dan TSS di sungai-sungai di Lombok Barat, dihitung berdasarkan baku mutu air. Dimana baku mutu air dipakai standar dalam menentukan air tersebut tercemar atau tidak. Melalui penghitungan ini, diharapkan kualitas sungai di Lombok Barat dapat diketahui secara kuantitatif berdasarkan standar baku mutu (parameter kunci BOD, COD, DO, pH, dan TSS) pada sungai yang dipantau. Untuk pemeriksaan kualitas air sungai dilakukan pemeriksaan kualitas Fisika dan Kualitas Kimia. Untuk kualitas fisika diukur 4 parameter yaitu parameter temperatur, DHL, kekeruhan dan residu terlarut. Untuk kualitas kimia diukur 6 parameter yaitu parameter Ph, DO, COD, BOD, Fe, dan parameter Mn. Sedangkan untuk kualitas bakteriologi air sungai, berdasarkan sifat biologi digunakan dua parameter yaitu total Coli dan E Coli. Sampai tahun 2019 parameter biologi belum dapat diperiksa karena keterbatasan tenaga dan sarana yang ada di Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat. Mulai tahun 2020 pengukuran parameter Coli dan E-Coli dilakukan untuk mendapatkan hasil pengukuran kualitas air sungai yang lebih valid.

Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Lombok Barat dilakukan 3 (tiga) kali setahun pada 11 sungai. Pada tahun 2024 ada 47 titik pemantauan yang dilakukan kolaborasi antara oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat, DLHK Propinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 memiliki angka indeks kualitas air yaitu 43,42 dan berada dalam kondisi Kurang.

Kondisi ini perlu diperhatikan dan dilakukan upaya pengelolaan terhadap usaha dan/atau kegiatan-kegiatan yang berkontribusi pada kualitas air sungai. Hal ini perlu dilakukan karena terdapatnya 22 (Dua puluh dua) titik pantau memenuhi baku mutu, 15 titik cemar ringan, 8 titik kondisi sedang dan 2 titik kategori cemar berat. Kondisi sungai di beberapa titik yang dipantau masih dibawah standar baku mutu yang ditetapkan disebabkan beberapa hal:

- Tingkat kesadaran masyarakat/Industri tentang pencegahan pencemaran sungai masih rendah
- Sungai yang dibawah standar baku mutu rata-rata berlokasi di daerah tambang yang disebabkan pembuangan limbah industri pertambangan yang tidak sesuai prosedur.

Beberapa kendala dalam Meningkatkan pemantauan kualitas lingkungan antara lain adalah keterbatasan SDM dan sarana prasarana alat laboratorium dalam pemantauan kualitas air sungai. Dalam hal ini diperlukan tanggung jawab banyak pihak dalam usaha menjaga kualitas air sungai baik dari pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Selain itu, Laboratorium Lingkungan Hidup di Kabupaten Lombok Barat belum terakreditasi dan Lembaga penyelenggara kalibrasi alat laboratorium untuk akurasi hasil pengujian yang belum ada di Nusa Tenggara Barat (NTB) sehingga harus dilaksanakan di Pulau Jawa.

Untuk menangani hambatan yang ada, Pemda berupaya dalam berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja di masa depan, diantaranya:

- Pengadaan peralatan Laboratorium lingkungan yang memadai dan peningkatan SDM laboratorium melalui diklat dan pelatihan.
- Melakukan pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan yang berpotensi pencemaran air.
- Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kualitas air sungai.

➤ INDEKS KUALITAS LAHAN



Berdasarkan SNI 7645-2010, tutupan lahan diartikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengukuran, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada areal tersebut. Menurut UU No. 4 tahun 2011, penutupan lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang buatan.

Tutupan lahan berdasarkan SNI 7645:2010 diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

- Daerah bervegetasi (hutan primer, hutan sekunder, hutan tanaman) Daerah bervegetasi merupakan Pendekatan konseptual struktur fisiognomi yang konsisten dari bentuk tumbuhan, bentuk tutupan, tinggi tumbuhan dan distribusi spasialnya. Daerah yang liputan vegetasi (minimum 4%) sedikitnya selama 2 bulan dalam 1 tahun / dengan liputan lichen/mosses lebih dari 25% (jika tidak terdapat vegetasi lain)
- Daerah tak bervegetasi Mengacu pada aspek permukaan tutupan, distribusi/kepadatan dan ketinggian /kedalaman objek. Daerah dengan total liputan vegetasi kurang dari 4% selama lebih dari 10 bulan, atau daerah dengan liputan lichens/mosses kurang dari 25% (jika tidak terdapat vegetasi berkayu herba)

Tutupan lahan hutan merupakan penutupan lahan oleh vegetasi dengan komposisi dan kerapatan tertentu, sehingga tercipta fungsi hutan antara lain mikro, tata air dan tempat hidup satwa sebagai satu ekosistem hutan. Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan klasifikasi yang telah ditetapkan hutan terbagi atas hutan primer dan hutan sekunder. Hutan primer adalah hutan yang belum mendapatkan gangguan atau sedikit sekali mendapat gangguan manusia. Sedangkan hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh melalui suksesi sekunder alami pada lahan hutan yang telah mengalami gangguan berat seperti lahan bekas pertambangan, peternakan, dan pertanian menetap.

Data Tutupan Lahan Kabupaten yang diperoleh adalah dari hasil analisis citra satelit dapat dilihat bahwa angka indeks kualitas tutupan lahan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 yaitu 49,88 dan berada dalam kondisi kurang. Komposisi tutupan lahan 80% adalah kawasan hutan dimana sejak keluarnya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat kewenangan kehutanan sudah diambil alih Pemerintah Daerah Provinsi. Hal ini harus mendapat perhatian yang sangat serius dari Pemerintah Daerah. Berbagai program/kegiatan harus dilakukan untuk menambah jumlah tutupan lahan di Kabupaten Lombok Barat. Program-program terkait pengurangan jumlah lahan kritis juga harus terus dilakukan. Terkait dengan tutupan lahan ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa depan, diantaranya:

- a. Berkoordinasi dengan Pemerintah daerah propinsi untuk meningkatkan tutupan lahan di wilayah Lombok Barat Berkoordinasi dengan lintas sektoral dalam mempertahankan luas kawasan pertanian sebagai salah satu komponen tutupan lahan.
- b. Melakukan Program kegiatan yang mendukung peningkatan tutupan lahan ditingkat Kabupaten sesuai dengan kewenangan yang ada antara lain : Kegiatan HMPI (Hari Menanam pohon Indonesia),konservasi Kawasan Esential Mangrove, Reklamasi Lahan Eks Tambang Galian Non Logam, Penanaman pohon tutupan vegetasi, dan Penanaman pohon disekitar mata air

12. MENURUNNYA RISIKO BENCANA

Risiko bencana mencerminkan konsep kejadian berbahaya dan bencana sebagai akibat dari kondisi risiko yang terus-menerus ada. Risiko bencana mencakup berbagai jenis potensi kerugian yang sering kali sulit diukur. Namun demikian, dengan pengetahuan tentang bahaya yang ada dan pola populasi serta perkembangan sosial ekonomi, risiko bencana dapat dinilai dan dipetakan, setidaknya secara umum.

Penurunan risiko bencana ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana baru dan mengurangi risiko bencana yang sudah ada serta mengelola risiko yang tersisa. Kesemuanya itu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan dan dengan demikian pada tercapainya pembangunan berkelanjutan

➤ INDEKS KETAHANAN DAERAH



Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Hasil pengukuran IKD dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana. Selain itu, dapat membantu menurunkan angka Indeks Risiko Bencana di suatu daerah meningkatkan efektivitas perencanaan dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Indeks Kapasitas Daerah diukur dengan dengan instrument atau alat ukur “Indeks ketahanan Daerah “ dan pada aplikasi inaRISK BNPB dari Target Tahun 2024 sebesar 0,68 realisasi 0,78 dan sudah diverifikasi Oleh BNPB yang sebelum sudah lolos verifikasi BPBD Provinsi NTB dengan nilai capaian sebesar 114,71%. Capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu cakupan pelayanan terhadap pencegahan, penanggulangan dan pengendalian bahaya kebakaran sesuai standar response time; dan Kapasitas Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan data pada laporan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran, capaian kinerja dari persentase cakupan pelayanan terhadap pencegahan, penanggulangan dan pengendalian bahaya kebakaran sesuai standar response time adalah 80,43% dari target 85,00% dengan persentase 94,62%.

Dalam menjalankan tugas, Dinas Pemadam Kebakaran berkoordinasi dalam *team work* untuk bekerjasama melaksanakan tugas pelayanan kedaruratan bahaya kebakaran dan bahaya lainnya. Sejalan dengan visinya “Terciptanya Rasa aman Masyarakat dari Bahaya Kebakaran”, mendorong aparat berkomitmen untuk memberikan usaha terbaik untuk keselamatan Masyarakat. Tidak hanya itu, sikap responsive dan cepat tanggap dalam menangani setiap keluhan masyarakat dalam hal pelayanan kebakaran maupun non kebakaran menjadi perhatian besar Pemda. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam mencapai target organisasi.

- a. Belum adanya data pemetaan potensi kebakaran atau Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) yang menjadi dasar penentuan jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
- b. Personil yang tersedia belum memenuhi kapasitas kualifikasi standar yang dibutuhkan.
- c. Sarana dan prasarana yang tersedia belum memenuhi standar yang dibutuhkan.

Untuk menangani hambatan tersebut, Pemda selalu berupaya memberikan yang terbaik di tengah keterbatasan anggaran. Akan tetapi untuk urusan keselamatan masyarakat, aparat akan melakukan usaha semaksimal mungkin untuk memberikan penyelamatan.

Capaian Persentase peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana adalah 100%. Artinya penanggulangan bencana di Kabupaten Lombok Barat telah tertangani secara keseluruhan dengan baik. Adapun beberapa tindakan tindakan Penanganan Kejadian Aktivasi Posko, tersedianya Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) setelah penetapan status darurat, pemberian Paket Sembako ke daerah yang terdampak (pemberian selimut , pampers ,family kit), Pembersihan material banjir, mendirikan tenda pengungsian sementara , rehabilitasi tebing sungai/pemukiman akibat longsor, berkoordinasi dengan Instansi terkait, dan Droping air bersih bagi daerah yang terdampak kekeringan.

Dalam peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana terdapat faktor-faktor yang mendorong keberhasilan target seperti kegiatan Layanan Informasi Daerah Rawan Bencana, Layanan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Layanan Penyelamatan, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana. Adapun kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis) bencana .Sosialisasi dan edukasi dan penyampaian informasi daerah rawan bencana dari target 500 orang capaiannya 500 orang.
- b. Tersedianya laporan data dan informasi kejadian bencana sebanyak 12 Laporan.
- c. Peningkatan Kapasitas Kawasan Rawan Bencana sebanyak 2 Kawasan yaitu Fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana 1 sekolah lokasi SMPN I Batulayar dan Pembentukan Daerah Siaga tsunami di Desa Buwun Mas. 3
- d. Terlaksananya Bimtek Jitupasna 2024 sebanyak 30 Orang.
- e. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota telah menerbitkan 5 Dokumen SK. Tanggap Darurat bencana yaitu Status Taggap Darurat Bencana Alam Tanah Longsor di Sesaot, Status Taggap Darurat Bencana Alam Tanah Longsor di Suranadi, Status Taggap Darurat Bencana Alam angin puting beliung di Kediri, Kuripan, Gerung, labuapi, Lembar, Sekotong, Status Tanggap Darurat Bencalam Kekeringan di Sekotong,Lembar Gerung,Kuripan, BatuLayar, Status Tanggap Darurat

Bencana Alam Cuaca Ekstrem dan Angin Puting Beliung di Kuripan, Narmada, Lembar, Sekotong.

- f. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Dari 63 Kejadian bencana sebanyak 63 sudah dilakukan tindakan penanganannya.
- g. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dari target 2500 Orang yang terdampak secara langsung dan diberikan bantuan logistik berupa paket sembako, terpal, selimut sebanyak 2500 orang.

Risiko bencana adalah kemungkinan kerugian yang dapat terjadi akibat bencana pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Kerugian tersebut dapat berupa korban jiwa, kerusakan harta benda, dan gangguan kegiatan masyarakat. Untuk itu, Pemda terus berupaya memberikan pelayanan maupun penyelamatan semaksimal mungkin walaupun dalam pelaksanaannya kerap menghadapi rintangan dan hambatan. Komitmen Pemda untuk memberikan yang terbaik, mendorong aparat untuk terus bekerja keras, tidak hanya untuk ketercapaian target tapi juga untuk kebaikan dan keselamatan Masyarakat secara luas. Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa depan adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk Relawan di tingkat desa/Kecamatan
- b. Mengembangkan Sistem Informasi Kedaruratan Bahaya Kebakaran dalam Sistem SKIK (Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran)
- c. Mengembangkan Kualitas SDM aparat
- d. Mengembangkan secara berkala sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan operasional dan lain-lainnya.
- e. Mempercepat jangkauan pelaksanaan penanggulangan bencana.
- f. Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- g. Meningkatkan profesionalitas aparaturnya dan masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana.
- h. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana
- i. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saat tidak terjadi bencana maupun saat bencana.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

TABEL 3.22
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

<i>SASARAN STRATEGIS</i>	<i>INDIKATOR KINERJA</i>	<i>KINERJA</i>			<i>ANGGARAN</i>				
		<i>TARGET</i>	<i>REALISASI</i>	<i>%</i>	<i>TARGET</i>	<i>REALISASI</i>	<i>SISA</i>	<i>%</i>	
<i>1</i>	Meningkatnya kualitas pelayanan public	IKM	90.03	91.22	101.32	196,053,886,329	181,523,004,418	14,530,881,911	92.59
<i>2</i>	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100.00	1,094,509,353,667	1,044,980,844,024	49,528,509,643	95.47
<i>3</i>	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Daerah	A (83,50)	65,22 (B)	78.11	5,548,970,357	5,404,038,975	144,931,382	97.39
<i>4</i>	Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam pengembangan wilayah	Persentase Wilayah Terhubung dengan Pusat Perekonomian	94.00	94.07	100.07	29,544,927,065	29,000,615,096	544,311,969	98.16
<i>5</i>	Meningkatnya akses infrastruktur dasar	Persentase Rumah Layak Huni	98.15	98.80	100.66	16,051,621,088	15,752,087,183	299,533,905	98.13
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	84.72	94.45	111.48	28,039,647,740	26,880,703,740	1,158,944,000	95.87

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN				
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	SISA	%	
6	Meningkatnya daya saing sektor ekonomi unggulan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	15.73	19.03	120.97	264,782,209,394	258,311,585,966	6,470,623,428	97.56
		Nilai PDRB Perkapita	15.56	15.10	97.04	8,353,542,400	7,692,099,152	661,443,248	92.08
		Nilai Realisasi investasi			77.355	731,861,920	563,389,600	168,472,320	76.98
		Penanaman Modal Asing (PMA)	169.27	17.01	10.05				
		Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN Fasilitas)	784.93	1135.46	144.66				
7	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Angka Kemiskinan	12.69	12.65	100.32	26,461,227,569	26,190,480,754	270,746,815	98.98
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2.86	2.75	103.85	21,571,501,437	21,474,987,162	96,514,275	99.55
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	67.92	72.64	106.95	141,800,016,551	131,350,526,849	10,449,489,702	92.63
9	Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	7.19	6.88	95.69	169,008,085,960	164,075,062,568	4,933,023,392	97.08
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	14.50	13.99	96.48	2,406,370,445	2,243,292,107	163,078,338	93.22
10	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	910.00	748.00	82.20	149,999,800	143,602,298	6,397,502	95.73
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91.50	90.71	99.14	10,201,898,714	9,959,834,873	242,063,841	97.63

<i>SASARAN STRATEGIS</i>	<i>INDIKATOR KINERJA</i>	<i>KINERJA</i>			<i>ANGGARAN</i>			
		<i>TARGET</i>	<i>REALISASI</i>	<i>%</i>	<i>TARGET</i>	<i>REALISASI</i>	<i>SISA</i>	<i>%</i>
11 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	88.22	94.24	106.82	12,036,028,566	11,805,332,795	230,695,771	98.08
	Indeks Kualitas Air Sungai	42.60	43.42	101.92				
	Indeks Kualitas Lahan	46.50	49.88	107.27				
12 Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0.68	0.78	114.71	5,439,261,342	5,418,100,303	21,161,039	99.61
TOTAL					2.032.690.410.344	1,942,769,587,863	89,920,822,481	95.58

3.4. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2024

TABEL 3.23
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2024

<i>SASARAN STRATEGIS</i>	<i>INDIKATOR KINERJA</i>	<i>% KINERJA</i>	<i>ANGGARAN</i>			
			<i>TARGET</i>	<i>REAL</i>	<i>EFISIENSI</i>	<i>%</i>
1 Meningkatkan kualitas pelayanan public	IKM	101.32	196,053,886,329	181,523,004,418	14,530,881,911	8.00%
2 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	100.00	1,094,509,353,667	1,044,980,844,024	49,528,509,643	4.74%
3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Daerah	78.11	5,548,970,357	5,404,038,975		Target kinerja tidak tercapai
4 Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam pengembangan wilayah	Persentase Wilayah Terhubung dengan Pusat Perekonomian	100.07	29,544,927,065	29,000,615,096	544,311,969	1.88%
5 Meningkatnya akses infrastruktur dasar	Persentase Rumah Layak Huni	100.66	16,051,621,088	15,752,087,183	299,533,905	1.90%
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	111.48	28,039,647,740	26,880,703,740	1,158,944,000	4.31%
6 Meningkatnya daya saing sektor ekonomi unggulan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	120.97	264,782,209,394	258,311,585,966	6,470,623,428	2.50%
	Nilai PDRB Perkapita	97.04	8,353,542,400	7,692,099,152		Target kinerja tidak tercapai
	Nilai Realisasi investasi	77.355	731,861,920	563,389,600		Target kinerja tidak tercapai

<i>SASARAN STRATEGIS</i>		<i>INDIKATOR KINERJA</i>	<i>% KINERJA</i>	<i>ANGGARAN</i>		
				<i>TARGET</i>	<i>REAL</i>	<i>EFISIENSI</i>
		a. Penanaman Modal Asing (PMA)	10.05			
		b. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN Fasilitas)	144.66			
7	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Angka Kemiskinan	100.32	26,461,227,569	26,190,480,754	270,746,815
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	103.85	21,571,501,437	21,474,987,162	96,514,275
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	106.95	141,800,016,551	131,350,526,849	10,449,489,702
9	Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	95.69	169,008,085,960	164,075,062,568	Target kinerja tidak tercapai
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	96.48	2,406,370,445	2,243,292,107	Target kinerja tidak tercapai
10	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	82.20	149,999,800	143,602,298	Target kinerja tidak tercapai
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	99.14	10,201,898,714	9,959,834,873	Target kinerja tidak tercapai
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	106.82	12,036,028,566	11,805,332,795	230,695,771
		Indeks Kualitas Air Sungai	101.92			
		Indeks Kualitas Lahan	107.27			
12	Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	114.71	5,439,261,342	5,418,100,303	21,161,039
<i>TOTAL</i>				2.032.690.410.344	1,942,769,587,863	83,601,412,458
						4,30%

Penerapan akuntabilitas keuangan diartikan sebagai penerapan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dimana pertanggungjawaban ini mengenai laporan keuangan yang disajikan yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Akuntabilitas keuangan ini disusun untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan Pemda. Tahun 2024 yang mana merupakan tahun terakhir RPJMD Periode tahun 2020-2024, Pemda Lombok Barat telah melaksanakan seluruh program sasaran yang tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahun (RPJMD) dan dokumen rencana tahunan.

Untuk menjalankan 12 Sasaran Daerah, Tahun 2024 Pemda Lombok Barat telah menghabiskan anggaran **1,942,769,587,863** dari target **2.032.690.410.344** dengan serapan **95.58%**. Berdasarkan tabel 3.22, tercatat sisa anggaran sebesar **Rp.89,920,822,481**. Dalam sisa anggaran tersebut terdapat efisiensi sebesar **Rp. 83,601,412,458** atau **4,30%** dari 9 sasaran strategis (13 indikator kinerja utama) daerah yang telah tercapai lebih dari 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi walaupun masih ada beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan penggunaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan kegiatan menggunakan harga yang maksimal yang tertulis dalam DPA, sepanjang masih dimungkinkan untuk menggunakan harga di bawah standar DPA namun tidak mengurangi kualitas dan klasifikasi yang diinginkan tetap bisa terpenuhi.

Bab 4

INOVASI DAERAH

Bab 4 berisi:
1. Inovasi Daerah

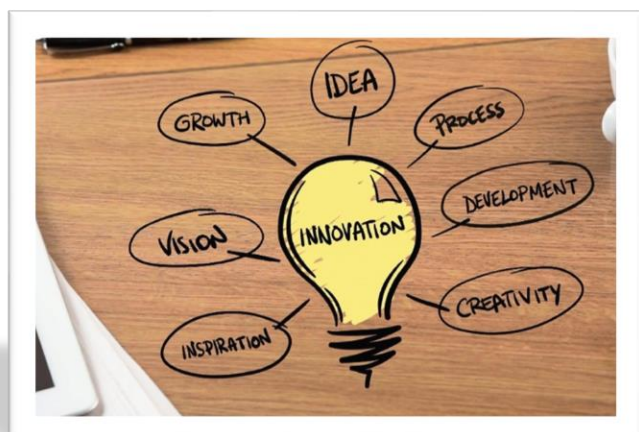
Kabupaten Lombok Barat merumuskan program pembangunan daerah dengan mekanisme program prioritas yang memayungi beberapa program perangkat daerah yang mendukung ketercapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Program prioritas atau Indikator Kinerja Utama akan dijabarkan melalui

program unggulan yang dilaksanakan masing – masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat. Selain itu, Program Unggulan Kabupaten Lombok Barat juga tentunya memiliki sinergitas dengan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat demi ketercapaian tujuan bersama. Hal ini juga dalam upaya mendorong seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk berinovasi dan berprestasi.

4.1. INOVASI DAERAH

Inovasi merupakan setiap ide ataupun gagasan baru yang belum pernah ada ataupun diterbitkan sebelumnya. Sebuah inovasi biasanya berisi terobosan-terobosan baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh sang innovator (orang yang membuat inovasi). Inovasi biasanya sengaja dibuat oleh sang innovator melalui berbagai macam aksi ataupun penelitian yang terencana. Inovasi dalam suatu instansi pemerintah akan melibatkan kreativitas dari para pegawainya, terutama dalam inovasi pelayanan terhadap masyarakat/pelayanan publik.

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu *tool* dalam mengakselerasi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa inovasi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang telah dijabarkan ke dalam program unggulan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas



Peraturan Bupati Nomor 78A tahun 2022 tentang Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022)

1. SI PEKA BU SISKI (Sistem Pemantauan Kesehatan Bayi Baru Lahir Berbasis Keluarga) - Dinas Kesehatan
2. GERCEP DULANG MAS (Gerak Cepat Dukung Penanggulangan Masalah Anak Stunting) - Dinas Kesehatan
3. GEMADAZI (Gerakan Masyarakat Sadar Gizi) - Dinas Kesehatan
4. BERPIJAK SEHAT (Beriuk Pinak Jamban Keluarga Sehat) - Dinas Kesehatan
5. BKB EMAS (Bina Keluarga Balita Eliminasi Masalah Anak Stunting) - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. DESI COVUDARAT IMAS - Puskesmas Gerung
7. BERSIUL LIMIT - Puskesmas Gerung
8. PR JANDA (Periksa Jentik Cegah Demam Berdarah) - Puskesmas Gerung
9. Pemantauan Kesehatan WUS Melalui Pemeriksaan IVA dan Deteksi Dini Kanker Serviks (Mantan Lupa dek Narsis) - Puskesmas Perempuan
10. Inovasi Program Penyuluhan Keliling (Proling) - Puskesmas Perempuan
11. OBISA (Pijat Bayi Berbasis Budaya Sasak) - Puskesmas Kediri
12. OLGA BERLIAN (Olahraga Bersama Lansia) - Puskesmas Kediri
13. KUPETE JIMAT (Kunjungan Cepat Gangguan Jiwa) - Puskesmas Kediri
14. KECIAL KUNING (Kelola Tingkat Gizi Kurang Stunting) - Puskesmas Kediri
15. PATAMORGANA (Pemantauan Tanaman Obat Keluarga Sederhana) - Puskesmas Kediri
16. PANTING (Pantau Stunting) - Puskesmas Kuripan
17. JALINAN CINTA BIDAN- Puskesmas Kuripan
18. MANTAP BUNDA (Makanan Tepat Buat Ananda) - Puskesmas Kuripan
19. MAKAN BERAYAN - Puskesmas Kuripan
20. Kelas Hipertensi - Puskesmas Kuripan
21. Rehatmin Fe (Remaja Sehat Minum Fe) - Puskesmas Sedau
22. PETASAN SKRINING COVID-19 (Peningkatan Standar Pelaksanaan Skrining Covid-19) - Puskesmas Sedau
23. TOS MADUT (Temukan Obati Sampai Sembuh Dengan Masyarakat Peduli TB) - Puskesmas Lingsar
24. KAMPUNG / DESA SEHAT - Puskesmas Lingsar
25. SIWARTA (Sistem Informasi Warung Data) - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
26. Si BeGaYa (Silahkan Beli Garam Rakyat) - Dinas Kelautan dan Perikanan
27. GEMARIKAN (Gerakan Makan Ikan) - Dinas Kelautan dan Perikanan
28. APLIKASI AYO KE LOMBOK - Dinas Pariwisata
29. GERDUMENTE (Gerakan Terpadu Menuju Nol Temuan) - Inspektorat
30. SIKAT (Survei Indeks Kepuasan Masyarakat) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
31. SI IPO (Sistem Ijin Penelitian Online) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
32. Strategi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui “Gardu Jaket” (Gerakan Terpadu Kejar Paket) - H. Akhmad Saikhu, SE, MM (Badan

- Perencanaan Pembangunan Daerah)
33. LO BISA (Sejelo Bina Desa) - Kecamatan Narmada
 34. OPLAS AWET MUDA - Kecamatan Narmada
 35. Nyambang Desa - Kecamatan Lingsar
 36. Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui Pusat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (PUSDATU KESSOS) - Lalu Martajaya, S.Pi., M.M (Dinas Sosial)
 37. Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Online Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Si Jempol Jari) - Suparlan, S.Sos (Badan Pendapatan Daerah)
 38. JAGA DESA - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 39. KUMIS PAK RADEN (Kamis Manis Minum Obat dengan Benar) - RSUD Patut Patuh Patju
 40. Lean Managemen - RSUD Patut Patuh Patju
 41. SI POP CETAR (pemantauan ibu pasca bersalin) - RSUD Patut Patuh Patju
 42. RASI DOE INAK KAKKE (pelayanan terintegrasi pada bayi baru lahir) - RSUD Patut Patuh Patju
 43. SI CATPOR IMUT (Sistem Pencatatan Indikator Mutu Rumah Sakit) - RSUD Patut Patuh Patju
 44. Optimalisasi Pengelolaan Laboratorium Komputer Melalui P4 (Penataan Penginventarisasian Pemeliharaan dan Pemanfaatan) di SMPN 4 Kuripan Kec. Kuripan) - Nonik Fatmala, S.Pt (SMPN 4 Kuripan)
 45. Penggunaan Media Video Animasi Pembelajaran demi Meningkatkan Pemahaman Siswa pada Mata Pelajaran Tik Di Kelas VII SMPN 4 Sekotong - Novitasari Putri, S.Pd (SMPN 4 Sekotong)
 46. Pengolahan Limbah Menjadi Biogas Mini Rumah (BIOMIRU) - Erliana Siswati, S. Pd (SDN 1 Narmada)
 47. Peningkatan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV SDN 1 Senggigi Dengan Media Serangga (Stik eskrim dan ular tangga). - Muazatul Wardi, S.Pd (SDN 1 Senggigi)
 48. Optimalisasi Kemampuan dan Minat Membaca Siswa Melalui Pohon Literasi dan Metode Talking Stick pada Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 1 Senggigi Kabupaten Lombok Barat - Nina Mariani, S.Pd (SDN 1 Senggigi)
 49. Menerapkan Media Pembelajaran” Kartu Huruf Bergambar” dalam Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Mengenal Huruf - Ni Wayan Trisna Wati,S.Pd (SDN 2 Sekotong Tengah)
 50. Penerapan Model Pembelajaran Snow Ball Throwing Guna Meningkatkan Hasil Belajar IPA - Ni Wayan Budi Artini,S.Pd (SDN 3 Taman Baru)
 51. Peningkatan Kemampuan Berhitung Operasi Perkalian Bilangan Menggunakan Teknik Polamatika Pada Siswa Kelas IV di SDN 4 Pelangan Kecamatan Sekotong - Ni Putu Ria Apriani, S. Pd (SDN 4 Pelangan)
 52. Link and Match Tabel Punet Kancing Genetika pada Pewarisan Sifat Makhluk Hidup - Lalu Ukir, S.Pd (SMPN 1 Gunungsari)
 53. Pelayanan Informasi Orang Tua Murid Melalui Aplikasi Website Sekolah (PROMOSILAH) - Sudomo, S.Pt (SMPN 3 Lingsar)
 54. SI LADA MAS (Sistem Pelaporan Keberadaan Ormas - Badan Kesatuan Bangsa

- dan Politik
55. GERTAK PANGAN (Gerakan Pertanian Keluarga Terpadu Berbasis Pekarangan) - Dinas Ketahanan Pangan
 56. E - DEDORO (Bank Sampah berbasis Desa) - Dinas Lingkungan Hidup
 57. GAMAK (Gerakan Anti Merarik Kodek) - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Peempuan dan Perlindungan anak
 58. GERASAK (Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 59. KABARKU PASTI - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 60. STRATEGI MARKETING PRODUK UMKM DENGAN E-LAPAK “SITEBEL” - Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah
 61. STRATEGI PELAYANAN INFORMASI PASAR TENAGA KERJA - Dinas Tenaga Kerja
 62. E-KIR LOMBAR - Dinas Perhubungan
 63. SIPAKALING (Sistem Pelayanan Informasi Keliling) - Kec. Sekotong
 64. SELARAS (Akselerasi Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 65. Aning Solah Sugih (Anti Stunting, Sekolah Sampai Kuliah, Sukses Graduasi Mandiri Sejahtera) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 66. SI-PASU (Sistem Informasi Pangkat dan Pensiun) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
 67. Gerakan Terpadu Nol Drop Out (No Drop) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 68. SI GIGI BERSERI (Sikat gigi Bersama Setiap Hari) - UPT Puskesmas Penimbung
 69. SNIPER GMIL (Skrining Hipertensi Bagi Ibu Hamil) – UPT PKM Gerung
 70. MERARIK MASAL (Mengurangi Resiko Lahir Mati Pada masa Anternatal) – UPT PKM Gerung
 71. MANTAN LUPA DEK NARSIS (Pemantauan Kesehatan WUS melalui Pemeriksaan IVA dan Deteksi Dini Kanker Servik) – UPT PKM Perampuan
 72. Jalinan Cinta Bidan – UPT PKM Kuripan
 73. EMAS ANTIK MAMA ATEK (Dokter Puskesmas Perempuan Cantik Mantapkan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga) – UPT PKM Pelangan
 74. SEHATI TUK LARA (Desa Bersih dan Sehat melalui Pembentukan kelompok Pengelola Sampah Rumah Tangga di Desa Gili Gede Indah Wilayah Kerja IPT PKM Pelangan) – UPT PKM Pelangan
 75. PANTING (Pantau Stunting) – UPT PKM Kuripan
 76. MERISAK BUMIL RISTI (Mengurangi Resiko Kematian Ibu Hamil Resiko Tinggi) – UPT PKM Kuripan
 77. OBAT MANIS (Pelayanan Informasi Obat untuk Menciptakan Kemandirian Pasien Prolanis) – UPT PKM Kediri
 78. GERAKAN PROLANIS SEHAT (GPS) – UPT PKM Narmada
 79. SIPP BOS (Sistem Informasi Pemakaian dan Permintaan Obat Secara Online Spreadsheet) – UPT PKM gerung
 80. SIP UMI MANIS (Sistem Pengelolaan dalam Upaya Pencegahan Penularan

- Penyakit Malaria Menuju Indonesia Sehat) UPT PKM Penimbung
81. KAPUK KERING (Kelas Papuk Kurangi Stunting) – UPT PKM Kediri
 82. PEMANTAUAN PEMAKAIAN OBAT ARV PADA PASIEN HIV/AIDS DI PKM MENINTING – UPT PKM Meninting
 83. OLGA BERLIAN (Olahraga Bersama Lansia) – UPT PKM Kediri
 84. KUPETE JIMAT (Kunjungan Cepat Gangguan Jiwa) - UPT Puskesmas Kediri
 85. PEKA HALLO TB (Pelayanan konseling online apoteker dengan memanfaatkan aplikasi hallo TB) - UPT Puskesmas Sekotong
 86. Mesin Ketawa (Meningkatkan Screening Kesehatan Jiwa) – UPT PKM Eyat Mayang
 87. Kamis Manis Minum Obat Dengan Benar (KUMIS PAK RADEN) - RSUD PPP
 88. SI DINI CANTIK (Deteksi Dini Kecacingan Pada Balita Gizi Kurang) – UPT PKM Gunung Sari
 89. SI ATLET PENDIAM DARI POSGA (Peran Fungsi ATLM Dalam Peningkatan Deteksi Dini HIV-AIDS dan IMS Pada Usia Produktif di Posyandu Keluarga) - UPT Puskesmas Perampuan
 90. GEMAR JANDA (Gerakan Masyarakat Menggunakan Jamban Dan air bersih) - UPT Puskesmas Penimbung
 91. REHATMIN FE [Remaja Sehat Minum FE] - UPT Puskesmas Sigerongan
 92. SI POP CETAR (Observasi Post Operasi Sectio Caesarea Terintegrasi) - RSUD PPP
 93. PIN IG SI ANA (Penyampaian Informasi Melalui Instagram Cegah Anemia) - UPT Puskesmas Sigerongan
 94. GEMASANTIK DENGAN JUMPA BERLIAN (Gerakan Masyarakat Sadar Jentik Dengan Jum,at Pagi Bersihkan Lingkungan Anda) - UPT Puskesmas Pelangan
 95. SIMPOKES DASTA (Sistem Informasi Laporan dan Keluhan Masyarakat) - UPT Puskesmas Dasan Tapen
 96. APT ASIK (Optimalisasi Penginputan Imunisasi TT di Aplikasi Sehat Indonesiaku) - UPT PKM Dasan tapen
 97. SI MANIS (SISTEM INFORMASI MENGINGATKAT JADWAL KONTROL IBU HAMIL MELALUI NOTIVIKASI WATHSAP) - UPT RSUD Awet Muda Narmada
 98. BISIKIN (BINCANG ASIK DENGAN INTERNIS) - UPT RSUD Awet Muda Narmada
 99. TOSS MADUT (Temukan TBC Obati Sampai Sembuh dengan Masyarakat Peduli TBC) - UPT Puskesmas Lingsar
 100. Mengurangi kesenjangan (Gap) Capaian Skrining HIV pada Populasi Kunci (PONCI) – UPT PKM Lingsar
 101. Optimalisasi Capaian Penanganan Anemia Pada Ibu Hamil Yang terjaring pada TW I – UPT PKM Sigerongan
 102. SEPATU PINTAR (SISTEM PEMANTAUAN PENYAKIT TIDAK MENULAR) - UPT Puskesmas Narmada
 103. GUBUK ONLINE (Gerakan Untuk Bumil Kek Dalam Menurunkan Angka Stunting) - UPT Puskesmas Pelangan

104. OPTIMALISASI PENINGKATAN SCREENING HIV – UPT PKM Pelangan
105. BASUH ANTING (Banner Suluh dan Konsultasi Gizi Online Atasi Stunting) - UPT Puskesmas Sigerongan
106. KADES KASI CUAN (TINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN ADVOKASI DAN PEMICUAN) - UPT Puskesmas Sekotong
107. SEKAP STUNTING (Sistem Edukasi Pada Kader Peduli Stunting) - UPT Puskesmas Sekotong
108. KADES KASI CUAN (TINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN ADVOKASI DAN PEMICUAN) - UPT Puskesmas Sekotong
109. BASUH HATI (Bapak Ibu Asuh Satu hati) – UPT PKM Narmada
110. SI DINI KEMBANG DESA (Skrining Dini Tumbuh Kembang di Desa) – UPT PKM Suranadi
111. SAYANK BUMIL (Optimalisasi pelayanan Kesehatana Ibu Hamil) – UPT PKM Sedau
112. SI MAIL (Optimalisasi Capaian Penanganan Anemia Pada Ibu Hamil) - UPT PKM jembatan Kembar
113. KURMA PENGGAWA (KUNJUNGAN RUMAH PENDERITA GANGGUAN JIWA PADA KELUARGA CARE GIVER) - UPT Puskesmas Sekotong
114. GERMA'S DIRI ITU PENTING (Gerakan Pemantauan PHBS Mandiri Untuk Pencegahan Stunting) - UPT Puskesmas Perampuan
115. OPTIMALISASI PENINGKATAN KEPATUHAN PETUGAS UGD DALAM STERILISASI ALAT KRITIKAL – UPT PKM Perampuan
116. OPTIMALISASI SKRINING KESEHATAN JIWA – UPT PKM Labuapi
117. Open kata (Optimalisasi Capaian Temuan Kasus Pnemonia Balita) – UPT PKM Banyumulek
118. DENDEK IDAP SEMETON (Deteksi DINI TB Ko-Infeksi HIV AIDS Melalui Skrining Pemeriksaan LED sebagai Monitoring Pengobatan Tuberkulosis) – UPT PKM Gunung Sari
119. Gelas Antiq (Gerakan lansia Sehat AKtif dan Istiqomah) – UPT PKM Gunung Sari
120. Menurunkan Persentase Wasting – UPT PKM Sesela
121. KECIAL KUNING (Kelola Tingkat Gizi Kurangi Stunting) – UPT PKM Kediri
122. PAMAN SISK BARUNTING (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat Bantu Turunkan Stunting) – UPT PKM Meninting
123. OPTIMALISASI PEMERIKSAAN HIV SEBESAR 100% PADA WANITA PEKERJA SEKS (WPS) – UPT PKM Meninting
124. Kisah pak Pos (Kita Pilah Sampah bawa ke Posyandu) – UPT PKM Gunung Sari
125. TERIMA GAJI (Temukan Rawat Inisiasi Masyarakat dengan Gangguan Jiwa) – UPT PKM Gunung Sari
126. PELUK BUMIL ELIT (Pelayanan USG Ibu Hamil Daerah Sulit) – UPT PKM Sekotong
127. OPTIMALISASI PENEMUAN ORANG TERDUGA TBC – UPT PKM Sekotong

128. SI PANCAKE LABU PLUS KETAN (Maksimalkan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi dengan kelas Ibu Hamil Plus dan Kalender Kesehatan) – UPT PKM Perampuan
129. SIP OM FEFI (SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN OBAT METODE FEFO DAN FIFO DENGAN SPREADSHEET) – UPT PKM Penimbung
130. MANTRI IMOET (Melakukan edukasi dan Test Screening HIV melalui Mobile VCT) – UPT PKM Penimbung
131. Pemda Menyapa Desa Tahun 2024 – DPMD
132. Senggigi Sinergi - Dinas Pariwisata
133. Jum'at Pendampingan Rutin Sehari dan Kolaborasi di Desa Wisata (JUM'AT PERIRIK DEWI) - Dinas Pariwisata
134. Sekakmat (Sehari Evaluasi Koordinasi Antar Kecamatan dan Desa) – Kecamatan Narmada
135. Sinergi Jaga Desa dari Semrawut (SIGADIS) - Kecamatan Kediri
136. Klik (Konsultasi Kecamatan) – Kecamatan Lingsar
137. Kecamatan Menyapa Desa (KMD) – Kecamatan Lingsar
138. LinTas (Lingsar Tanpa Sampah), sosialisasi pengelolaan sampah – Kecamatan Lingsar



PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Bab 5 berisi:

1. Kesimpulan
2. Saran Perbaikan

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024, berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Bab 3 dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah memperlihatkan pencapaian kinerja atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian terhadap 20 sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dapat diketahui terdapat Terdapat 13 indikator yang telah mencapai target, dan 7 indikator yang tidak tercapai. Adapun target yang tidak tercapai adalah:

1. Penanaman Modal Asing (PMA) 10.05 %
2. Nilai AKIP Daerah 78.11%
3. Kabupaten Layak Anak (KLA) 82.20%
4. Rata - Rata Lama Sekolah (RLS) 95.69%
5. Harapan Lama Sekolah (HLS) 96.48%
6. Nilai PDRB Perkapita 97.04%
7. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 99.14%

TABEL 5.1
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

	<i>Sasaran</i>		<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Satuan</i>	<i>Tahun 2024</i>			<i>Ket.</i>
					<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90.03	91.22	101.32	Tercapai
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100.00	Tercapai
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	3	Nilai AKIP Daerah	Nilai	A (83,50)	65,22 (B)	78.11	Tidak tercapai
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam pengembangan wilayah	4	Persentase Wilayah Terhubung dengan Pusat Perekonomian	%	94.00	94.07	100.07	Tercapai

	<i>Sasaran</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Satuan</i>	<i>Tahun 2024</i>			<i>Ket.</i>
				<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>	
5	Meningkatnya akses infrastruktur dasar	5 Persentase Rumah Layak Huni	%	98.15	98.80	100.66	Tercapai
		6 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	%	84.72	94.45	111.48	Tercapai
6	Meningkatnya daya saing sektor ekonomi unggulan	7 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	15.73	19.03	120.97	Tercapai
		8 Nilai PDRB Perkapita	Juta Rupiah	15.56	15.10	97.04	Tidak tercapai
		9 Nilai Realisasi investasi				77.355	Tidak tercapai
		Penanaman Modal Asing (PMA)	Juta US \$	169.27	17.01	10.05	
		Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN Fasilitas)	Rp. Milyar	784.93	1135.46	144.66	
7	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	10 Angka Kemiskinan	%	12.69	12.65	100.32	Tercapai
		11 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2.86	2.75	103.85	Tercapai
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	12 Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	67.92	72.64	106.95	Tercapai
9	Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan	13 Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7.19	6.88	95.69	Tidak tercapai
		14 Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14.50	13.99	96.48	Tidak tercapai
10	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15 Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor	910.00	748.00	82.20	Tidak tercapai
		16 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91.50	90.71	99.14	Tidak tercapai
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	17 Indeks Kualitas Udara	Indeks	88.22	94.24	106.82	Tercapai
		18 Indeks Kualitas Air Sungai	Indeks	42.60	43.42	101.92	Tercapai
		19 Indeks Kualitas Lahan	Indeks	46.50	49.88	107.27	Tercapai
12	Menurunnya Risiko Bencana	20 Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.68	0.78	114.71	Tercapai

5.2 SARAN PERBAIKAN

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD tahun 2019-2024. Banyak dinamika yang muncul selama proses pemerintahan, baik hal yang mendukung keberhasilan pencapaian maupun sebaliknya. Pemerintah Kabupaten tetap konsisten memberikan Upaya dan Solusi optimal dalam menghadapi tantangan yang ada. Mulai dari perubahan perencanaan RPJMD di tahun 2021, penyesuaian struktur organisasi, penyederhanaan birokrasi, pendampingan penyusunan pohon kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perbaikan SOP diberbagai unit pelayanan, optimalisasi peran APIP dan lain sebagainya.

Seperti gading yang tak retak, begitupun dengan roda pemerintahan di tahun 2024 juga membutuhkan upaya perbaikan untuk lebih baik di masa depan. Adapun saran perbaikan yang perlu dilakukan adalah:

1. Komitmen dan konsistensi Pimpinan dalam mewujudkan visi dan misi daerah.
2. Perbaikan berkelanjutan di segala aspek pemerintahan maupun pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan prima.
3. Optimalisasi tugas dan fungsi baik secara personil, unit kerja maupun instansi.
4. Perlu adanya system reward dan punishment dalam setiap kinerja baik secara individu maupun organisasi. Hal ini merupakan Upaya mendorong antusiasme baik personal maupun organisasi untuk bersaing mencapai target kinerja.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
INSPEKTORAT

Jl. Soekarno-Hatta Giri Menang Gerung No. Telp.(0370) 6186366
Fax : (0370) 6186366 Kode Pos 83363; E-Mail : Inspektoratkablobar@gmail.com
Website : www.Inspektorat.lombokbaratkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2024

Telah dilakukan reviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Kabupaten Lombok Barat tahun 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan hasil reviu, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Inspektur Kabupaten Lombok Barat,



H. ADEMAN, S.H., M.H., CGCAE.
Jaksa Utama Muda (IV/c)
NIP.19671231 199303 1 036



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
INSPEKTORAT

Jl. Soekarno-Hatta Giri Menang Gerung No. Telp.(0370) 6186366
Fax : (0370) 6186366 Kode Pos 83363; E-Mail : Inspektoratkablobar@gmail.com
Website : www.Inspektorat.lombokbaratkab.go.id

Gerung, 24 Maret 2025

Nomor : 700/115/Inspektorat/III/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 2 eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Reviu Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2024.

Kepada
Yth. Bupati Lombok Barat
di
Gerung

Dengan ini disampaikan Laporan Hasil Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut :

A. DATA UMUM

1. Dasar Pelaksanaan Reviu

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tanggal 1 Desember 2014 tentang Perunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3) Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 34 Tahun 2023 Tanggal 10 Juli 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
- 4) Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kabupaten Lombok Barat Nomor : Inspektorat /STU.III/80/III//2025 Tanggal 10 Maret 2025 untuk melakukan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.

2. Waktu dan Pelaksanaan Reviu

Waktu dan pelaksanaan Reviu dari tanggal 11 sampai dengan 17 Maret 2025.

3. Tujuan Reviu

Tujuan Reviu untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2024.

4. Sasaran Reviu

Sasaran Reviu adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024.

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 terdiri dari :

- 1) Format
- 2) Mekanisme Penyusunan
- 3) Substansi

B. SIMPULAN

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tanggal 1 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Memperhatikan ketentuan tersebut diatas Inspektorat Kabupaten Lombok Barat telah melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 dengan melakukan penelaahan pada format, mekanisme penyusunan dan substansi dengan hasil sebagai berikut :

1. Format

- 1) Laporan Kinerja telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah (IP)
- 2) LKj telah menyajikan informasi target kinerja
- 3) LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai
- 4) Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan
- 5) Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan
- 6) Telah menyajikan akuntabilitas keuangan

2. Mekanisme Penyusunan

- 1) LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.
- 2) LKj telah menyajikan informasi target kinerja
- 3) Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj.
- 4) Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja
- 5) Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya
- 6) Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait.
- 7) LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.

3. Substansi

- 1) Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.
- 2) Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis.
- 3) Tujuan /sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja

- 4) Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja
- 5) Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.
- 6) IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran
- 7) IKU dan IK telah SMART

Setelah melakukan penelaahan terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024, Tim Reviu Inspektorat Kabupaten Lombok Barat menyimpulkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tanggal 1 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 Inspektur Kabupaten Lombok Barat, 



HADEMAN, S.H., M.H., CGCAE.
Jaksa Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671231 199303 1 036



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

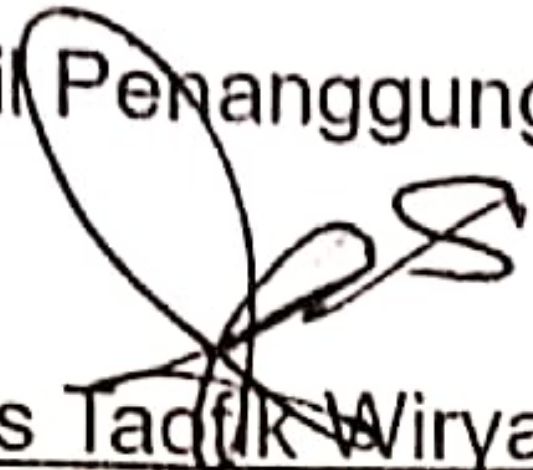
INSPEKTORAT

Jl. Soekarno-Hatta Giri Menang Gerung No. Telp.(0370) 6186366
 Fax : (0370) 6186366 Kode Pos 83363; E-Mail : Inspektoratkablobar@gmail.com
 Website : www.inspektorat.lombokbaratkab.go.id

CHECKLIST REVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

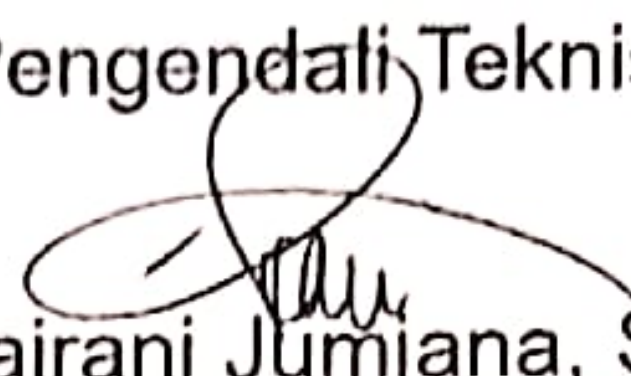
NO	PERNYATAAN			CHECK LIST
I	FORMAT	1	Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah (IP)	✓
		2	LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3	LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5	Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan	✓
		6	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
II	MEKANISME PENYUSUNAN	1	LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	✓
		2	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai.	✓
		3	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj.	✓
		4	Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5	Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6	Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait.	✓
		7	LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	✓
III	SUBSTANSI	1	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	✓
		2	Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis.	✓
		3	Tujuan /sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja	✓
		4	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator Kinerja Utama.	✓
		5	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	✓
		6	IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
		7	IKU dan IK telah SMART	✓

Wakil Penanggung Jawab,


L. Agus Tadjik Wiryana, SH MM
NIP.197108161992031005

Gerung, Maret 2025

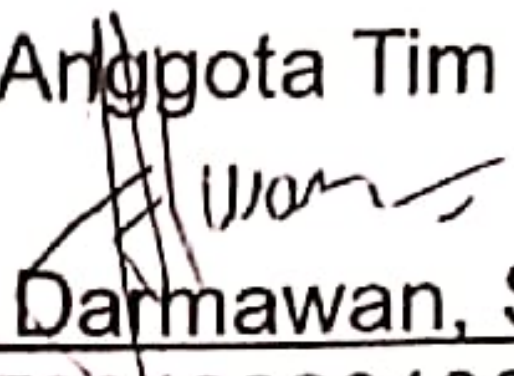
Pengendali Teknis,

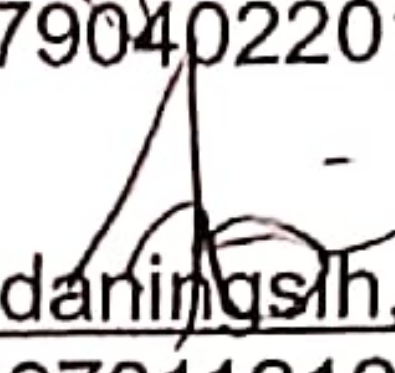

Khairani Jumiana, S.Adm
NIP.196509101990032013

Ketua Tim

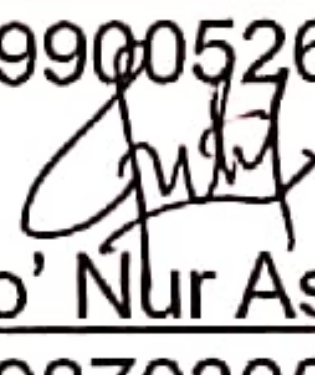

Desak Komang Sinung S, S.Adm
NIP.197308181992032001

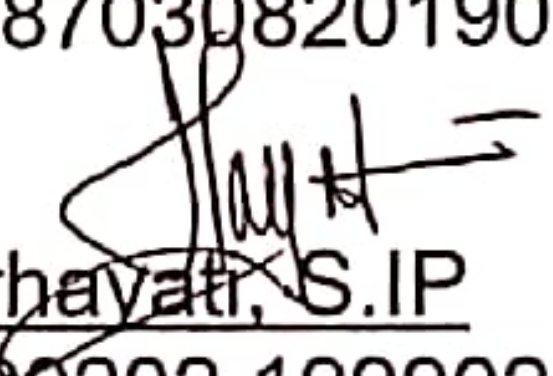
Anggota Tim


Iwan Darmawan, SE
NIP.19790402201001007


Kaidaningsih, SE
NIP. 19781121201001


Ramang Aulia Mursidi, SH M.Kn
NIP.199005262019031001


Asro' Nur Astuti, SE
NIP.198703082019032004


Nurhayati, S.IP
NIP.19790202 199902 2 002